

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-NYA, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun Anggaran 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah selesai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. Pada Laporan Kinerja ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022. Keberhasilan dan kegagalan pada tahun 2022 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023.

Kami berharap kiranya laporan akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta informasi yang dapat dijadikan salah satu sumber referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi semua karya kita sekecil apapun dalam berkontribusi untuk ikut memajukan bangsa dan negara.

Palu,       Maret 2023  
                  Kepala Dinas  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
                  Provinsi Sulawesi Tengah

**SISLIANDY PONULELE**  
Pembina Utama Madya  
NIP: 19780707 199712 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL.....	4
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1    CASCADING KINERJA;.....	8
1.2    TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI; .....	10
1.3    ISU-ISU STRATEGIS;.....	32
1.4    DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA PRASARANA; .....	39
1.5    TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021;.....	49
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	61
2.1    TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	61
2.2    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022;.....	68
2.3    STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022;.....	75
2.4    INDIKATOR KINERJA UTAMA PERJANJIAN KINERJA;.....	83
2.5    PERJANJIAN KINERJA;.....	137
a.    Penetapan Kinerja .....	137
b.    Perjanjian Kinerja.....	138
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	150
3.1    CAPAIAN KINERJA;.....	150

3.2	EESIENSI SUMBER DAYA DAN REALISASI ANGGARAN; .....	261
	Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran .....	261
3.3	Inovasi .....	263
3.3.2	Inovasi .....	265
BAB 4	PENUTUP .....	269



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.4.1 Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin s/d Tahun 2022</b> .....	39
<b>Tabel 1.4.2 Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan s/d Tahun 2022</b> .....	39
<b>Tabel 1.4.3 Keadaan Pegawai Menurut Golongan s/d Tahun 2022</b> .....	40
<b>Tabel 1.4.4 Keadaan Pegawai Menurut Jabatan s/d Tahun 2022</b>	40
Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	63
<b>Tabel 2.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan</b> .....	72
Tabel 0.1 Sarana dan Prasarana UPT. Balai Pelatihan Tahun 2022	133
Tabel 0.2 Peserta dan Angkatan Diklat Periode 2018-2022 .....	135
Tabel 0.3 Penerimaan PAD UPT-Diklat Periode 2018-2022.....	136
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Sasaran-1 Meningkatnya Kualitas Koperasi .....	151
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran-2 Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha .....	153
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas Kop dan UKM Prov. Sulteng).....	154
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pelatihan .....	156
Tabel 3.5 Analisis Perbandingan Kinerja Tahun 2021-2022 .....	157
Tabel 3.11 Analisis Efisiensi Tahun 2022 .....	167
Tabel 3.6 Target Kinerja Jangka Menengah.....	169
Tabel 3.7 Evaluasi dan Analisa Akuntabilitas Kinerja 2022 .....	256
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana.....	261
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana.....	262
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program.....	262

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab; dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance, lahirlah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Provinsi Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju hanya bisa terwujud bila ditunjang oleh Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan sebagai mana tertuang dalam misi 3. Misi tersebut dipandang sebagai misi yang amat penting dan strategik karena mendasari kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Koperas,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dituntut untuk menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya secara optimal, demokratis, bertanggungjawab, transparan dan responsive sesuai amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Dalam upaya mengantisipasi berbagai tantangan dan hambatan maupun perkembangan yang semakin sulit dan kompleks, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dituntut untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dengan menyusun Laporan Kinerja (LKj). Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan yang telah dibebankan disajikan beberapa hal berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang telah dipersyaratkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan 2 dapat diperoleh dari data-data indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan secara keseluruhan berada dalam renstra tahun 2021 – 2026.
4. Dalam pencapaian kinerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Program-program yang bersumber dari dana APBD dan APBN dalam pelaksanaannya di tujukan untuk saling mendukung yang dijabarkan ke dalam 3 indikator sasaran, dan telah dilaksanakan semuanya, namun tingkat keberhasilan dari semua indikator kegiatan dan program pada tataran outcome belum berhasil diwujudkan secara optimal. Secara umum penyebab dari belum optimalnya pencapaian hasil telah di jelaskan pada bab III.
5. Dalam Laporan Kinerja tahun 2022 pencapaian sasaran diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan indicator kinerja, 2 (dua) sasaran dalam kategori sangat baik atau sangat berhasil, 1 (satu) sasaran dalam kategori sedang.
6. Didukung oleh 8 program yang berasal dari pendanaan APBD dan 1 program yang berasal dari pendanaan APBN.
7. Dari jumlah komulatif anggaran APBN dan APBD (setelah perubahan) teralokasi anggaran sebesar **Rp. 20.938.347.067,00,-** terealisasi sampai dengan tanggal 31

Desember tahun 2022 sebesar **Rp. 19.882.446.734,00,-**.  
**(94,96%)** sementara fisik kegiatan mencapai 100%.

8. Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah diupayakan melalui perubahan Kelembagaan sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2014 struktur organisasi dari Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan maksud di antaranya setiap sektor dipegang oleh satu Kepala Dinas supaya lebih fokus dan efektif.
9. Kami menyadari bahwa informasi yang disajikan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait maupun yang berkompeten, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Demikian Ikhtisar eksekutif ini dibuat untuk menjelaskan secara umum hasil Laporan Kinerja tahun 2022 dan untuk lebih jelasnya dapat dibaca dari hasil LKj selengkapnya.

Palu,       Maret 2023  
                  Kepala Dinas  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Sulawesi Tengah

**SISLIANDY PONULELE**  
Pembina Utama Madya  
NIP: 19780707 199712 1 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 CASCADING KINERJA;

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment).

Adapun Cascading Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :





**MISI 3 MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN**

**Tujuan RPJMD : Menurunkan Pengangguran**  
Indikator Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

**Sasaran RPJMD : Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja**  
Indikator Sasaran : Rasio Penduduk Bekerja

**Tujuan Renstra : Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja**  
Indikator Tujuan : Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap jumlah penduduk yang bekerja

**Sasaran : Meningkatnya Kualitas Koperasi**  
Persentase Koperasi Yang Berkualitas

**Sasaran : Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha**  
Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha

**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**  
Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas

**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**  
Persentase Koperasi Aktif

**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**  
Persentase Koperasi Sehat

**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**  
Persentase jumlah pengurus/anggota koperasi yang meningkat kualitas Sumber daya manusianya dan bersertifikat lulus

**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**  
1/ Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi  
2/ Persentase Koperasi Modern

**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**  
Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala kecil

**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**  
Persentase Usaha Kecil yang naik kelas

**Gambar 1.1**  
**Cascading Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026**

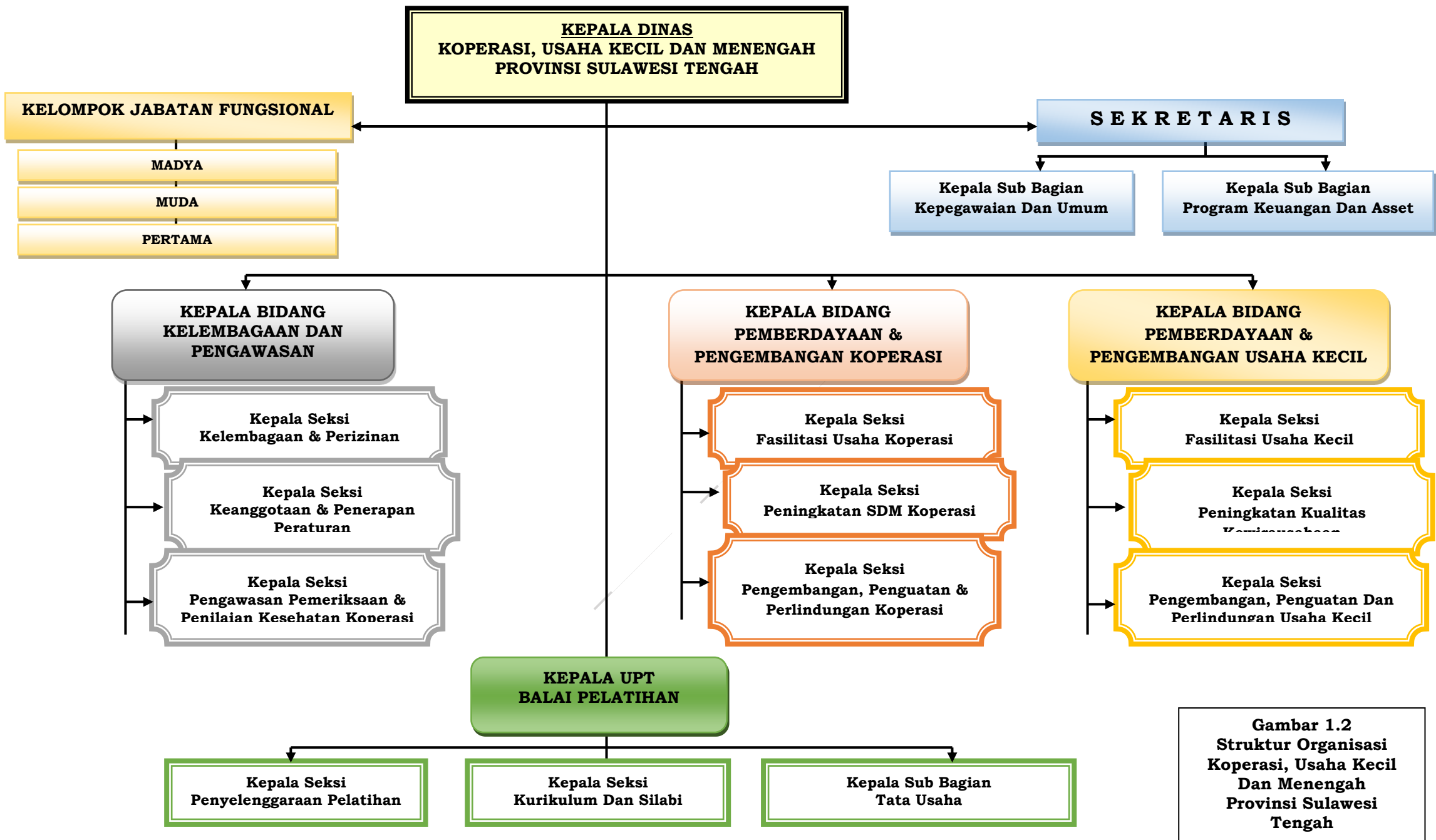
## **1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI;**

- **Dasar hukum pembentukan Dinas KUKM**

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No 74);
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;

- **Struktur Organisasi PD**

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tertuang pada bagan berikut:



Gambar 1.2  
Struktur Organisasi  
Koperasi, Usaha Kecil  
Dan Menengah  
Provinsi Sulawesi  
Tengah

- **Uraian Tugas Dan Fungsi Sampai Degann Eselon IV Dibawah**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia dan asset. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pemisahan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penunjang untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Ditugaskan Kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil;
- c. Pelaksanaan administrasi perencanaan program, keuangan dan asset, kepegawaian dan umum;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan tugas di bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil.

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja yang terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

#### **i. Sekretariat**

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, asset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas;
2. Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
  - Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
  - Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, asset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga, dan umum;
  - Pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

#### **2.2.2 Sub Bagian Program, Keuangan Dan Aset**

- 1] Sub Bagian program, Keuangan dan aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program, keuangan dan asset;
- 2] Uraian Tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1** Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Program;

- 2** Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 3** Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait;
- 4** Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan asset meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengelolaan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan asset;
- 5** Melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuang dan asset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- 6** Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 7** Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- 8** Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan RENSTRA di Lingkungan Instansi terkait;
- 9** Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, asset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- 10** Melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- 11** Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 12** Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

### 2.2.3 Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat-menyurat;
- Uraian Tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum dan Korpri;
  - c. Melakukan koordnasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
  - d. Melaksanakn penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
  - e. Melaksanakan / menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu suami/ istri, SKP, Persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan dan hokum;
  - f. Melaksanakan / mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional tertentu;
  - g. Melaksanakan/menyusun penyusuna Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi manajemen kepegawaian;
  - h. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
  - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian.

**▪ Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan**

- Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan Bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP.
  - ⇒ Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
    - 1.1.1.1.1.1.1 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
    - 1.1.1.1.1.1.2 penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
    - 1.1.1.1.1.1.3 Penyiapan bahan pembinaan / Bimbingan Teknis di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
    - 1.1.1.1.1.1.4 Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;



1.1.1.1.1.1.5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan penyiapan Bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Kelembagaan dan Pengawasan.

▪ **Seksi Kelembagaan Dan Perizinan**

1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Kelembagaan dan Perizinan;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Kelembagaan dan Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - 1.1.1.1.1.1.1 Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Kelembagaan dan Perizinan;
  - 1.1.1.1.1.1.2 Menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Perizinan;
  - 1.1.1.1.1.1.3 Melaksanakan, menyiapkan bahan kebijakan teknis, bimbingan dan peyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
  - 1.1.1.1.1.1.4 Melakukan koordinasi dan bimbingan teknis kelembagaan dan perizinan dengan unit kerja terkait ;
  - 1.1.1.1.1.1.5 Menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
  - 1.1.1.1.1.1.6 Menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
  - 1.1.1.1.1.1.7 Menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
  - 1.1.1.1.1.1.8 Menganalisa berkas pembubaran koperasi;

- 1.1.1.1.1.1.1.9 Menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- 1.1.1.1.1.1.1.10 Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- 1.1.1.1.1.1.1.11 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 1.1.1.1.1.1.1.12 Melaksanakan bahan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi kelembagaan dan perizinan.

**▪ Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan**

- 1.1.1.1 Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
- 1.1.1.2 Dalam melaksanakan Tugas Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
  - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman teknis, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Keanggotaan dan Penerapan Peraturan perundang-undangan, sanksi Koperasi dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
  - c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penerapan peraturan perundang-undangan, sanksi Koperasi dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;

- d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan peraturan perundang-undangan, sanksi Koperasi dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi dengan instansi terkait;
- e. Melakukan menganalisis peraturan perundang-undangan dan sanksi Koperasi;
- f. Melaksanakan rencana pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas seksi Keanggotaan dan penerapan peraturan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- i. Melaksanakan bahan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi keanggotaan dan penerapan peraturan.

**▪ Seksi Pengawasan, Pemeriksaan Dan  
Penilaian Kesehatan KSP/USP**

1. Seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
  - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
  - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;

- c. Melaksanakan, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
- d. Melakukan koordinasi dan bimbingan teknis pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
- e. Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan Koperasi;
- f. Menganalisis data penilaian kesehatan KSP/USP;
- g. Menyusun data kesehatan KSP/USP;
- h. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- i. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. Melaksanakan bahan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan.

**▪ Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi**

- 1. Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi mempunyai tugas menyiapkan Bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaran fungsi Fasilitasi Usaha koperasi, penigkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi mempunyai fungsi:
  - 1.3.1.1.1.1.1.1 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
  - 1.3.1.1.1.1.1.2 Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
  - 1.3.1.1.1.1.1.3 Penyiapan bahan pembinaan / Bimbingan Teknis di bidang Fasilitasi Usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
  - 1.3.1.1.1.1.1.4 Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Fasilitasi Usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
  - 1.3.1.1.1.1.1.5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - 1.3.1.1.1.1.1.6 Penyiapan Bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Fasilitasi Usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.

**▪ Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi**

- 1.2.4.1 Seksi Fasilitasi usaha koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi usaha koperasi;
- 1.2.4.2 Dalam melaksanakan Tugas Seksi Fasilitasi usaha koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi Fasilitasi usaha koperasi;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi, kemitraan antara koperasi, didalam dan luar negeri;
- c. Melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberdayaan koperasi, kemitraan antar koperasi badan usaha lainnya, akses pasar bagi produk koperasi didalam dan luar negeri;
- d. Melakukan koordinasi dan bimbingan teknis pemberdayaan koperasi, kemitraan antar koperasi badan usaha lainnya, akses pasar bagi produk koperasi didalam dan luar negeri;
- e. Melaksanakan rencana pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- f. Melaksanakan pembuatan konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- g. Melaksanakan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi didalam dan luar negeri;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan di lingkungan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j. Melaksanakan bahan penyiapan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Fasilitasi Usah Koperasi.

**▪ Seksi Peningkatan Kualitas Sdm Koperasi**

1. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;

2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
  - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
  - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
  - c. melaksanakan, menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dengan unit kerja terkait;
  - d. melaksanakan kebijakan pada kegiatan seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
  - e. melaksanakan rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
  - f. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi berangkat
  - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
  - i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.

**▪ Seksi Pengembangan, Penguatan Dan  
Perlindungan Usaha Koperasi**

1. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;

2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Peningkatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
  - a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
  - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
  - c. Melaksanakan, menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi dengan unit kerja terkait;
  - d. Melaksanakan kebijakan pada kegiatan seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
  - e. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
  - f. Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
  - g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
  - i. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.



**▪ Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Kecil**

1. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan Bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaran fungsi Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dan peningkatan kualitas kewirausahaan.
2. Dalam menyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dan peningkatan kualitas kewirausahaan;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dan peningkatan kualitas kewirausahaan;
  - c. Penyiapan bahan pembinaan/Bimbingan Teknis di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dan peningkatan kualitas kewirausahaan;
  - d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dan peningkatan kualitas kewirausahaan;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
  - f. Menyiapkan Bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan usaha kecil.

**▪ Seksi Fasilitasi Usaha Kecil**

1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Usaha Kecil;

2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Fasilitasi Usaha Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- Mengelola administrasi administrasi dan menyusun program kerja seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
- Menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis kegiatan akses pasar bagi produk usaha kecil didalam dan luar negeri dan izin usaha mikro kecil;
- Melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi usaha kecil terkait akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri dan fasilitasi kemudahan izin usaha kecil dengan unit kerja terkait;
- Melaksanakan bahan koordinasi dan bimbingan teknis Fasilitasi Usaha Kecil ;
- Merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- Menganalisis data izin usaha mikro kecil;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis Fasilitasi Usaha Kecil;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Fasilitasi Usaha Kecil.

#### **1.2.14 Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Kecil**

- 1.2.14.1 Seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
- 2)** Dalam melaksanakan Tugas Seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- 2.1.1.1.1.1.1 Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
  - 2.1.1.1.1.1.2 Menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
  - 2.1.1.1.1.1.3 Melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
  - 2.1.1.1.1.1.4 Melakukan bahan koordinasi dan bimbingan teknis Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dengan unit kerja terkait ;
  - 2.1.1.1.1.1.5 Melaksanakan pengembangan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
  - 2.1.1.1.1.1.6 Melaksanakan rencana pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
  - 2.1.1.1.1.1.7 Melaksanakan rencana kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
  - 2.1.1.1.1.1.8 Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;

- 2.1.1.1.1.1.9 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 2.1.1.1.1.1.10 Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil.

## **2.1.2 Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan**

- (1) Seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan kualitas kewirausahaan;
- 2) Dalam melaksanakan Tugas Seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - 1.4.1.1.1.1.1 Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan;
  - 1.4.1.1.1.1.2 Menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Peningkatan kualitas kewirausahaan;
  - 1.4.1.1.1.1.3 Melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan melaksanakan kegiatan Peningkatan kualitas kewirausahaan dengan unit kerja terkait;
  - 1.4.1.1.1.1.4 Melaksanakan bahan koordinasi dan bimbingan teknis Peningkatan kualitas kewirausahaan;
  - 1.4.1.1.1.1.5 Melaksanakan rencana pengembangan kewirausahaan;
  - 1.4.1.1.1.1.6 Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan kualitas kewirausahaan;
  - 1.4.1.1.1.1.7 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

1.4.1.1.1.1.1.8 Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan.

### **2.1.3 Kepala UPT Balai Pelatihan KUKM**

1. Kepala UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada dinas dibidang Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Penyiapan pelaksanaan kepada masyarakat bidang pelatihan koperasi dan usaha mikro kecil menengah ;
  - 2) Penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas sesuai dengan bidang pelatihan koperasi dan usaha mikro kecil menengah ;
  - 3) Penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD ; dan
  - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3.2.17 Sub Bagian Tata Usaha**

- Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan asset, perlengkapan serta pengelolaan naskah dinas.
- Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi:

- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian tata usaha;
- c. Menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang ketatausahaan
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang ketatausahaan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
- f. Melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan karpeg, kartu askes, taspen, karsi/karsu, menyusun duk, diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
- g. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelolah keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
- h. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan dilingkungan upt;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha dan upt pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan

### **3.2.18 Seksi Kurikulumm Silabi**

1. Seksi Kurikulum Silabi UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan melakukan evaluasi serta menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bidang kurikulum silabi.
2. Uraian tugas Seksi Kurikulum Silabi meliputi:
  1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja seksi kurikulum silabi;
  2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang kurikulum silabi;
  3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur dilingkungan uptd kukm;
  4. Melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kurikulum silabi;
  5. Melaksanakan penyiapan bahan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang kurikulum silabi;
  6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang kurikulum silabi;
  7. Melaksanakan penyiapan bahan menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas seksi kurikulum silabi; dan
  8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan.

#### **19. Seksi Penyelenggaran Pelatihan**

1. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang penyelenggaraan pelatihan.
2. Uraian tugas seksi penyelenggaraan pelatihan meliputi:

1. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja seksi penyelenggaraan pelatihan;
2. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang penyelenggaraan pelatihan;
3. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan urusan bidang penyelenggara pelatihan;
4. melaksanakan kegiatan teknis berupa pengkajian dan pengembangan penyelenggara pelatihan;
5. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan pelatihan;
6. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan kegiatan teknis bidang penyelenggara pelatihan;
7. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, bimbingan edukatif, registrasi mengenai penyelenggaraan pelatihan;
8. melakukan evaluasi terhadap kegiatan, penggalian dan pemeliharaan penyelenggara pelatihan;
9. melaksanakan penyiapan bahan menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas seksi penyelenggaraan pelatihan; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan.

### **1.3 ISU-ISU STRATEGIS;**

Isu strategis terkait pengembangan Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan sekali sebagai sumber bahan perencanaan yang bersifat top down tetapi juga bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan. Sifat holistik dari perencanaan pembangunan hendaknya juga memperhatikan aktifitas daerah lain baik sebagai mitra maupun sebagai pesaing dalam peningkatan daya saing daerah. Isu-isu tersebut juga menjadi bahan penting bagi kerja sama antara daerah. Berkaitan



dengan perkembangan Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah Pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 maupun Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 tidak lepas dari isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah mengenai Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Reformasi Birokrasi serta Pemulihan Pasca Bencana (alam/non alam).

Penentuan kriteria isu-isu strategis mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah menentukan kriteria prioritas isu strategis yang perlu menjadikan prioritas dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program. Hal tersebut dikarenakan isu strategis prioritas adalah isu yang menjadi prioritas janji yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota dan berdampak terhadap publik. Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan dalam rangka pencapaian tujuan maupun sasaran Rencana Strategis di atas maka isu strategis periode jangka menengah dalam pengembangan Koperasi dan UKM di Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain terkait:

#### **1. Kelembagaan Dan Manajemen Koperasi Dan Usaha Kecil**

Penguatan Kelembagaan dan manajemen menjadi perhatian serius bagi Koperasi dan UKM dalam upaya pembangunan jangka menengah di Sulawesi Tengah. Kinerja kelembagaan dan manajemen Koperasi yang masih belum optimal dipengaruhi faktor internal maupun eksternal. Terkait Koperasi, berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat Koperasi yang belum melakukan RAT tepat waktu, masih ditemukan Koperasi dengan kriteria tidak sehat dan belum berkualitas akibat dari kurangnya Pengawasan dan Pemeriksaan

Kelembagaan dan Usaha yang dilakukan oleh pembina Koperasi. Disisi lain, juga belum optimalnya pendampingan Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UKM akibat dari terbatasnya jangkauan pendampingan kelembagaan dan usaha koperasi karena keterbatasan jumlah tenaga PPKL dan tenaga Pendamping UKM dilapangan. Permasalahan lain berkaitan dengan legalisasi Koperasi dan UKM ditandai dengan masih banyak UKM serta Koperasi yang belum memiliki Izin Usaha dan tidak berkembangnya jumlah anggota koperasi sebagaimana diharapkan dari masyarakat khususnya kaum milenial belum mau membentuk koperasi dan atau menjadi anggota koperasi akibat dari kurangnya penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat khusus kaum milenial.

## **2. Tata Kelola Koperasi dan Usaha Kecil**

Secara umum, pada perkembangannya baik pelaku Koperasi maupun UKM masih melakukan pengelolaan usaha secara konvensional dan belum dikelola secara profesional baik dalam hal manajemen usaha maupun manajemen keuangan. Memperhitungkan potensi dan resiko dalam berusaha belum menjadi perhatian utama dalam pengelolaan usahanya. Kedepannya pemerintah melalui upaya digitalisasi Koperasi dan UKM, baik Koperasi maupun UKM diarahkan melakukan pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi berbasis digitalisasi. Sehingga berdampak pada adanya modernisasi Koperasi dan UKM.

## **3. Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil**

Masalah sumber daya manusia merupakan masalah yang cukup dilematis baik dari pelaku Koperasi maupun pelaku UKM. Rendahnya pemahaman, pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha kecil dan koperasi akibat dari tingkat pendidikan yang masih rendah serta skill yang belum mumpuni. Pendidikan sangat penting

dalam mengembangkan sumber daya manusia karena pengetahuan akan diperoleh salah satunya dengan pendidikan. Orang yang tingkat pendidikannya rendah, cenderung tidak memiliki kemampuan dalam bekerja. Jika dikaitkan dengan Koperasi dan UKM maka keterbatasan sumber daya manusia implementasinya akan berdampak pada upaya pelaku Koperasi dan UKM dalam pengembangan usahanya. Olehnya itu, perlu dilakukan antisipasi dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui program kegiatan yang bersifat pengembangan sumber daya manusia Koperasi tentang perkoperasian maupun UKM tentang kewirausahaan.

#### **4. Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya saing Koperasi dan Usaha Kecil**

Rendahnya produktivitas dan daya saing masih menjadi problem klasik yang mengganjal perkembangan Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah keterbatasan jumlah tenaga terampil berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan. Sebab itu, pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar produk agar mampu meningkatkan kinerja guna menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi. Hal lain dalam peningkatan daya saing berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pelaku Koperasi dan UKM lokal, ini menjadi penting dalam rangka menghadapi situasi persaingan usaha yang makin ketat. Sektor koperasi dan UKM yang memerlukan perhatian khusus untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan daya saing yaitu yang terkait dengan industri kreatif dan inovatif, *handcraft*, *home industry*, dan teknologi informasi. Hal lain yang penting untuk ditekankan bagi Koperasi dan UKM untuk memperbaharui produk dengan berbagai

inovasi dan adaptasi agar selalu up to date sesuai dengan tren dan selera pasar.

#### **5. Sumberdaa Produktif Koperasi Dan Usaha Kecil**

Akses pelaku UKM dan Koperasi terhadap sumberdaya produktif masih perlu ditingkatkan. Tidak diragukan bahwa potensi pengembangan usaha Koperasi dan UKM juga berhubungan langsung dengan potensi sumberdaya yang melimpah berupa potensi sumber daya alam, manusia, teknologi dan informasi. Memaksimalkan potensi sumberdaya menjadi sangat urgen dalam rangka efektifitas pembinaan dan pengelolaan Koperasi dan UKM kedepannya. Olehnya itu, perlu ditingkatkan kerjasama dan saling koordinasi yang intens dengan para stakeholder, instansi serta pemangku terkait dalam rangka memperoleh informasi terkait potensi sumberdaya produktif yang dimiliki baik Koperasi maupun UKM untuk mencapai pembangunan Koperasi dan UKM yang lebih berdaya saing.

#### **6. Akses Pembiayaan/Permodalan, Kemitraan Dan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Kecil**

Permasalahan Koperasi dan UKM paling utama adalah minimnya modal usaha. Akibatnya, para pelaku usaha tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omzet lebih banyak. Permasalahan Koperasi dan UKM selanjutnya terletak pada masalah pendistribusian barang. Selama ini banyak pelaku UKM kekurangan channel dalam mendistribusikan produknya dan upaya menjalin Kerjasama serta kemitraan dianggap cukup efektif dalam upaya pendistribusian produk baik Koperasi maupun UKM. Permasalahan klasik lain yang selalu dialami adalah permasalahan pemasaran. Dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi dan informasi Koperasi dan UKM harus cepat beradaptasi dan merubah paradigma khususnya terkait pemasaran yang biasanya dilakukan

secara konvensional agar ditingkatkan menjadi pemasaran berbasis digital. Dari permasalahan-permasalahan ini peran pemerintah dalam rangka pembinaan lebih ditujukan pada fasilitasi Koperasi dan UKM dalam rangka mengakses pembiayaan/permodalan, temu kemitraan dengan pelaku usaha lain dan pemasaran yang lebih kearah pemasaran online.

## **7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan yang sedang berkembang. Upaya perbaikan tata kelola pemerintahan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan dalam pelayanan publik. Secara umum, diarahkan pada praktik paradigma *New Public Management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta *New Public Service (Governance)* yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa. Olehnya itu, untuk pencapaian pembangunan dalam rangka perbaikan tata kelola pelayanan dan birokrasi yang lebih baik maka perlu diwujudkan melalui upaya peningkatan kapasitas aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Kedepannya pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah lebih diprioritaskan lagi untuk mencapai prioritas sasaran pembangunan khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun untuk pencapaian tersebut pelayanan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya masih diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan lain sebagai berikut:

1. Sebagian besar UKM masih berorientasi pada pasar domestik sehingga perlu upaya untuk memperluas akses UKM terhadap pasar ekspor;
2. Kesenjangan produktifitas antar pelaku usaha dan antar sector semakin lebar;
3. Lambatnya industrialisasi karena kurangnya populasi Usaha Kecil dan Menengah yang diharapkan berperan sebagai usaha/industri pendukung;
4. Keterbatasan atas kapasitas kewirausahaan, akses pembiayaan, inovasi dan teknologi, penerapan standar; dan
5. Regulasi dan kebijakan yang belum cukup efektif memberi kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha bagi UKM.

Sesuai tuntutan dalam perkembangan perekonomian dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, maka diperlukan manajemen pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengacu pada isu-isu strategis kendala yang dihadapi untuk 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan;
2. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam mengelola koperasi, terbatasnya jumlah tenaga penilai koperasi;
3. Pembinaan UMKM belum tepat sasaran;
4. Database UMKM masih belum sepenuhnya update dan detail;
5. Masih terbatasnya sumber daya dalam memfasilitasi dan mengembangkan UKM;
6. Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan dari lembaga keuangan;

7. Kurangnya jumlah produk UMKM yang terstandarisasi baik mutu dan sertifikasi produk;
8. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKMyang kompeten.
9. Pemulihan ekonomi para pelaku koperasi maupun UKM

#### **1.4 DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA PRASARANA;**

##### **1.4.4 Personalia**

Komposisi pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang menduduki blok jabatan maupun yang tidak memangku jabatan berjumlah 65 orang dengan komposisi sebagai berikut:

##### 1. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

**Tabel 1.4.1**  
**Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin s/d Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Unit Organisasi</b>	<b>Pria</b>	<b>Wanita</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Sekretariat	10	12	22
2.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	7	4	11
3.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	2	8	10
4.	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	4	5	9
5.	UPT Pelatihan	5	7	12
6.	Fungsional Tertentu	1	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>65</b>

*Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum*

##### 2. Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan

**Tabel 1.4.2**  
**Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan s/d Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Unit Organisasi</b>	<b>SD</b>	<b>SLTP</b>	<b>SMA</b>	<b>D3</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>Jml</b>
1.	Sekretariat	-	-	7	1	7	7	22
2.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-	-	2	-	5	4	11

3.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	-	2	-	4	4	10
4.	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	-	-	3	-	4	2	9
5.	UPT Pelatihan	-	-	2	-	8	2	12
6.	Fungsional Tertentu	-	-	-	-		1	1
	<b>Jumlah</b>	-	-	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>65</b>

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

### 3. Keadaan Pegawai Menurut Golongan

**Tabel 1.4.3**  
**Keadaan Pegawai Menurut Golongan s/d Tahun 2022**

No	Unit Organisasi	I	II	III	IV	JML
1.	Sekretariat	-	2	17	3	22
2.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-	1	6	4	11
3.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	-	7	3	10
4.	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	-	1	6	2	9
5.	UPT Pelatihan	-	2	8	2	12
6.	Fungsional Tertentu	-	-	-	1	1
	<b>Jumlah</b>	-	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>65</b>

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

### 4. Keadaan Pegawai Menurut Eselon

**Tabel 1.4.4**  
**Keadaan Pegawai Menurut Jabatan s/d Tahun 2022**

No	Unit Organisasi	II	III	IV	Fungsional	Widya iswar a	Staf	Jml
1.	Sekretariat	1	1	2	1	S	18	23
2.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan		1	3			7	11
3.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		1	2			7	10
4.	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil		1	3			5	9
5.	UPT Pelatihan		-	4			5	9
6.	Fungsional Tertentu		4	4			8	12
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>1</b>		<b>32</b>	<b>65</b>

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sesuai tugas dan fungsi yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai pelayanan, maka blok jabatan pada bidang memilih tugas dan



fungsi Teknis Operasional, sedangkan pada blok jabatan sekretariat mengemban mandat yang bersifat administratif fungsional.

Potensi sumber daya manusia pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah pegawai pria sejumlah 29 orang dan wanita sejumlah 36 orang. Dari sisi tingkat pendidikan, yang berpendidikan S2 sejumlah 20 orang berpendidikan S1 sejumlah 29 orang, berpendidikan SMA atau sederajat sejumlah 16 orang. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi pegawai maka keikutsertaan dalam kegiatan bimtek dan pelatihan baik didalam maupun luar daerah terus diupayakan.

Pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang bergolongan IV sejumlah 16 orang, golongan III sejumlah 44 orang, golongan dan II sejumlah 6 orang dengan masa kerja rata-rata 10 tahun dimana seluruh pegawai yang memegang jabatan struktural memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana.

Semua kegiatan dari tugas telah diemban dan diramu dalam bentuk program dan kegiatan sesuai tuntutan kegiatan pembangunan riil yang dibutuhkan, namun masih ditemui berbagai keterbatasan antara lain kemampuan individu aparat yang perlu peningkatan kemampuan dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional serta kesempatan mengikuti seminar/lokakarya dan sejenisnya yang terkait dengan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Upaya ke arah seperti ini dimaksudkan pula untuk mengeliminir penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan individu aparat di samping masih kurangnya referensi untuk memperluas wawasan dalam mengemban tugas jabatannya.

## **2. Keadaan Keuangan dan Aset**

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran

2022 adalah bersumber dari anggaran APBD dan APBN sebagai berikut:

**Tabel 1.4.5**  
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana**

<b>No</b>	<b>Sumber Anggaran</b>	<b>Alokasi (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Keuangan (%)</b>	<b>Fisik Kegiatan (%)</b>
<b>1.</b>	<b>APBD</b>	<b>16.602.714.067,00</b>	<b>15.644.752.229,00</b>	<b>94,23</b>	<b>100</b>
	1. Pegawai	7.486.874.290,00	7.008232.339,00	93.61	100
	2. Belanja Barang dan Jasa	9.115.839.777,00	8.636.519.890,00	94.74	100
<b>2.</b>	<b>APBN</b>	<b>4.335.633.000,00</b>	<b>4.237.694.505,00</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	1. Bidang Koperasi/UMKM	4.335.633.000,00	4.237.694.505,00	98	100
<b>3.</b>	<b>Jumlah (1 + 2)</b>	<b>20.938.347.067,00</b>	<b>19.882.446.734,00</b>	<b>94,96</b>	<b>100</b>

#### **4.4.3 Keadaan Asset, Sarana dan Prasarana Kerja Lainnya**

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh sumberdaya berupa asset, sarana dan prasarana kerja agar tugas dapat berjalan dengan baik, baik tugas operasional maupun administratif fungsional. Kondisi fisik bangunan kantor masih butuh perbaikan, renovasi dan penataan layout. Diharapkan upaya seperti ini akan memberi rasa tenang, nyaman dan akhirnya mendorong semangat dan motivasi kerja. Secara bertahap beberapa tahun terakhir telah mulai diadakan perbaikan dan penataan layout ruang kerja, namun belum maksimal karena alokasi anggaran yang diberikan masih sangat terbatas.

Sarana kerja seperti kursi kerja, komputer, kendaraan dan lain-lain secara bertahap akan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana. Jumlah dan kondisi Asset, sarana dan Prasarana dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.

**Tabel 1.4.6**  
**Sarana dan Prasarana 2022**

No	Jenis Sarana	2021		2022	
		Jml	Ket	Jml	Ket
1.	Kantor			10	RB 2
1	Kendaraan Dinas (Mobil)			7	B
2	Kendaraan Dinas (motor)			29	B
3	Laptop	40	RB. 6	47	RB 12
4	Proyektor + Attachment	8	RB. 1	10	RB.1
5	Genset	3	B	3	B
6	AC	69	RB. 6	103	28.RB
7	Kursi EsL. III	2	Baik	2	B
8	Kursi Kerja Pejabat EsL. IV	5	Baik	7	B
9	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	Baik	6	B
10	Kursi Kerja	77	RR. 1.RB. 1	87	18.RB
11	Kursi Tamu	6	Baik	7	B
12	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	24	Baik	24	B
13	Kursi Lipat	11	RB. 5	42	RB.15
14	Kursi Besi/Metal	86	Baik	98	RB.1
15	Kursi Rapat	52	Baik	52	B
16	Kursi Putar	46	RB. 9	96	RB.22
17	Meja Besi Metal	31	Baik	31	B
18	Meja EsL. III	1	Baik	3	RB.1
19	Meja EsL. IV	6	Baik	7	B
20	Meja Kerja	64	RR. 1.RB. 1	133	72.RB
21	Meja Komputer	8	RR.1	9	RB.1
22	Meja 1/2 Biro	61	RB. 15	61	RB.15
23	Meja Kayu/Rotan	16	Baik	16	B
24	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	10	Baik	10	B
25	Meja Makan	3	RB. 1	14	RB.3
26	Meja Rapat	8	Baik	11	B
27	Meja Reseption	2	Baik	2	B
28	Meja Tulis	3	RB. 3	3	RB.3
29	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	30	RB. 2	41	6.RB
30	Lemari Besi/ Etalase	13	Baik	13	B
31	Lemari Es	6	Baik	6	B
32	Lemari kayu	8	RB. 5	25	15.RB
33	Lemari Makan	1	RB. 1	3	RB.3
34	LEMARI ETALASE	1	Baik	1	B
35	Lemari Pakaian	1	Baik	1	B
36	TV Monitor	3	Baik	4	B

37	Televisi	16	RB. 2	18	2.RB
38	Dispenser	15	Rusak Berat 3	22	12.RB
39	P.C Unit/ Komputer PC	67	RB. 10	78	33.RB
40	Note Book	4	Baik	4	B
41	Telp. Fax	3	Baik	3	B
42	Webinar	1	Baik	1	B
43	Alat Komunikasi Lain-lain	1	Baik	1	B
44	Alat Pembersih Lain-lain	1	Baik	1	B
45	Amplifier	1	Baik	1	B
46	Brand Kas	3	Rusak Ringan 2	4	2.RB
47	Camera Video	9	Rusak Berat 3	15	9.RB
48	CCTV	12	Rusak Berat 1	12	3.RB
49	Equalizer	1	Baik	1	B
50	Exhaust Fan	9	Baik	9	B
51	GordynExhaust Fan	438.m	Baik	605	156.RB
52	Harddisk Eksternal	14	Rusak Berat 13	5	B
53	Jam Elektronik	1	Rusak Berat 1	1	RB
54	Karpet	4	Baik	4	B
55	Kipas Angin	11	Rusak Berat 6	28	21.RB
56	Layar Proyektor	4	RB. 1	4	RB.1
57	Mesin Absensi	2	Baik	3	B
58	Mesin Cuci	1	RB. 1	1	RB.1
59	Mesin Ketik Elektronik	7	RB. 3	7	RB.4
60	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	RB. 1	1	B
61	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik	1	B
62	Mesin Potong Rumput	3	RB. 1	2	B
63	Mic Conference	5	Baik	11	2.RB
64	Mimbar/Podium	2	RB. 1	2	B
65	MonitorMimbar/Podium	4	RB. 2	-	-
66	Organ/Electone	1	Baik	2	B
67	Papan Nama Instansi	1	Baik	1	B
68	Papan Nama Ruangan/Jabatan	15	Baik	15	B
69	Papan Pengumuman	4	Baik	4	B
70	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	3	RB. 3	19	B
71	Peralatan studio Visual Lain-lain	20	RB. 4	24	4.RB
72	Printer	64	RB. 8	64	13.RB
73	Rak Kayu	4	RB. 4	4	RB
74	Scanner	3	Baik	3	B
75	Sofa	71	Baik	71	B
76	Sound System	2	RB. 2	3	B

77	Speaker Aktive Komputer	5	Baik	6	B
78	Stand Microphone	2	Baik	3	B
79	Tandon Air	1	Baik	1	B
80	Tangga Alumunium	5	RB. 2	5	RB.2
81	Tempat Tidur Busa (Springbad)	1	RB. 1	1	RB.1
82	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	1	Baik	1	B
83	Tiang Bendera	5	RB. 1	4	B
84	UPS	34	RB. 19	34	32.RB
85	White Board	1	Baik	1	B
86	Tanah Kaveling (dst)	1	Baik	1	B
87	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik	1	B
88	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik	1	B
89	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik	1	B
90	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik	1	B
91	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1	Baik	1	B
92	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	1	B
93	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	1	B
94	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	1	HAPUS
95	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	1	B
96	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	1	B
97	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	1	B
98	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	1	B
99	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	1	HAPUS
100	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	1	B
101	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	1	B
102	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	1	B
103	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Baik	1	B
104	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Baik	1	Rusak Sedang
105	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	1	Baik	1	B
106	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	1	Baik	1	B
107	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	1	Baik	1	B
108	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	1	Baik	1	B
109	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	1	Baik	1	B
110	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	1	Baik	1	B
111	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	1	Baik	1	B
112	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1	Baik	1	B
113	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1	Baik	1	B
114	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1	Baik	1	B
115	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Baik	1	B
116	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Baik	1	B
117	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Baik	1	B

118	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	Baik	1	B
119	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	Baik	1	B
120	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Baik	1	B
121	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Baik	1	HAPUS
122	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Baik	1	B
123	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Baik	1	B
124	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Baik	1	B
125	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Baik	1	B
126	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Baik	1	B
127	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Baik	1	B
128	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Baik	1	B
129	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	1	Baik	1	B
130	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	Baik	1	B
131	Jalan Khusus Lainnya	1	Baik	1	B
132	Jalan Khusus Lainnya	1	Baik	1	B
133	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	1	Baik	1	B
134	Sumur Resapan	1	Baik	1	B
135	Sumur Resapan	1	Baik	1	B
136	Sumur Resapan	1	Baik	1	B
137	Sumur Resapan	1	Baik	1	B
138	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	Baik	1	B
139	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	Baik	1	B
140	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	1	Baik	1	B

#### **4.4.4 Ketatalaksanaan Dan Sistem Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**

Prosedur dan tata kerja ketatalaksanaan dalam sistem Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini menunjukkan pola yang belum terpadu secara utuh, baik intern bidang dan sekretariat maupun ekstern antar bidang, ini menunjukkan tugas dan fungsi teknis dan administratif masih parsial yang seharusnya saling sinergi dan mendukung dalam kerangka efisiensi dan efektivitas kinerja kelembagaan. Kondisi seperti ini cenderung menjadi masalah umum di

setiap lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan praktek manajemen yang tidak rasional sehingga perlu perubahan bila komit dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, yang mensyaratkan langkah awal pemberdayaan birokrasi dalam mewujudkan *Good Governance* dengan indikator dasar tercapainya **Capacity Building** pada setiap kelembagaan dalam mengemban tugas sesuai dengan fungsinya.

Mengingat Sulawesi Tengah cukup menarik minat investor, namun kurang didukung oleh sarana infrastruktur yang memadai serta promosi potensi daerah untuk melakukan itu semua, maka sangat diperlukan kemampuan aparatur di bidang yang berkualitas.

#### **4.4.5 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **1) Kedudukan**

Kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur Dinas untuk membantu Pemerintah Daerah di bidang Ekonomi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### **2) Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur No. 70 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan

Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
3. Pelaksanaan administrasi perencanaan program, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil.

### **3) Kewenangan**

Adapun kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 dan Pembentukan Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 45 tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.



## 1.5 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021;



### PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH **INSPEKTORAT DAERAH**

JALAN DEWI SARTIKA NO. 47 TELP. (0451) 488152 - 488034

Kode Pos 94114 Palu

---

#### BAHAN EXPOSE HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Hasil evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, Perkomponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memperoleh nilai sebesar 71,76% dari bobot nilai 100% dengan kategori **BB** dengan **Sangat Baik**, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Hal ini menunjukkan bahwa komponen AKIP yang ada telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Negara PAN. Penjelasan lebih lanjut atas 5 (lima) komponen tersebut sebagai berikut :

##### **A. Perencanaan Kinerja**

Komponen perencanaan kinerja berdasarkan hasil evaluasi memberikan kontribusi nilai sebesar **21,44%** dari bobot nilai untuk komponen perencanaan kinerja sebesar **30 %** yang dapat dirinci dalam penilaian 3 sub komponen sebagai berikut:

- 1) **Perencanaan Strategis** dari total capaian penilaian komponen perencanaan kinerja memberikan kontribusi nilai sebesar **6,79 %** dari bobot sub komponen sebesar **10 %** yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut:
  - 1.1) Pemenuhan Renstra memperoleh nilai 1,94% dari bobot nilai 2 % Hal ini disebabkan karena dokumen Renstra OPD telah ada dan telah memuat komponen yang disyaratkan (dipertanyakan), tujuan dan sasaran yang ada direnstra relevan (terkait) dengan IKU, tujuan yang telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan, sasaran belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikatornya (ukuran keberhasilan) dan renstra telah

1

dipublikasikan.

1.2) Kualitas Renstra memperoleh nilai 3,59% dari bobot nilai 5 % Nilai tersebut dipengaruhi karena tujuan dan sasaran <75%; berorientasi hasil, ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome), < 10% memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang SMART.

1.3) Implementasi Renstra memperoleh nilai 1,25 % dari bobot nilai 3 %. Hal ini disebabkan target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan secara periodik yang selaras dan terukur; dimana belum terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik; dan tidak terdapat dokumentasi hasil monitoring/ capaian kinerja jangka menengah.

2) **Perencanaan Kinerja Tahunan** dari total capaian penilaian komponen perencanaan kinerja memberikan kontribusi nilai sebesar 14,65 % dari bobot sub komponen sebesar **20 %** yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut:

2.1) Pemenuhan perencanaan kinerja tahunan memperoleh nilai 4% dari bobot nilai 4% Hal ini dokumen RKT telah ada dan memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja tahunan serta dokumen PK telah ada dan memuat memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target jangka pendek dan telah menyajikan IKU, dan PK telah dipublikasikan.

2.2) Kualitas Perencanaan Kinerja (Renja) Tahunan memperoleh nilai 8,25 % dari bobot nilai 10 % Hal ini disebabkan karena sasaran telah berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, target kinerja ditetapkan dengan baik, dokumen PK selaras dengan dokumen renstra dan dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi), rencana aksi telah ada namun belum mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

2.3) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai 2,40% dari bobot nilai 6 % Hal ini disebabkan karena rencana kinerja tahunan belum

2

sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, rencana aksi belum dimonitor secara berkala, rencana aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan perjanjian kinerja telah sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

## **B. Pengukuran Kinerja**

Komponen pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi memberikan kontribusi nilai sebesar **18,13 %** dari bobot nilai untuk komponen pengukuran kinerja sebesar **25%** yang dapat dirincikan dalam penilaian sub komponen sebagai berikut:

- 1) **Pemenuhan pengukuran** memperoleh nilai 4,69 % dari bobot nilai 5% Hal ini disebabkan karena telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya dan terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja dan Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan.
- 2) **Kualitas pengukuran** memperoleh nilai 10,63% dari bobot nilai 12,50 % Hal ini disebabkan karena IKU telah memenuhi indikator yang baik, telah cukup untuk mengukur kinerja, IKU selaras dengan IKU IP, indikator kinerja eselon III dan IV selaras dengan indikator kinerja atasannya, indikator kinerja individu telah mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya, pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dan dapat diandalkan, namun pengumpulan data kinerja dalam rencana aksi belum sepenuhnya dilakukan secara berkala.
- 3) **Implementasi pengukuran** memperoleh nilai 2,81 % dari bobot nilai 7,50 % Hal ini disebabkan karena IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran serta IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, hasil pengukuran (capaian) kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment, dan IKU belum direviu secara berkala dan pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja.



### C. Pelaporan Kinerja

Komponen pelaporan kinerja berdasarkan hasil evaluasi hanya mendapatkan nilai sebesar **13,88%** dari bobot nilai sebesar untuk komponen pelaporan kinerja sebesar **15,00%** yang dapat dirinci dalam penilaian sub komponen sebagai berikut:

- 1) **Pemenuhan Pelaporan** dari total capaian penilaian komponen pelaporan kinerja memberikan kontribusi nilai sebesar **3 %** dari bobot sub komponen sebesar **3%**. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan pelaporan kinerja telah disusun dan telah disampaikan tepat waktu dan menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU namun laporan kinerja belum diupload kedalam website.
- 2) **Penyajian Informasi Kinerja** dari total capaian penilaian komponen pelaporan kinerja memberikan kontribusi nilai sebesar **7,50 %** dari bobot sub komponen sebesar **7,50 %**. Hal ini menunjukkan bahwa Lakip menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome dan menggambarkan hasil-hasil yang telah dicapai sampai dengan saat ini, Lakip menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan, Lakip menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, Lakip telah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, laporan kinerja menyajikan belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, laporan kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dan informasi dalam Lakip dapat diandalkan.
- 3) **Pemanfaatan Informasi Kinerja** dari total capaian penilaian komponen pelaporan kinerja memberikan kontribusi nilai sebesar **3,38%** dari bobot sub komponen sebesar **4,50%**. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta informasi yang disajikan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

#### D. Evaluasi Internal

Komponen Evaluasi Internal berdasarkan hasil evaluasi hanya mendapatkan nilai sebesar **4,83 %** dari bobot nilai sebesar untuk komponen evaluasi internal sebesar **10%** yang dapat dirinci dalam penilaian sub komponen sebagai berikut:

- 1) **Pemenuhan Evaluasi** dari total capaian penilaian komponen pemenuhan evaluasi memberikan kontribusi nilai sebesar **1,09 %** dari bobot sub komponen sebesar **2,00%**. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan evaluasi belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, dan evaluasi program telah dilakukan, evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi belum sepenuhnya dilakukan dan hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak yang dievaluasi tidak menerima simpulan hasil evaluasi.
- 2) **Kualitas Evaluasi** dari total capaian penilaian komponen kualitas evaluasi memberikan kontribusi nilai sebesar **2,99%** dari bobot sub komponen sebesar **5,00%**. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi program dilaksanakan namun belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program dan tidak dilakukan pemantauan Rencana aksi.
- 3) **Pemanfaatan Evaluasi** dari total capaian penilaian komponen pemanfaatan evaluasi memberikan kontribusi nilai sebesar **0,75%** dari bobot sub komponen sebesar **3%**. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi program telah ditindak lanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program akan tetapi belum dilakukan dalam bentuk langkah-langkah nyata.

#### E. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi

Komponen Pencapaian sasaran/kinerja organisasi berdasarkan hasil evaluasi mendapatkan nilai sebesar **13,49%** dari bobot nilai sebesar untuk komponen evaluasi internal sebesar **20%** yang dapat dirinci dalam penilaian sub komponen sebagai berikut:

- 1) **Kinerja yang dilaporkan (output)** memberikan kontribusi nilai sebesar **4%** dari bobot sub komponen sebesar **7,50%**. Hal ini menunjukkan bahwa target dapat dicapai, capaian kinerja belum sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya,

5

informasi mengenai kinerja dapat diandalkan.

- 2) **Kinerja yang dilaporkan (outcome)** memberikan kontribusi nilai sebesar **9,49%** dari bobot sub komponen sebesar **12,50%**. Hal ini menunjukkan bahwa target dapat dicapai, capaian kinerja belum sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya, informasi mengenai kinerja dapat diandalkan.

### **Rekomendasi**

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan monitoring target Jangka Menengah harus terjadwal dan melalui mekanisme yang jelas (SOP).
- b. Rencana Aksi atas Kinerja harus mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode dan dimonitor pencapaiannya secara berkala.
- c. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment.
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU) direviu secara berkala.
- e. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
- f. Melakukan pemantauan Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja dan ditindaklanjuti.

Demikian rincian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2021 ini kami sampaikan untuk ditanggapi/ dikomentari dan apabila selama 1 (satu) hari setelah hasil evaluasi ini kami serahkan tidak mendapat tanggapan maka hasil evaluasi tersebut dianggap final.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Terimakasih.

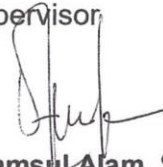
Palu, 30 Juni 2022

Pejabat SKPD yang di Evaluasi



.....

1. Supervisor



**Syamsul Alam, ST., M.P.W.P**  
Nip. 19661231 200212 1 017

2. Ketua Tim



**Suriyanto, S.T., MM**  
Nip. 19740730 199603 1 002

3. Anggota



**Rahmah, SKM., MM**  
Nip. 1981031 200312 2 004

Mengetahui  
Pembantu Penanggungjawab



**Salim, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19721230 200012 1 002





**BERITA ACARA EVALUASI**  
**No : 57/BAE/Irbani/ITDA/2021**

**1. Satuan Kerja :**

- a. Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- b. Nama Provinsi : Sulawesi Tengah
- c. Tahun Anggaran : 2021
- d. Nama Atasan Langsung : Eda Nur Ely, S.E.
- e. Jabatan atasan Langsung : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**2. Dasar Evaluasi Lakip**

Nomor Surat Tugas/ Tgl : 094 / 108 / ITDA / Tanggal 13 Juni 2022

Susunan Tim :

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Drs. M. Muchlis, MM	19710222 199012 1 001	Penanggungjawab
2	Salim, S.Sos., M.Si	19721230 200012 1 002	Pembantu Penanggung Jawab
3	Syamul ALam, ST.,M.P.W.P	19650421 199903 1 003	Supervisor
4	Suriyanto.S.ST.,MM	19750508 200212 2 005	Ketua Tim
5	Rahmah, SKM., MM	19810531 200312 2 004	Anggota
6	Abdul Haris, SH	19650127 200701 1 012	Anggota
7	Bidayani, S.Sos	19650113 199203 2 006	Anggota
8	Ade Wawan, SE., MM	19811028 200502 1 004	Anggota
9	Syuaib, S.Sos	19741117 201001 1 001	Anggota

**3. Hasil Evaluasi :**

- A. Perencanaan Kinerja (30%) : 21,44**
  - I. Perencanaan Starategis (10%) : 6,79
    - a. Pemenuhan Renstra (2%) : 1,94
    - b. Kualitas Renstra (5%) : 3,59
    - c. Implementasi Renstra (3%) : 1,25
  - II. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) : 14,65
    - a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%) : 4
    - b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%) : 8,25
    - c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%) : 2,40
- B. Pengukuran Kinerja (25%) : 18,13**
  - I. Pemenuhan Pengukuran (5%) : 4,69
  - II. Kualitas Pengukuran (12,5%) : 10,63
  - III. Implementasi Pengukuran (7,5%) : 2,81





INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RAHASIA

**BERITA ACARA EVALUASI**  
No : 57/BAE/Irbani/ITDA/2021

<b>C. Pelaporan Kinerja (15%)</b>	<b>: 13,88</b>
I. Pemenuhan Pelaporan (3%)	: 3
II. Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	: 7,50
III. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	: 3,38
<b>D. Evaluasi Internal (10%)</b>	<b>: 4,83</b>
I. Pemenuhan Evaluasi (2%)	: 1,09
II. Kualitas Evaluasi (5%)	: 2,99
III. Pemanfaatan Evaluasi (3%)	: 0,75
<b>E. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi (20%)</b>	<b>: 13,49</b>
I. Kinerja yang dilaporkan/ Output (7,5%)	: 4
II. Kinerja yang dilaporkan/ Outcome (12,5%)	: 12,50
<b>➔ Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>: 71,76 %</b>
<b>➔ Nilai Hasil Evaluasi Sistem AKIP</b>	<b>: 58,26 %</b>

Kesimpulan :

Tingkat Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kinerja mendapat kategori **BB (>70-80) Baik Sangat Baik**, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Palu, 30 Juni 2022

1. Ketua Tim

**Suriyanto, S.T., MM**  
Nip. 19740730 199603 1 002

Pejabat Perangkat Daerah yang di  
Evaluasi

2. Supervisor

**Syamsul Alam, ST., M.P.W.P**  
Nip. 19661231 200212 1 017



Mengetahui :  
Pembantu Penanggungjawab

**Salim S.Sos., M.Si**  
NIP. 19721230 200012 1 002

KERTAS KERJA EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	UNIT KERJA/SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
<b>A. PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>		30,00	71,46%	21,44
<b>I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>		10,00	67,88%	6,79
<b>a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>		2,00	97,22%	1,94
1	Renstra telah disusun	Y	1,00	
2	Renstra telah memuat Tujuan	Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)	B	0,75	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya	A	1,00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat Sasaran	Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja Sasaran	A	1,00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan	A	1,00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU	A	1,00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan	Y	1,00	OK
<b>b. KUALITAS RENSTRA (5%)</b>		5,00	71,88%	3,59
10	Tujuan telah berorientasi hasil	A	1,00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) Tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	C	0,50	OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>	A	1,00	OK
13	Indikator kinerja Sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	B	0,75	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik	A	1,00	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai Tujuan/Sasaran/hasil program/hasil kegiatan	C	0,50	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD/Renstra Instansi	C	0,50	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan	C	0,50	OK
<b>c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>		3,00	41,67%	1,25
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	C	0,50	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	D	0,25	OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	C	0,50	OK
<b>II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>		20,00	73,25%	14,65
<b>a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>		4,00	100,00%	4,00
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun	Y	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun	Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU	A	1,00	OK
4	PK telah dipublikasikan	Y	1,00	OK
<b>b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>		10,00	82,50%	8,25
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>	A	1,00	OK
6	Indikator kinerja Sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	B	0,75	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0,75	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai Sasaran	B	0,75	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai	B	0,75	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan Renstra Instansi/RPJMD	B	0,75	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	B	0,75	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada	Y	1,00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	B	0,75	OK
14	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	Y	1,00	OK
<b>c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b>		6,00	40,00%	2,40



15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		T	-	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		C	0,50	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		C	0,50	OK
18	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		C	0,50	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		C	0,50	OK
<b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>		<b>25,00</b>	<b>72,50%</b>	<b>18,13</b>	
<b>I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>		<b>5,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>4,69</b>	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		B	0,75	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
<b>II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>		<b>12,50</b>	<b>85,00%</b>	<b>10,63</b>	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00	OK
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1,00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1,00	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1,00	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		A	1,00	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A	1,00	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		C	0,50	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		T	-	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00	OK
<b>III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>		<b>7,50</b>	<b>37,50%</b>	<b>2,81</b>	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		E	-	OK
19	IKU telah direviu secara berkala		E	-	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50	OK
<b>C. PELAPORAN KINERJA (15%)</b>		<b>15,00</b>	<b>92,50%</b>	<b>13,88</b>	
<b>I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>		<b>3,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,00</b>	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00	OK
<b>II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>		<b>7,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,50</b>	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian Sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1,00	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,00	OK



8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	A	1,00	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	A	1,00	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	A	1,00	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan	A	1,00	OK
<b>III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b>		<b>4,50</b>	<b>75,00%</b>	<b>3,38</b>
12	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	B	0,75	OK
13	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	B	0,75	OK
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	B	0,75	OK
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	B	0,75	OK
<b>D. EVALUASI INTERNAL (10%)</b>		<b>10,00</b>	<b>48,27%</b>	<b>4,83</b>
<b>I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>		<b>2,00</b>	<b>54,25%</b>	<b>1,09</b>
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatanya	T	-	
2	Evaluasi program telah dilakukan	Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan	B	0,67	OK
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	C	0,50	OK
<b>II. KUALITAS EVALUASI (5%)</b>		<b>5,00</b>	<b>59,83%</b>	<b>2,99</b>
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	B	0,75	OK
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0,75	OK
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0,75	OK
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	C	0,50	OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	C	0,50	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode	C	0,34	OK
<b>III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>		<b>3,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>0,75</b>
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang	C	0,50	OK
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	E	-	OK
<b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>		<b>20,00</b>	<b>67,47%</b>	<b>13,49</b>
<b>I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)</b>		<b>7,50</b>	<b>53,33%</b>	<b>4,00</b>
1	Target dapat dicapai	C	1,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	E	-	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	A	3,00	
<b>II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)</b>		<b>12,50</b>	<b>75,95%</b>	<b>9,49</b>
4	Target dapat dicapai		3,04	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		1,46	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		5,00	
<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>		<b>100,00</b>	<b>71,76%</b>	<b>71,76</b>
NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP			<b>58,26</b>	

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Rencana Strategik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 – 2021 telah disusun berdasarkan RPJMD 2021 – 2026. Sehingga dalam LKj tahun 2022 ini target indikator dilaporkan berdasarkan Renstra 2021 – 2026 sebagai berikut :

##### **i. Tujuan dan Sasaran Strategi**

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan rumusan umum atau pernyataan tentang apa yang ingin dicapai untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana pula keberlanjutan dari tujuan yang ingin dicapai pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) 2030 yaitu diharapkan mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara di dunia ini, mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mendorong pertanian berkelanjutan. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan memperhitungkan skenario pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2021-2026 melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM yang lebih ditekankan pada perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dengan fokus pada pengembangan rantai nilai ekonomi berbasis sumber daya lokal, penyiapan sumber daya manusia yang produktif, peningkatan nilai tambah, daya saing, dan penciptaan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) dan

Kewirausahaan. Sekaligus menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tahapan dan prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sebagai penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Dalam rangka pencapaian **Misi ke-3**, yakni: ***"Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Kelembagaan"*** dan mengacu pada tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu **Menurunkan Pengangguran**. Maka ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**Tujuan 1 :**

Meningkatkan angka partisipasi kerja

**Sasaran Strategis:**

1. Meningkatnya Kualitas Koperasi; dan
2. Meningkatnya Usaha Kecil menjadi Wirausaha.

Dalam rangka pencapaian **Misi II** yakni ***"Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM"***, dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, yakni: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan

Bersih (*Good Governance and Clean Government*). Maka hasil rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

**Tujuan 2 :**

Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng).

**Sasaran Strategis:**

Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas Kop dan UKM Prov. Sulteng).

**Tabel 0.1.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi :	Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju		
Misi Ke - 3 :	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan angka partisipasi kerja	Meningkatnya Kualitas Koperasi	1 Meningkatkan kualitas Kelembagaan Koperasi	Melaksanakan pelayanan Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas
			Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
			Melaksanakan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

		2 Meningkatkan Kualitas pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi	Meningkatkan fasilitasi kemitraan, akses pemasaran, akses pembiayaan/permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, pendampingan kelembagaan dan usaha, produktifitas, nilai tambah, restrukturisasi, inovasi dan digitalisasi koperasi, kapasitas pengurus dan anggota koperasi serta penumbuhan kesadaran masyarakat berkoperasi
	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	3 Meningkatkan pemberdayaan usaha kecil	Melaksanakan pendataan, kemudahan perizinan, kemitraan, penguatan kelembagaan dan usaha, pemahaman, kapasitas, kompetensi SDM UMKM, kewirausahaan serta koordinasi dengan pemangku kepentingan
		4 Meningkatkan pengembangan usaha kecil	Melaksanakan Fasilitasi akses pemasaran, fasilitasi akses pembiayaan / permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, desain dan inovasi produk, digitalisasi dan branding produk, Inkubator usaha, kurasi produk serta pemahaman terkait Literasi hukum dan penyelesaian perkara
<b>Misi Ke - 2 :</b>	<b>Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas KUKM Prov. Sulteng)	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas KUKM Prov. Sulteng)	5 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran serta kualitas pengelolaan administrasi, serta pengelolaan BMD	Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja
			Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Keuangan
			Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi BMD dan Pengadaan Asset
			Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Admnistrasi Kepegawaian
			Meningkatkan kualitas administrasi Umum



			Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana melalui pengadaan dan pemeliharaan
			Meningkatkan Kualitas penyediaan jasa penunjang dan pemeliharaan BMD



**Tabel 2.1.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026**

Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Tujuan/Sasaran 3	Satuan 4	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-					
				2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	2026 10
<b>Misi ke- 3 : Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan</b>									
<b>Tujuan RPJMD</b>	<b>Sasaran RPJMD</b>								
<b>Tujuan 3 :</b> Menurunkan Pengangguran	Meningkatkan angka partisipasi kerja	Rasio penduduk bekerja							
<b>Tujuan Renstra</b>	<b>Sasaran Renstra</b>								
Meningkatkan angka partisipasi kerja		Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap jumlah penduduk yang bekerja	%	1,24	1,35	1,45	1,54	1,64	1,72
	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	5,77	5,77	3,85	3,85	5,77	5,77
	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	%	6,50	5,57	4,06	4,44	5,44	6,41
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas KUKM Prov. Sulteng)	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas Kop dan UKM Prov. Sulteng)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,05

## ii. Maksud dan Tujuan

Esensi dari sistem LKj bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian sektor Aparatur Pemerintah dan pelayanan publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik tersebut.

Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama yaitu :

1. Untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder.
2. Merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mencakup hal-hal berikut ini:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022;
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya perbaikan kinerja di masa datang serta merumuskan strategi pemecahan masalah yang dihadapi sehingga

capaian kinerja Dinas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Aspek Perencanaan Kinerja bagi keperluan internal organisasi. Aspek Akuntabilitas Kinerja dan Aspek Manajemen Kinerja juga dapat dijadikan dasar atau sarana perencanaan internal organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, karena perencanaan dapat dikatakan berkualitas apabila suatu perencanaan dibuat berdasarkan permasalahan yang terjadi sebelumnya baik dari internal maupun eksternal organisasi.

## **2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022;**

### **i. Strategi Jangka Menengah Dinas KUKM**

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dapat terwujud jika didukung strategi dan arah kebijakan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM jangka menengah yang terukur dan diimplementasikan secara berkelanjutan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan Koperasi dan UKM dalam kurun waktu 2021-2026, sehingga dapat ditentukan alternatif solusi jika terjadi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan. Strategi adalah rumusan dalam bentuk pernyataan yang menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh melalui program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran sampai dengan visi dan misi pembangunan dan menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan sector Koperasi dan UKM (*strategy focussed-management*). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan strategi yang dipilih, sehingga lebih terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima

tahun yang datang. Berdasarkan analisis Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Peluang dan Tantangan) serta isu-isu strategis sebagai dasar untuk menentukan pilihan strategi pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Strategi yang akan ditempuh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 berdasarkan Misi adalah sebagai berikut:

**Misi 3: “Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”.**

Strategi yang akan dilaksanakan pada misi ini, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunnya pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja, pengembangan usaha ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan akses terhadap sumber keuangan mikro guna mendukung permodalan bagi pengembangan usaha. Mengoptimalkan pengelolaan sektor unggulan daerah serta penguatan kelembagaan koperasi dan kewirausahaan.

Strategi pembangunan yang telah dijabarkan dalam diatas berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka selanjutnya strategi tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam pembangunan sektor Koperasi dan UKM dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 di tetapkan 5 (Lima) Strategi sebagai berikut:

- 1]** Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- 2]** Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;
- 3]** Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Kecil;
- 4]** Meningkatkan Pengembangan Usaha Kecil;

- 5] Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Serta Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan, kepegawaian, umum dan BMD

## **ii. Kebijakan Jangka Menengah Dinas KUKM**

Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis sektor Koperasi dan UKM serta memedomani Prioritas dan Agenda Pembangunan sektor Koperasi dan UKM secara Nasional. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan jangka menengah sektor Koperasi dan UKM merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan skala prioritas yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun mendatang. Arah kebijakan juga merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Perangkat Daerah agar lebih terarah, terukur dan sistematis dalam menentukan strategi pencapaian tujuan, melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat mulai dari Esselon II, III, dan IV sampai dengan jajaran staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah serta usulan sesuai kebutuhan dan lokalitas dari berbagai komponen masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Arah Kebijakan pembangunan sektor Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Tengah adalah bertolak dari strategi maka arah kebijakan pembangunan Koperasi dan UKM diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

**b}** Strategi Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dilaksanakan dengan arah kebijakan:

1. Melaksanakan Pelayanan Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas;
2. Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan
3. Melaksanakan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;

**c}** Strategi Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi, dilaksanakan dengan arah kebijakan:

**a}** Meningkatkan fasilitasi kemitraan, akses pemasaran, akses pembiayaan/permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, pendampingan kelembagaan dan usaha, produktifitas, nilai tambah, restrukturisasi, inovasi dan digitalisasi koperasi, kapasitas pengurus dan anggota koperasi serta penumbuhan kesadaran masyarakat berkoperasi;

**d}** Strategi Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Kecil, dilaksanakan dengan arah kebijakan:

1. Melaksanakan pendataan, kemudahan perizinan, kemitraan, penguatan kelembagaan dan usaha, pemahaman, kapasitas, kompetensi SDM UMKM, kewirausahaan serta koordinasi dengan pemangku kepentingan;

**e}** Strategi Meningkatkan Pengembangan Usaha Kecil, dilaksanakan dengan arah kebijakan:

1. Melaksanakan Fasilitasi akses pemasaran, fasilitasi akses pembiayaan / permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, desain dan inovasi produk, digitalisasi dan branding produk, Inkubator usaha, kurasi produk serta

pemahaman terkait Literasi hukum dan penyelesaian perkara;

5. Strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Serta Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan, kepegawaian, umum dan BMD:

1. Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Keuangan;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi BMD;
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Admnistrasi Kepegawaian;
5. Meningkatkan kualitas administrasi Umum;
6. Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana melalui pengadaan dan pemeliharaan Asset; dan
7. Meningkatkan Kualitas penyediaan jasa penunjang dan pemeliharaan BMD.

Dengan memperhatikan keterkaitan antara pencapaian tujuan, sasaran dengan strategi maka dirumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 0.2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi :	Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju		
Misi Ke - 3 :	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan angka partisipasi kerja	Meningkatnya Kualitas Koperasi	1 Meningkatkan kualitas Kelembagaan Koperasi	Melaksanakan pelayanan Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas  Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi



			Melaksanakan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		2 Meningkatkan Kualitas pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi	Meningkatkan fasilitasi kemitraan, akses pemasaran, akses pembiayaan/permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, pendampingan kelembagaan dan usaha, produktifitas, nilai tambah, restrukturisasi, inovasi dan digitalisasi koperasi, kapasitas pengurus dan anggota koperasi serta penumbuhan kesadaran masyarakat berkoperasi
	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	3 Meningkatkan pemberdayaan usaha kecil	Melaksanakan pendataan, kemudahan perizinan, kemitraan, penguatan kelembagaan dan usaha, pemahaman, kapasitas, kompetensi SDM UMKM, kewirausahaan serta koordinasi dengan pemangku kepentingan
		4 Meningkatkan pengembangan usaha kecil	Melaksanakan Fasilitasi akses pemasaran, fasilitasi akses pembiayaan / permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, desain dan inovasi produk, digitalisasi dan branding produk, Inkubator usaha, kurasi produk serta pemahaman terkait Literasi hukum dan penyelesaian perkara
<b>Misi Ke - 2 :</b>	<b>Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas KUKM Prov. Sulteng)	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas KUKM Prov. Sulteng)	5 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran serta kualitas pengelolaan administrasi, serta pengelolaan BMD	Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja
			Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Keuangan
			Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi BMD dan Pengadaan Asset
			Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Admnistrasi Kepegawaian
			Meningkatkan kualitas administrasi Umum

			Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana melalui pengadaan dan pemeliharaan
			Meningkatkan Kualitas penyediaan jasa penunjang dan pemeliharaan BMD



## 2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022;

**Tabel 2.3.1**  
**Tabel Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022**

### Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

KODE						PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR / KINERJA	Target Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)
1						2	3	4	5
2									
2	17					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>			<b>13.900.808.717</b>
2	17	1				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>11.595.971.967</b>
2	17	1	1			<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan</b>	<b>7 dok</b>	<b>860.920.700</b>
2	17	1	1	1	1	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Acuan Perencanaan yang dihasilkan</b>	<b>1 dok</b>	<b>441.480.925</b>
2	17	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Acuan Perencanaan yang dihasilkan	1 dok	63.199.675
2	17	1	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 dok	0
2	17	1	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 dok	62.749.775
2	17	1	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 dok	0
2	17	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Acuan Perencanaan yang dihasilkan	1 dok	167.937.900
2	17	1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Acuan Perencanaan yang dihasilkan	1 dok	125.552.425

<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Administrasi Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>9.211.157.290</b>
2	17	1	2	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Administrasi Tepat Waktu	100%	7.486.874.290
2	17	1	2	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelayanan Administrasi perkantoran tepat waktu	100%	1.670.808.000
2	17	1	2	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelayanan Administrasi perkantoran tepat waktu	100%	7.700.000
2	17	1	2	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaporan capaian kinerja tepat waktu	100%	40.000.000
2	17	1	2	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan capaian kinerja tepat waktu	100%	5.775.000
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Pelayanan Administrasi perkantoran tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>62.847.500</b>
2	17	1	3	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pelayanan Administrasi perkantoran tepat waktu	100%	1.787.500
2	17	1	3	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pelayanan Administrasi perkantoran tepat waktu	100%	595.000
2	17	1	3	1	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pelayanan Administrasi perkantoran tepat waktu	100%	14.720.000
2	17	1	3	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelayanan Administrasi perkantoran tepat waktu	100%	28.420.000
2	17	1	3	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelayanan Administrasi perkantoran tepat waktu	100%	17.325.000
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>56.614.400</b>
2	17	1	5	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaiandinas.	100%	43.998.850
2	17	1	5	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaiandinas.	100%	0

2	17	1	5	1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaiandinas.	100%	12.615.550
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>6</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya layanan administrasi tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>409.641.377</b>
2	17	1	6	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	100%	17.770.878
2	17	1	6	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	100%	218.695.300
2	17	1	6	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	100%	41.505.199
2	17	1	6	1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	100%	24.470.000
2	17	1	6	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	100%	107.200.000
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>8</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya layanan administrasi tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>682.753.700</b>
2	17	1	8	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	100%	646.719.200
2	17	1	8	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	100%	24.234.500
2	17	1	8	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat pemeliharaan sarana dan prasaranaoperasional	100%	11.800.000
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>9</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya layanan administrasi tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>312.037.000</b>
2	17	1	9	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat pemeliharaan sarana dan prasaranaoperasional SKPD	100%	222.100.000
2	17	1	9	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat pemeliharaan sarana dan prasaranaoperasional SKPD	100%	85.490.000
2	17	1	9	1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat pemeliharaan sarana dan prasaranaoperasional SKPD	100%	4.447.000

2	17	2				<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Koperasi Berkualitas</b>	<b>100%</b>	<b>88.674.200</b>
2	17	2	1	1		<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Tersedianya Koperasi Aktif	100%	<b>23.674.500</b>
2	17	2	1	1	1	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koperasi Aktif	10%	23.674.500
2	17	2	1	2		<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Tersedianya Koperasi Aktif	100%	<b>64.999.700</b>
2	17	2	1	1	1	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang /Cabang Pembantu dan kantor kas yang diterbitkan	3 koperasi	49.999.925
2	17	2	1	1	2	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen	2 Dok	14.999.775
2	17	3				<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Koperasi Berkualitas</b>		<b>225.837.475</b>
2	17	3	1	1		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Koperasi Lintas Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>138.987.500</b>
2	17	3	1	1	1	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan kopersisimpan pinjam/ unit simpan pinjam baik konvensional maupun syariah yang dilakukan oleh petugas pengawas koperasi	20 koperasi	88.987.750
2	17	3	1	1	2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Persentase tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan	30%	49.999.750

2	17	3	1	2		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Koperasi Lintas Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>86.849.975</b>
2	17	3	1	2	1	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan kopersisimpan pinjam/ unit simpan pinjam baikkonvensional maupun syariah yang dilakukan olehpetugas pengawas koperasi	10%	86.849.975
2	17	4				<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Koperasi Berkualitas</b>	<b>100%</b>	<b>229.034.475</b>
2	17	4	1			<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota daam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Tersedianya Koperasi yang dinilai Kesehatannya</b>	<b>100%</b>	<b>229.034.475</b>
2	17	4	1	1	1	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	20 koperasi	123.925.750
2	17	4	1	1	2	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	20 koperasi	105.108.725
2	17	5				<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Koperasi Berkualitas</b>	<b>100%</b>	<b>156.839.800</b>
2	17	5	1			<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Tersedianya Lapangan Kerja</b>	<b>40%</b>	<b>156.839.800</b>
2	17	5	1	1	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Tenaga Kerja Terserap	40%	156.839.800
2	17	6				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Koperasi Berkualitas</b>	<b>100%</b>	<b>490.154.875</b>

2	17	6	1			<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya Volume Usaha Koperasi</b>	<b>35%</b>	<b>490.154.875</b>
2	17	6	1	1	1	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Volume Usaha Koperasi	35%	92.419.100
2	17	6	1	1	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kerjasama Usaha Koperasi	40%	397.735.775
2	17	7				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Usaha Kecil Naik Kelas</b>	<b>100%</b>	<b>307.485.825</b>
2	17	7	1			<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Tersedianya Pendampingan terhadap Usaha Kecil</b>	<b>250 usaha kecil</b>	<b>307.485.825</b>
2	17	7	1	1	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UK yang mendapat pendampingan	250 usaha kecil	307.485.825
2	17	8				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Usaha Kecil Naik Kelas</b>	<b>100%</b>	<b>806.810.100</b>
2	17	8	1			<b>Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil yang Naik Kelas</b>	<b>3 Unit</b>	<b>806.810.100</b>
2	17	8	1	1	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Kecil yang Naik Kelas	3 unit	806.810.100



**UPT. Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah**

KODE							PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR / KINERJA	Target Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)
2										
2	17						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>			<b>2.701.905.350</b>
2	17	1					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>285.341.250</b>
2	17	1	6				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya layanan administrasi tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>188.090.050</b>
2	17	1	6	1	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	100%	0
2	17	1	6	1	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	100%	15.625.525
2	17	1	6	1	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	100%	8.567.500
2	17	1	6	1	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	100%	267.025
2	17	1	6	1	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	100%	163.630.000
2	17	1	8				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya layanan administrasi tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>58.691.200</b>
2	17	1	8	1	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	100%	58.691.200
2	17	1	9				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya layanan administrasi tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>38.560.000</b>

2	17	1	9	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat pemeliharaan sarana dan prasaranaoperasional SKPD	100%	11.500.000
2	17	1	9	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat pemeliharaan sarana dan prasaranaoperasional SKPD	100%	24.060.000
2	17	1	9	1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat pemeliharaan sarana dan prasaranaoperasional SKPD	100%	3.000.000
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>5</b>				<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Koperasi Berkualitas</b>	<b>100%</b>	<b>1.119.545.575</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>1</b>			<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Tersedianya Lapangan Kerja</b>	<b>40%</b>	<b>1.119.545.575</b>
2	17	5	1	1	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah orang yang dilatih	40%	1.119.545.575
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>8</b>				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Usaha Kecil Naik Kelas</b>	<b>100%</b>	<b>1.297.018.525</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>1</b>			<b>Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil yang Naik Kelas</b>	<b>3 Unit</b>	<b>1.297.018.525</b>
2	17	8	1	1	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah orang yang dilatih	3 unit	1.297.018.525

## 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERJANJIAN KINERJA;

Hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun 2022 oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

### 1. Perkembangan Sektor Koperasi

Kinerja sektor Koperasi tahun 2022 dapat dilihat pada 2 (dua) indikator sebagai berikut :

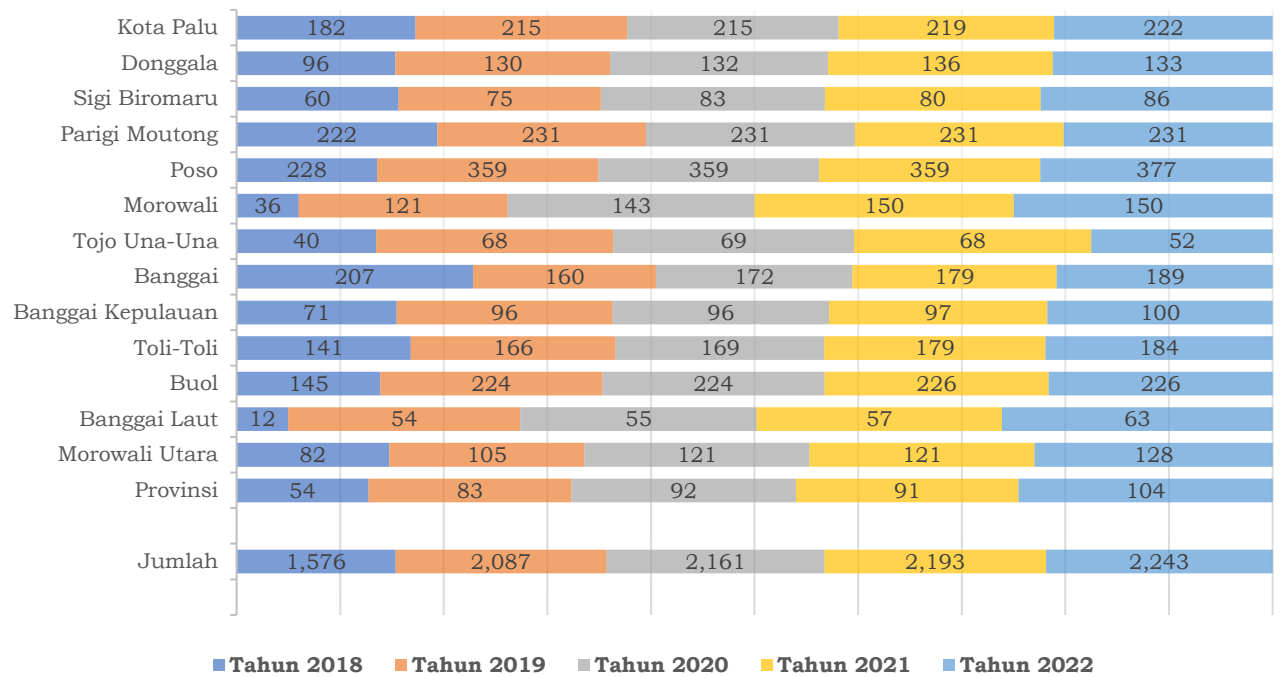
#### 2.2. Indikator Kelembagaan Koperasi

Indikator kelembagaan koperasi terdiri atas Persentase Koperasi yang berkualitas, Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas, Persentase Koperasi Aktif, Persentase Koperasi Sehat, dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4.1**  
**Koperasi Per Kabupaten Kota Tahun 2018 s/d Tahun 2022**

No	Kab/Kota	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Palu	217	215	215	219	222
2	Donggala	131	130	132	136	133
3	Sigi Biromaru	73	75	83	80	86
4	Parigi moutong	231	231	231	231	231
5	Poso	352	359	359	359	377
6	Morowali	117	121	143	150	150
7	Touna	66	68	68	68	52
8	Banggai	243	160	172	179	189
9	Bangkep	95	96	96	97	100
10	Tolitoli	163	166	169	179	184
11	Buol	224	224	224	226	226
12	Banggai Laut	43	54	55	57	63
13	Morowali Utara	123	105	121	121	128
14	Provinsi	72	83	87	91	104
	<b>Jumlah</b>	<b>2.150</b>	<b>2.087</b>	<b>2.155</b>	<b>2.193</b>	<b>2.243</b>

**Gambar 2.4.1.**  
**Koperasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2018 S/D Tahun 2022**



Berdasarkan tabel di atas (Tabel 6.1) Menunjukkan Bahwa Jumlah Koperasi Tahun 2022 Mengalami Peningkatan Sebesar 50 Unit Koperasi Atau 2,28 % Dibandingkan Jumlah Loperasi Pada Tahun 2021 Hal Ini Disebabkan Adanya :

1. Pertumbuhan Koperasi Baru Di Provinsi, Kabupaten/Kota, terkait kelompok masyarakat yang punya usaha dan keinginan membentuk usaha yang mempunyai badan hukum.
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi dari Dinas Terkait yang dilaksanakan cukup menggambarkan keberhasilan walaupun belum seperti yang di harapkan.
3. Partipasi dan keinginan dari kelompok masyarakat yang cukup baik, dalam keinginan membentuk Koperasi yang baru.
4. **Faktor** lainnya adalah Sumber Daya Manusia, Modal, Sistem, dan Peralatan dalam rangka mencapai tujuannya sangat ditentukan pula oleh kinerjanya.dari pengurus dan pengawas intern dari koperasi tersebut juga akan menunjang **Keberhasilan** suatu **koperasi**.

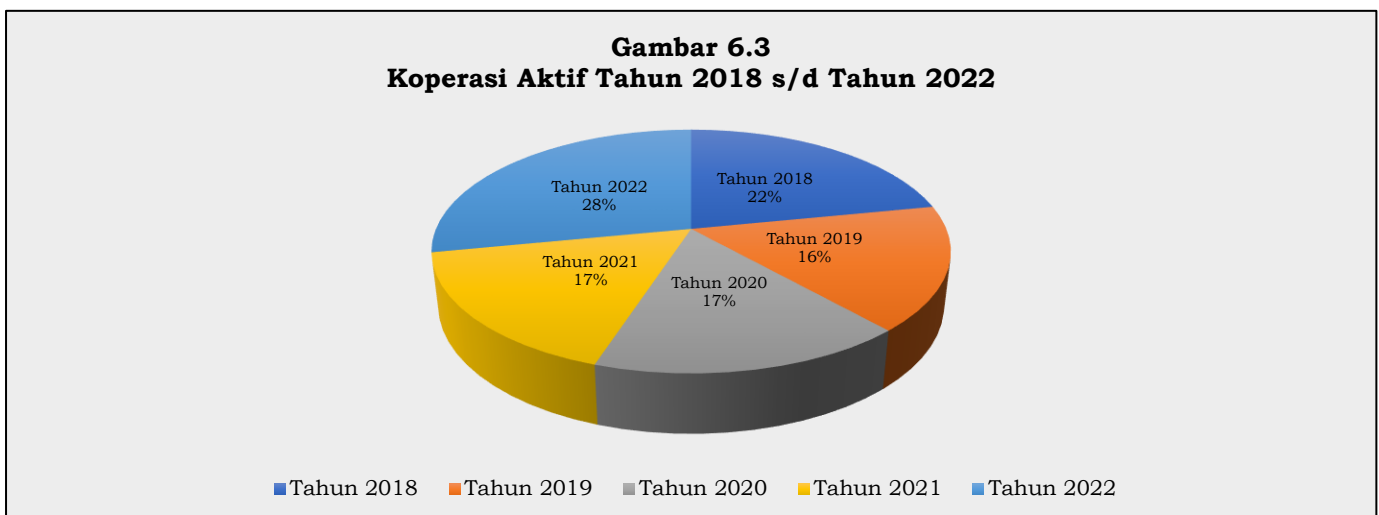
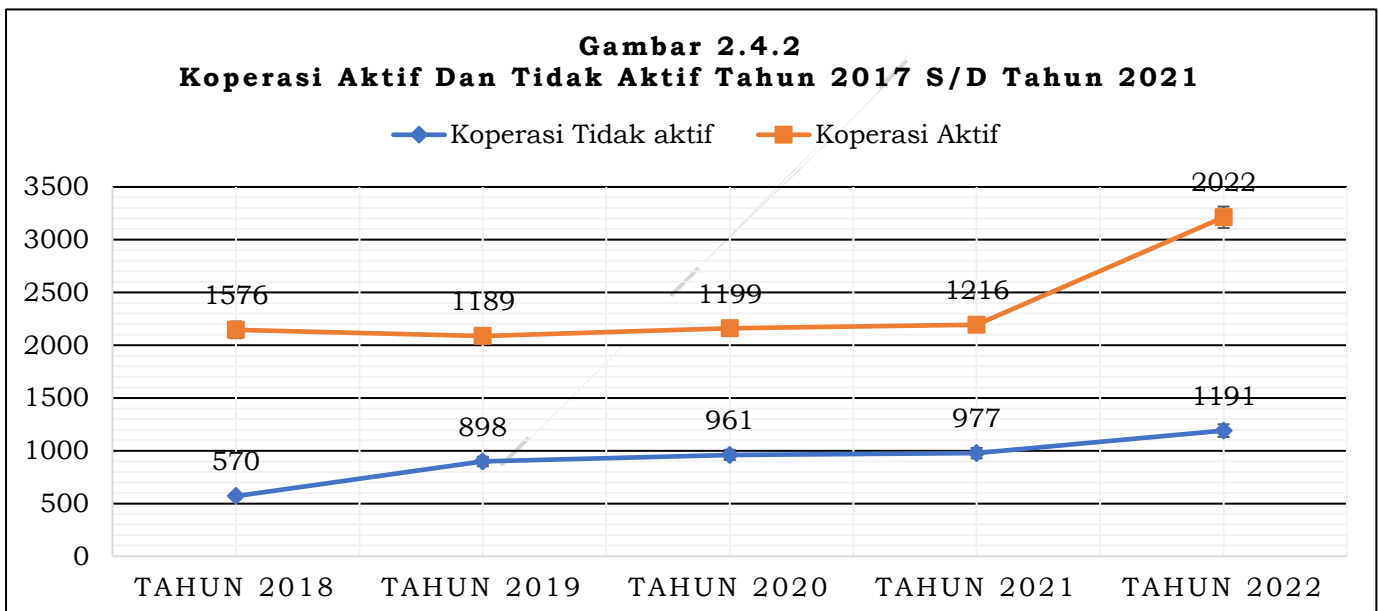
## 1. Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif

**Tabel 2.4.2**

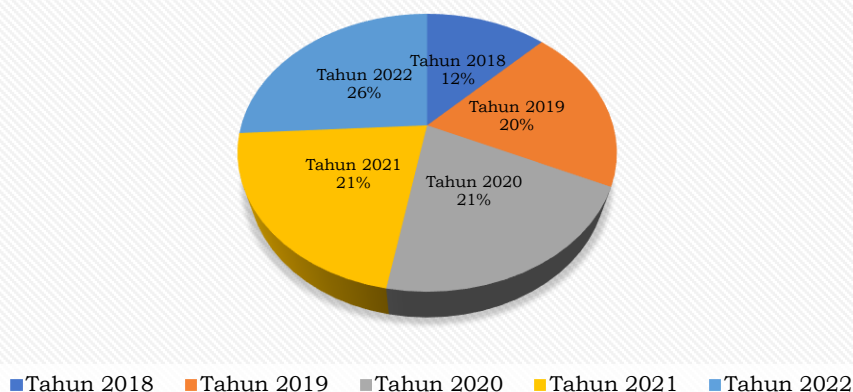
**Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Tahun 2018 s/d 2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Koperasi Aktif	1.575	1.189	1.195	1.216	1.191
2	Koperasi Tidak aktif	575	898	960	977	1.052
	<b>Jumlah</b>	<b>2.150</b>	<b>2.087</b>	<b>2.155</b>	<b>2.193</b>	<b>2.243</b>

Jumlah Koperasi Aktif Mengalami Penurunan Sebesar 25 Unit Koperasi Atau 0,98 % Dari Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2021, Sedangkan Jumlah Koperasi Tidak Aktif Tahun 2022 Mengalami Peningkatan Sejumlah 75 Unit Koperasi Atau Sebesar 0,92 %.



**Gambar 6.4**  
**Koperasi Tidak Aktif Tahun 2018 s/d Tahun 2022**



b. **Jumlah Anggota Koperasi Kab/Kota**

**Tabel 2.4.3**  
**Anggota Koperasi Tahun 2018 s/d Tahun 2022**

No	Kab/Kota	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Palu	26.200	24.307	24.712	24.320	13.350
2	Donggala	21.486	18.918	18.918	18.785	18.731
3	Parigi Moutong	20.007	20.022	9.458	8.466	20.020
4	Poso	12.048	14.776	20.022	20.022	19.551
5	Morowali	3.223	3.509	12.733	15.638	3.865
6	Touna	1.761	3.247	3.940	3.865	10.731
7	Tolitoli	12.020	31.155	2.225	12.588	31.436
8	Buol	19.010	8.686	17.127	28.421	8.957
9	Banggai	40.221	21.612	8.464	7.838	30.501
10	Bangkep	8.459	8.464	23.630	30.981	7.834
11	Sigi Biromaru	6.769	5.436	19.010	19.328	9.086
12	Banggai Laut	3.784	3.881	4.578	4.144	3.941
13	Morowali Utara	5.394	14.371	15.892	16.286	15.993
14	Provinsi	51.212	49.174	71.404	65.540	65.962
	<b>Jumlah</b>	<b>231.594</b>	<b>227.558</b>	<b>252.153</b>	<b>276.222</b>	<b>259.964</b>

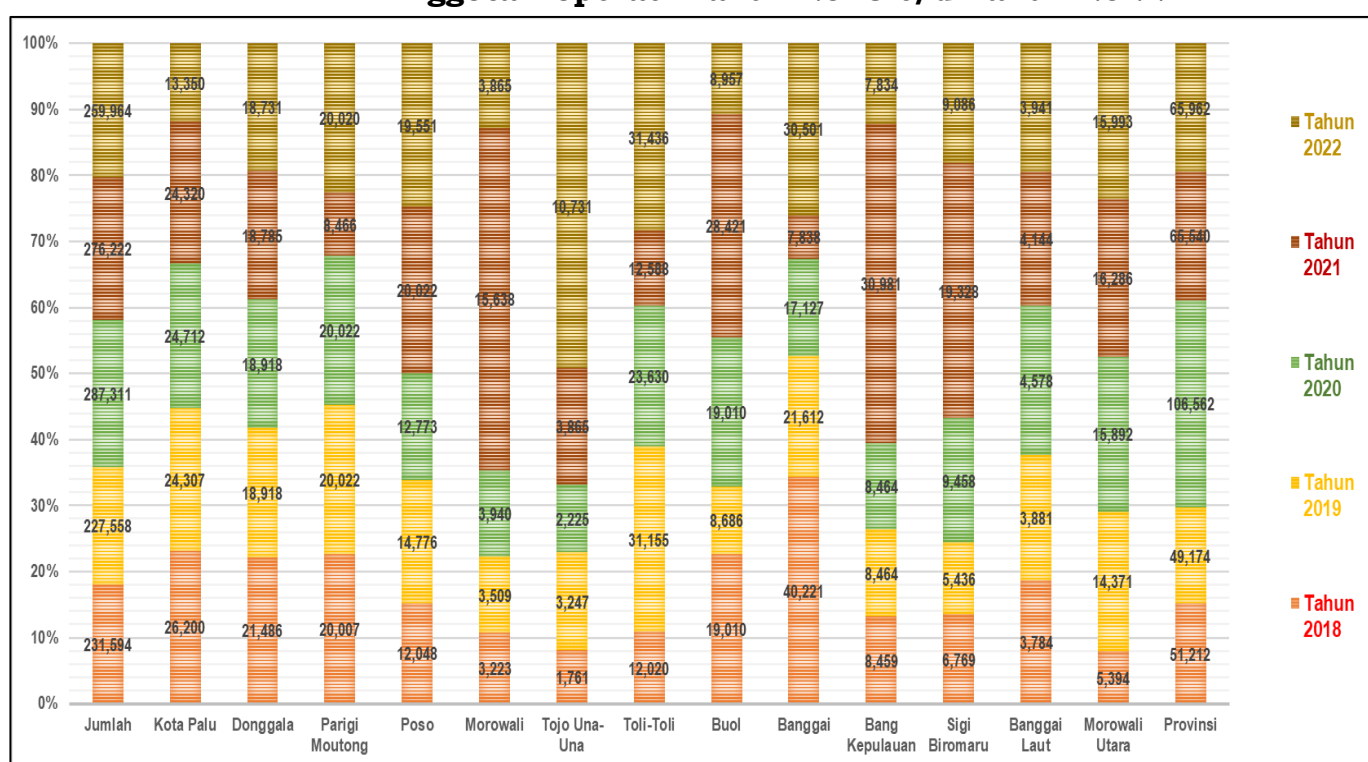
Tabel di atas menunjukkan Menunjukkan Penurunan Jumlah Anggota Koperasi Pada Tahun 2021 Sebanyak 276.222 Orang Menjadi 259.964 Orang Pada Tahun 2022 Atau Menglmi Penurunan Jumlah Anggota Sebesar 16.258 Orang .

Berdasarkan Dari Tabel 6.3 Ada 9 Kabupaten Yang Mengalami Penurunan Jumlah Anggota Yang Cukup Signifikan, Yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten

Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Sigi Biromaru, Kabupaten Banggai Laut Dan Kabupaten Morowali Utara. Sisanya Ada 4 Kabupaten Yang Mengalami Peningkatan Jumlah Anggota Masing Masing dalah Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Tojo Una-una Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Banggai

Sedangkan Untuk Provinsi Sulawesi Tengah Sendiri Berdasarkan Kewenangannya Megalami Peningkatan Sebesar 422 orang.

**Gambar 2.4.5**  
**Anggota Koperasi Tahun 2018 s/d Tahun 2022**



### 3. Jumlah Capaian Indikator Sasaran Renstra dan Indikator Utama

**Tabel 2.4.4**  
**Jumlah Capaian Indikator Sasaran Renstra Dan Indikator Utama Tahun 2022 (Dalam%)**

No	Sasaran	Indikator Program	2022
----	---------	-------------------	------

			<b>Target</b>	<b>Capaian</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	5,77%	7,25%
2.	Meningkatnya Layanan Perizinan Koperasi Simpan Pinjam	Persentase Penerbitan Izin usaha KSP (Kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas)	13%	15.79%
3.	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	5,75%	8,65%
4.	Meningkatnya Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi KSP/USP	Persentase Koperasi Sehat	52,63%	33,33%

Sumber: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Berdasarkan Tabel diatas Indikator Utama Bidang Koperasi yaitu:

## 1. Indikator Keberhasilan

### 1. *Meningkatnya Kualitas Koperasi*

Meningkatnya Kualitas Koperasi Dari Target 4 Koperasi (5,77 %) Menjadi 5 Koperasi (7,25 %). Dilihat Dari Indikator Kinerja Presentase Koperasi Aktif Tahun 2021 Rasio Capaian Kinerja Melebihi Trget Yang Telah Ditetapkan.

Adapun Kriteria Capaian Indikator Kinerja Koperasi Aktif. Indikator Koperasi Yang Berkualitas Dimana Rasio Capaian Kinerja Tahun 2021 S/D 2022 Melebihi Target. Hal Ini Dikarenakan Kebijakan Reformasi Koperasi Dimana Koperasi Koperasi Tidak Aktif Yang Terdata Dari 13 Kabu/ Kota Dihapuskan , Sehingga Jumlah Koperasi Berkurang, Sehingga Dalam Melakukan Pembinaan Dapat Dilakukan Secara Berkelanjutan Dn Koperasi Koperasi Aktif Dan Baru Tumbuh Bertambah.

Tercapainya Indikator Tersebut Perlu Mendapat Perhatian Dan Pembinaan Yang Lebih Optimal.

### 2. *Meningkatnya Layanan Perizinan Simpan Pinjam*

Peningkatan layanan perizinan simpan pinjam mengami peningkatan dari 13 menjadi 15,79% hal ini disebabkan dengan adanya pembiaanaan yang berkelanjutan kepada gerakan koperasi simpan pinjam. Dengan adanya kesadaran gerakan koperasi dalam mengurus perizinan baik izin usaha



simpan pinjam maupun izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.

### ***3. Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi***

Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa jumlah koperasi aktif tahun 2021 sebesar 60 unit koperasi atau sebesar 5,77% dibandingkan tahun 2022 sebesar 69 unit koperasi berarti ada peningkatan sebesar 9 unit koperasi atau 8,65%, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan tetapi ini berarti bahwa kehadiran koperasi dalam masyarakat sudah menunjukkan persepsi yang positif dimasyarakat.

Untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif perlu adanya pembinaan yang berkelanjutan dari aparat Pembina disamping itu diharapkan juga kepada gerakan koperasi agar dalam menjalankan kegiatan usahanya tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu perlu adanya pengawasan dan pemeriksaan dari aparat Pembina yang dilakukan oleh pejabat Fungsional Pengawas Koperasi (JFPK) yang tujuannya dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan meliputi koperasi yang bergerak disimpan pinjam maupun koperasi yang bergerak disektor rill agar koperasi tersebut tetap berpedoman atau mengacuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### ***4. Meningkatnya Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi KSP/USP***

#### **II. Indikator Penghambat :**

- I. Masih rendahnya pemahaman kepada masyarakat tentang perkoperasian
- II. Masih rendahnya tingkat kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku oleh gerakan koperasi.
- III. Masih rendahnya jumlah koperasi yang bergerak disektor rill.

- IV. Kurangnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasinya.
- V. Kurangnya partisipasi pengurus dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- VI. Masih rendahnya koperasi yang tumbuh.

### III. **Penjelasan Teknis**

Rencana atau tindak lanjut dalam rangka untuk meningkatkan kualitas koperasi aktif adalah :

1. Memperbanyak sosialisasi tentang perkoperasian ( koperasi tumbuh).
2. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan dari aspek organisasi kelembagaan , permodalan dan kegiatan usaha koperasi.
3. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara kontinyu dan berkelanjutan.

## 4. **Seksi Kelembagaan dan Perizinan**

Seksi Kelembagaan dan Perizinan					
<b>Tabel 2.4.5</b>					
<b>Jumlah Capaian Indikator Pendukung Tahun 2022 (Dalam %)</b>					
No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan		Indikator Program	Target	Capaian
1	<b>Terlaksananya Fasilitasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi</b>		<b>Jumlah izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>	<b>5 Lap</b>	<b>6 Lap</b>
	1.1	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	5 Lap	6 Lap

2	<b>Terlaksananya Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam Koperasi</b>		<b>Jumlah fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>	<b>5 Lap</b>	<b>12 Lap</b>
	2.1	Terlaksananya Pendampingan, Pembinaan dan Pemberdayaan Legalitas Koperasi	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3 Lap	12 Lap
	2.2	Tersedianya Data OSS	Jumlah Perizinan usaha Koperasi yang Terintegrasi Secara Elektronik	8 Lap	12 Lap

## 1. Terlaksananya Fasilitasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

### a) *Indikator Keberhasilan*

Bahwa berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa jumlah perizinan simpan pinjam yang difasilitasi dari target 5 laporan menjadi 6 laporan. Dan hal ini kelegalitasan Perizinan yang ada saat ini adalah Aplikasi Penerapan OSS yang Berbasis Resiko sehingga gerakan Koperasi yang sudah mengurus perizinan harus membuat sesuai aplikasi yang terbaru, adapun koperasi yang terkait terbitnya Izin Usaha Simpan Pinjam yang sudah berbasis resiko yang mencapai realisasi sebanyak 6 yaitu :

1. KSP Bina Sejahtera Prima (Kab. Parimo)
2. KSP Dipo Melo Finance (Kota Palu)
3. Koperasi konsumen BMT Karya Bina Sejahtera (Sigi Biromaru)
4. KSP Setiyo Budi (Kota Palu)
5. Koperasi Konsumen Serba usaha Syariah BMT Al Muhajirin (Toili, kab. Banggai)
6. Koperasi konsumen karya Perdana Gemilang (Kab. Parimo)

**Dan keberhasilan ini disebabkan yaitu:**

1. Koordinasi dinas Koperasi dan Dinas terkait perizinan dalam memberikan pemahaman kepada Gerakan Koperasi semakin berkembang dalam penerapan aplikasi yang terkait legalitas Perizinan.
2. Pembinaan Dari Dinas yang terkait Legalitas Perizinan dengan memberikan sosialisasi dan bimtek aplikasi Perizinan (OSS)
3. adanya kesadaran pada gerakan kop[erasi untuk mengurus perizinan Usaha Simpan Pinjam dan izin Lainnya yang terkait dengan simpan pinjam, hal ini berkat adanya pendampingan dari Dinas terkait untuk melakukan fasilitasi ke kantor perizinan.
4. Gerakan koperasi yang sudah mengikuti Bimtek OSS dan memahami akan legalitas perizinan.
5. Memfasilitasi pelaku Gerakan Koperasi untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time
6. Memfasilitasi pelaku usaha Koperasi dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.

***b) Indikator Penghambat***

Hal ini berdasarkan hasil pendampingan Dinas kepada Gerakan Koperasi yang masih menggunakan Perizinan yang lama, (Perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas terkait Kab/Kota) sehingga kami dari pembina menyampaikan untuk segera menyiapkan dokumen dokumen terkait persyaratan perizinan untuk di input melalui aplikasi OSS (online Single Submission):

- 1] Masih perlunya sosialisasi dn bimtek aplikasi OSS dan masih kurang penerapan sosialisasi dan Bimtek OSS
- 2] Masih banyak gerakan koperasi yang belum memahami penerapan aplikasi OSS.
- 3] masih banyak koperasi yang belum menyiapkan data data yang sesuai dengan persyaratan aplikasi OSS, dan perlu menyiapkan data yang dimaksud.

4) Masih banyak gerakan koperasi yang tidak melakukan koordinasi akan legalitas perizinan.

**c) *Penjelasan Teknis***

Adapun tercapainya target hal ini antara lain :

1. Manfaat dari pertemuan dan sosialisasi yang dilaksanakan dinas Koperasi sehingga gerakan koperasi yang menjadi peserta dapat menyiapkan dokumen dokumen yang dibutuhkan untuk legalitas perizinan
2. Gerakan Koperasi yang telah berinisiatif untuk mencari informasi mengenai kelegalitasan Koperasi.
3. Dinas Mitra Koperasi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memberikan Sosialisasi mengenai legalitas Perizinan yang mudah di pahami sehingga penerapan pada aplikasi tidak mendapatkan masalah yang berarti bagi gerakan koperasi
4. SDM dari gerakan Koperasi yang sudah mengalami kemajuan sehingga materi materi tentang Perizinan mudah di pahami.

**2. Terlaksananya Penerbitan Izin Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu dan kantor kas Koperasi**

**1/ *Indikator keberhasilan***

Bahwa berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa jumlah perizinan pembukaan kantor cabang yang difasilitasi dari target 5 laporan dan realisasi 12 laporan. Dan hal ini dengan adanya anggota ataupun calon anggota koperasi yang ada di kabupaten /Kota sehingga koperasi yang mempunyai modal dan persyaratan untuk membuka kantor maka terbentuklah kantor cabang atau cabang pembantu maupun kantor cabang. Yang pada saat itu masih rekomendasi dari Dinas Provinsi dan Dinas kabupaten

/kota yang menindak lanjuti usulan pembukaan kantor cabang yang di maksud,. Dan menjadi surat resmi untuk legalitas perizinannya. Seiring dengan berkembangnya koperasi dalam hal ini terkait perizinan yang legalitas Perizinan yang ada saat ini adalah Aplikasi Penerapan OSS yang Berbasis Resiko sehingga gerakan Koperasi yang sudah mengurus perizinan harus membuat sesuai aplikasi yang terbaru, adapun koperasi yang terkait terbitnya Izin Pembukaan kantor cabang yang sudah berbasis resiko yang mencapai realisasi sebanyak 12 Kantor cabang yaitu :

1. KSP Bina Sejahtera Prima Cabang Sumber sari (Kab. Parimo)
2. KSP Bina Sejahtera Prima Cabang Morowali (desa La' antula Jaya Wita Punda).
3. KSP Bina Sejahtera Prima Cabang Masama (desa Duata Karya Kab. Banggai ).
4. KSP Bina Sejahtera Prima Cabang Toili (desa MulyaSari Kab. Banggai).
5. KSP Bina Sejahtera Prima Cabang Nuhon (desa Jaya Makmur Kab. Banggai).
6. KSP Bina Sejahtera Prima Cabang Kota Raya (desa Kota Raya Jln. Ki hajar Dewantara Kab. Parimo).
7. KSP Bina Sejahtera Prima Cabang Rio Pakava (desa Minti makmur jl Mukti tama).
8. KSP Bina Sejahtera Prima Cabang Tentena (desa Toinasa Kec. Pamona Barat Kab. Poso).
9. KSP Bina Sejahtera Prima Cabang Lambunu (desa Anutapura Kec. Bolano Lambunu Kab Parimo).
10. KSP Bina Sejahtera Prima Cabang Palu (desa Jl. Tangkasi Kota Palu).
11. KSP Bina Sejahtera Prima Cabang Sausu (desa Sausu Taliabo Kab. Parimo).
12. KSP Dipo Melo Finance cabang Bahodopi (desa Bahodopi Kab. Morowali).

Dan keberhasilan ini disebabkan yaitu:

- Koordinasi dinas Koperasi dan Dinas terkait perizinan dalam memberikan pemahaman kepada Gerakan Koperasi semakin berkembang dalam penerapan aplikasi yang terkait legalitas Perizinan.
- Pembinaan Dari Dinas yang terkait Legalitas Perizinan dengan memberikan sosialisasi dan bimtek aplikasi Perizinan (OSS)
- adanya kesadaran pada gerakan koperasi untuk mengurus perizinan Pembukaan kantor cabang, cabang Pembantu dan kantor kas dan izin Lainnya yang terkait dengan simpan pinjam, hal ini berkat adanya pendampingan dari Dinas terkait untuk melakukan fasilitasi ke kantor perizinan.
- Gerakan koperasi yang sudah mengikuti Bimtek OSS dan memahami pentingnya akan legalitas perizinan.
- Memfasilitasi pelaku Gerakan Koperasi untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan tepat waktu.
- Memfasilitasi pelaku usaha Koperasi dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat

### **1. Indikator Penghambat**

Hal ini berdasarkan hasil pendampingan Dinas kepada Gerakan Koperasi yang masih banyak menggunakan Perizinan yang lama, (Perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas terkait Kab/Kota) sehingga kami dari pembina menyampaikan untuk segera menyiapkan dokumen dokumen terkait persyaratan perizinan untuk di input melalui aplikasi OSS (online Single Submission).

- a) Masih perlunya sosialisasi dan bimtek aplikasi OSS dan masih rendahnya penerapan sosialisasi dan Bimtek OSS



- b) Masih banyak gerakan koperasi yang belum memahami penerapan/pengimputan aplikasi OSS.
- c) Masih banyak koperasi yang belum menyiapkan data data yang sesuai dengan persyaratan aplikasi OSS, dan perlu menyiapkan data yang dimaksud.
- d) Masih banyak gerakan koperasi yang tidak melakukan koordinasi akan pentingnya legalitas perizinan.

**c) Penjelasan Teknis**

Adapun tercapainya target hal ini antara lain:

- (A) Manfaat dari pertemuan dan sosialisasi yang dilaksanakan dinas Koperasi sehingga gerakan koperasi yang menjadi peserta dapat menyiapkan dokumen dokumen yang dibutuhkan untuk legalitas perizinan.
- (B) Gerakan Koperasi yang telah berinisiatif untuk mencari informasi mengenai pentingnya kelegalitasan Koperasi.
- (C) Dinas Mitra Koperasi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memberikan Sosialisasi mengenai legalitas Perizinan yang mudah di pahami sehingga penerapan pada aplikasi tidak mendapatkan masalah yang berarti bagi gerakan koperasi.
- (D) SDM dari gerakan Koperasi yang sudah mengalami kemajuan sehingga materi materi tentang Perizinan mudah di pahami.
- (E) Gerakan koperasi yang Mengikuti sosialisasi ataupun bimtek

**5. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan**

Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan

**Tabel 2.4.6**  
**Jumlah Capaian Indikator Pendukung Tahun 2022 (Dalam %)**

No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Capaian
----	------------------------------	---------------------------------	--------	---------

1	<b>Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi</b>		<b>Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>	<b>10 Lap</b>	<b>7 Lap</b>
			<b>Peningkatan jumlah anggota koperasi</b>	<b>100 Org</b>	<b>422 Org</b>
	1.1	Terlaksananya Pendampingan, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang meningkat Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Lap	10 Lap
	1.2	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan RAT Koperasi Sekunder/Primer Provinsi	Jumlah tindak lanjut Laporan hasil pemeriksaan rekomendasi kepada pengurus koperasi dan penerapan sanksi koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	14 Lap	10 Lap
2	<b>Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam</b>		<b>Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>4 Lap</b>	<b>7 Lap</b>
				2.1	Terlaksananya Penanganan KSP/USP Bermasalah

## 1. Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi

### 1. Indikator Keberhasilan :

Berdasarkan Data diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa **Jumlah Pemeriksaan Dan Pengawasan** yang dilakukan dari target 10 unit koperasi yang terealisasi hanya 7 unit koperasi, hal ini disebabkan oleh karena data/dokumen yang pada koperasi dibawah oleh pengurus sementara pengurus ada didaerah lain sehingga dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan tidak dapat kami lakukan.

Dari ketujuh koperasi dilakukan pemeriksaan dan pengawasan sebagai berikut :

- a} Kop. Konsumen Buana Jaya Berkarya (Kab. Parimo)
- b} KSP Sinar Kasih (kab. Parigi Moutong)
- c} KSP Sunhodos (Kota Palu)
- d} KSP Generasi Abadi Sejahtera (Kota Palu)
- e} KSP. Dipo Melo Finance (kota Palu).
- f} KSP Cahaya Effata Abadi (Kota Palu)
- g} KSp Setyo Budi (Kota Palu)

Sedangkan untuk **Peningkatan Jumlah Anggota Koperasi** dari tahun 2021 sebesar 65.540 orang dibandingkan tahun 2022 sebesar 65.962 orang berarti ada peningkatan sebesar 422 orang. Ini berarti bahwa koperasi sudah mendapat hati dimasyarakat dan juga tidak lepas dari hasil pembinaan yang dilakukan selama ini.

Dari segi **Jumlah Koperasi Yang Meningkat Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan Dan Kesiambungan** target tahun 2022 sebanyak 10 koperasi dan capaian realisasinya sebanyak 10 koperasi antara lain :

- a} Kop. Konsumen Buana Jaya Berkarya (Kab. Parimo)
- b} KSP. Sinar Kasih (kab. Parigi Moutong)
- c} KSP. Sunhodos (Kota Palu)
- d} KSP. Generasi Abadi Sejahtera (Kota Palu)
- e} KSP. Dipo Melo Finance (kota Palu).
- f} KSP. Cahaya Effata Abadi (Kota Palu)
- g} KSP. Setyo Budi (Kota Palu).
- h} KSP. Zaitun (Kab. Parigi Moutong).
- i} KSP CU. Mosinggani (Kota Palu)
- j} Kop. Konsumen Karya Perdana Gemilang (Kab. Parigi moutong).

Sedangkan **Jumlah Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Rekomendasi Kepada Pengurus Koperasi**

**Dan Penerapan Sanksi** sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dari 69 jumlah koperasi aktif baru 32 unit koperasi yang melaksanakan RAT dan dari data tersebut target capaian indikator pendukungnya dari target 14 unit koperasi capaian realisasinya ada 10 unit koperasi, antara lain :

1. KSP. Damai Abadi (Kota Palu)
2. KSP Mulya Jaya (kota Palu)
3. KSP Giat Maju (Kota Palu)
4. KSU Foster (kab. Sigi)
5. KSP Lestari Makmur Bersama (Kota Palu)
6. KSP Mandiri (kota Palu)
7. KSP Lestari Usaha Mandiri (Kab. Sigi)
8. Kop. Produsen Tani Makmur Mandiri (Kota Palu)
9. Kop. Konsumen mitra 3 serangkai (kota Palu)
10. Kop. Konsumenmitra mandiri sejahtera (Kota Palu)

Dari data **Jumlah Pemeriksaan Dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam** untuk 2022 realisasi sebesar 7 unit koperasi dari target 4 unit koperasi, ini berarti bahwa ada kenaikan sebanyak 3 (tiga) unit koperasi, sebagai berikut:

1. Kop. Konsumen Buana Jaya Berkarya (Kab. Parimo)
2. KSP Sinar Kasih (kab. Parigi Moutong)
3. KSP Sunhodos (Kota Palu)
4. KSP Generasi Abadi Sejahtera (Kota Palu)
5. KSP. Dipo Melo Finance (kota Palu).
6. KSP Cahaya Effata Abadi (Kota Palu)
7. KSp Setyo Budi (Kota Palu).

**Jumlah KSP/USP Koperasi Yang Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan Dan Kestinambungan Dalam Penanganan KSP/USP Bermasalah**, sebagai berikut :

- a) KSP Palu sumber Sejahtera (kota Palu)
- b) KSP. Belo Kita Hinggani (Kota Palu)

- c) Kop. Al-Amin (kota Palu)
- d) KSu Foster (kab. Sigi)

### **1. Indikator Penghambat.**

Hambatan dan kendala kampanye indikator pendukung seksi keanggotaan dan penerapan peraturan adalah sebagai berikut :

- Tidak lengkapnya pengurus koperasi pada saat melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi
- Data/dokumen koperasi ada yang tersimpan dirumah pengurus.
- Tidak jelasnya alamat koperasi yang akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi.

Dari ketiga hal tersebut diatas yang mengakibatkan tidak tercapainya target 10 koperasi yang realisasinya hanya 7 koperasi.

1. Masih rendahnya koperasi yang bergerak disektor rill.
2. Masih rendahnya SDM yang dimiliki oleh koperasi
3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundangan.

### **1. Penjelasan Teknis.**

Penjelasan teknis dalam mencapai target indikator.

1. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada gerakan koperasi.
2. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan baik kepada koperasi sector rill maupun KSP/USP.
3. Melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan kepada koperasi yang telah diperiksa.

## 1. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan & Penilaian Kesehatan KSP/USP

Seksi Pengawasan, Pemeriksaan & Penilaian Kesehatan KSP/USP

**Tabel 2.4.7**  
**Jumlah Capaian Indikator Pendukung Tahun 2022 (Dalam %)**

No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Capaian
1	Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	20 Lap	20 Lap
	1.1 Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	20 Lap	20 Lap
	1.2 Terlaksananya Peningkatan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	20 Lap	1] ap

⇒ **Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam**

→ **Indikator Keberhasilan**

Berdasarkan Tabel *Perkembangan Penilaian Kesehatan Koperasi Dapat Dilihat Bahwa Jumlah Koperasi Aktif tahun 2022 sebanyak 69 Koperasi dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 32 Koperasi, dan yang telah dinilai tingkat kesehatannya pada tahun 2022 sebanyak 20 Koperasi.*

Untuk tahun 2022 jumlah Koperasi yang telah dinilai Kesehatannya sebanyak 18 Koperasi Simpan Pinjam, dan 2 Koperasi Sektor Rill, apabila dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya sebanyak 14 Koperasi Simpan Pinjam.

Perkembangan tingkat Kesehatannya Koperasi:

(1) Koperasi Sehat 2021 sebanyak 4 Koperasi dan tahun 2022 sebanyak 7 Koperasi

(2) Koperasi Cukup Sehat tahun 2021 7 Koperasi sebanyak tahun 2022 sebanyak 13 koperasi.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah Koperasi yang dinilai tingkat kesehatannya mengalami peningkatan sebesar 6 koperasi meningkat 43 % dari tahun sebelumnya, dan yang sehat naik menjadi 7 koperasi atau meningkat sebesar 75 %.

Dinas Koperasi UKM Propinsi Sulawesi Tengah, memiliki cara yang berbeda dalam melaksanakan Penilaian Kesehatan Koperasi, untuk tahun ini dari Dinas Koperasi UKM membuat inovasi yang berbeda yaitu dengan menggunakan Link/Form yang dibagi ke Koperasi dan Petugas Penyuluh Koperasi dan form tersebut dapat diisi langsung oleh Gerakan Koperasi, Selanjutnya data tersebut dapat mempermudah dalam pengimputan pada kertas kerja Penilaian Kesehatan oleh TIM Penilai Kesehatan Koperasi.

#### ***b) Indikator Penghambat***

Regulasi tentang penilaian kesehatan Koperasi merupakan pedoman bagi KSP dan Koperasi Sektor Riil, untuk kedepannya dapat menuntun pengelolaan koperasi dalam mendeteksi kelemahan dan kekurangan sedini mungkin.

Kendala utama dalam Penilaian kesehatan adalah dalam standar laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi harus sesuai aturan penilaian kesehatan koperasi yang dilaksanakan tiap tahun.

Namun Penilaian kesehatan koperasi baru dapat dinilai kesehatannya oleh Tim Penilai Kesehatan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Tengah sebesar 29% dari jumlah Koperasi aktif, hal tersebut disebabkan beberapa kendala :

- a) Sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala penilaian kesehatan koperasi selama ini. Secara umum SDM pengelola Koperasi Propinsi Sulawesi Tengah masih banyak yang rendah.



- b) Kualitas SDM tenaga penilaian masih sangat terbatas, sehingga agak kesulitan memahami laporan dari Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Sektor Riil.
- c) Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pengurus/Pengelola Koperasi masih banyak yang belum memenuhi standar Laporan Keuangan (SAK ETAP) sehingga menyulitkan untuk melakukan penginputan pada kertas kerja penilaian kesehatan koperasi.
- d) Terbatasnya Anggaran untuk melakukan kunjungan ke Koperasi yang akan dinilai kesehatannya, sehingga Tim Penilai kesehatan Koperasi hanya mengandalkan data isian kusioner yang telah disebarakan ke Koperasi dan PPKL, sehingga kalau isian tersebut salah maka hasil penilaian kesehatan juga Bias.

### **3. *Penjelasan Teknis***

Sebagai lembaga keuangan yang profesional, pengelolaan koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP) dan Koperasi Sektor Riil dituntut harus profesional, harus punya visi dan misi serta memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan standar operasional manajemen (SOM) serta sumber daya manusianya yang berkualitas. Semua ini demi menjaga citra dan pelayanan yang optimal kepada anggota dan masyarakat. Oleh karena menghadapi era global yang penuh dengan persaingan yang kian ketat, kedepan setiap koperasi simpan pinjam dan Koperasi sektor Riil harus sehat, kuat dan tangguh baik dari segi :

- 1.** Tata Kelola yang menggambarkan Prinsip Koperasi, Kelembagaan dan Manajemen Koperasi,
- 2.** Profil Resiko yang menggambarkan Resiko Inheren (risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas,

risiko reputasi, risiko strategik, kualitas penerapan manajemen Risiko,

3. Kinerja Keuangan yang menggambarkan Evaluasi Kinerja Keuangan dari aspek Rentabilitas dan Kemandirian, Manajemen Keuangan dan Kestinambungan Keuangan dan
4. Permodalan Koperasi yang menggambarkan Kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.

Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi dilaksanakan untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan koperasi sektor Riil untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan Koperasi Sektor Riil adalah:

- a/** Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b/** Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa Koperasi;
- c/** Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d/** Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e/** Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi; dan
- f/** Meningkatnya manfaat ekonomi anggota.

Dalam Penilaian Kesehatan Koperasi tersebut dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a] Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $80,00 < x < 100$

- b) Cukup Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $66,00 < x < 80,00$ ;
- c) Dalam Pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $51,00 < x < 66,00$ ;
- d) Dalam Pengawasan Khusus, Jika hasil penilaian diperoleh total skor  $0 < x < 51,00$

Karena perolehan hasil penilaian kesehatan Koperasi baik Koperasi simpan Pinjam maupun Koperasi Sektor Riil sangat berpengaruh terhadap akses kerjasama dengan pihak ketiga dan stakeholder lainnya. Mengingat pembobotannya sudah sangat standar sehingga perolehan nilai tingkat kesehatan koperasi seharusnya tidak diragukan melainkan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel,

Harapan dari kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi dengan membagi kusioner kepada Koperasi dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) agar tetap bisa melakukan Penilaian Kesehatan Koperasi untuk menyaliasi keterbatasan anggaran. Dan yang paling penting yaitu gerakan Koperasi mampu memberikan kemanfaatan yang lebih besar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Agar Hasil Penilaian Kesehatan koperasi sesuai dengan kondisi Riil Koperasi, maka diharapkan agar:

- ⇒ Anggaran Penilaian Kesehatan dapat ditingkatkan sehingga Tim Penilaian Kesehatan Koperasi dapat menjangkau koperasi yang akan dinilai kesehatannya sehingga data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- ⇒ Dengan adanya pejabat fungsional Pengawas Koperasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai Tim Penilai Kesehatan Koperasi sehingga jumlah koperasi yang dinilai dapat meningkat.

- ⇒ Sumber Daya Pengelola Koperasi akan diberikan pembinaan dan pendampingan, dan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) terutama diklat Penyusunan Laporan Keuangan, Manajemen Koperasi dan Tehnik Pengisian Kusioner penilaian kesehatan Koperasi.
- ⇒ Sumber Daya Manusia (Pejabat Penilai Kesehatan Koperasi) dapat ditingkatkan melalui Bimtek :
  - ✚ Penyusunan Laporan Keuangan,
  - ✚ Penilaian Kesehatan Koperasi,
  - ✚ Pengisian Kertas Kerja Penilaian Kesehatan Koperasi (KKPK) yang meliputi aspek Tata Kelola, Aspek Profil Resiko, Aspek Kinerja Keuangan dan Aspek Permodalan Koperasi.

## KOPERASI SEHAT

### G. Koperasi Sehat

**Tabel 2.4.8**  
**Koperasi Sehat Tahun 2022**

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT
1	KSP Cahaya Efhata	Jl. Banteng No.9 Kota Palu
2	KSP Suka Damai	Jl. Bayu Mamboro Kota Palu
3	KSP Setyo Budi	Jl. KihajarDewantoro NO. 38 Kota Palu
4	KSP Sunhodos	Jl. Pattimurah NO. 5 Kota Palu
5	Ksp Zaitun Dana Lestari (PAD)	Jl. Ngurah Rai Kab. Parigi Moutong
6	KSP Sinar Kasih	Jl. Trans Sulawesi Tolai Kab. Parigi Moutong
7	KSP Bina Sejahtera Prima	Jl. Trans Sulawesi Tolai Kab. Parigi
8	Kop.Konsumen Mipa Tadulako	Jl. Sukarno Hatta km.9 Palu
9	KSP Buana Jaya	Jl. Trans Sulawesi Tolai Kab. Parigi Moutong
10	KSP Damai Abadi	Jl. Basuki Rahmat Birobuli Kota Palu
11	KSP Sepakat Mandiri	Jl.Trans Sulawesi Mamboro Kota Palu
12	KSP Sangkakala	Jl. Tanjung Manimbaya Kota Palu
13	KSP Dipo Melo	Jl. Moh. Yamin NO. 4 PaluKota Palu
14	KSP Generasi Abadi Sejahtera	Jl. Kancil Kota Palu
15	KSP Budi Luhur	Jl. Trans Sulawesi NO. 110 Kab. Parigi Moutong
16	KSP Tunas Harapan	Jl. Gusti Ngurarai Kab. Parigi Moutong
17	KSP Tomporoso	Jl. Poros Palu Kulawi Kab. Sigi
18	PKPRI Sulawesi Tengah	Jl.DR. Suharso NO.419 Kota Palu
20	KSP Karya Perdana Gemilang	Jl.Trans Sulawesi Desa Suli Indah Kab.Parigi Moutong

## ◆ Perkembangan Modal Koperasi

### ◆ Indikator Usaha Koperasi

Indikator berdasarkan Usaha Koperasi dapat dilihat seberapa besar permodalan yang dimiliki koperasi dan seberapa besar jumlah SHU dan Volume usaha koperasi pada tahun berjalan. Berikut ini dapat dijelaskan indikator tersebut.

**Tabel 2.4.9**  
**Perkembangan Modal Koperasi Tahun 2018-2022 (dalam angka)**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Modal Luar	362.525.765	495.016	84.709	99.791	232.039
2.	Modal Sendiri	1.580.858.763	745.780	59.026	198.690	113.716
	<b>Jumlah</b>	<b>1.943.384.528</b>	<b>1.240.796</b>	<b>143.735</b>	<b>298.481</b>	<b>345.755</b>

*Sumber: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan*

Berdasarkan Tabel 6.9 Perkembangan Modal Koperasi Tahun 2018-2022, dapat dilihat bahwa modal koperasi terbagi atas 2 (dua) yakni modal sendiri (modal ekuiti) dan modal luar atau modal pinjaman. Modal sendiri atau modal ekuiti dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dana cadangan dan hibah. sedangkan modal luar atau modal pinjaman dapat berasal dari modal penyertaan; anggota; koperasi lainnya dan/atau anggotanya; bank dan Lembaga keuangan lainnya; penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau pemerintah.

Untuk tahun 2021 jumlah modal koperasi yang keanggotaannya lintas kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 298.481.000.000,- yang terdiri dari:

- ➔ Modal sendiri (modal ekuiti) senilai Rp. 99.791.000.000,-
- ➔ Modal Luar (modal pinjaman) senilai Rp. 198.690.000.000,-

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah modal koperasi yang keanggotaannya lintas

kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 345.755.000.000,- yang terdiri dari:

- (1) Modal sendiri (modal ekuity) senilai Rp. 113.716.000.000,-
- (2) Modal Modal Luar senilai Rp. 232.039.000.000,-

Dapat dilihat bahwa jumlah modal koperasi secara keseluruhan di tahun 2022 mengalami kenaikan, yakni sebesar Rp. 47.274.000.000,- yang disebabkan adanya penumbuhan jumlah koperasi yang baru terbentuk sehingga berdampak pada kenaikan jumlah modal anggota koperasi dan berpengaruh pada jumlah modal sendiri koperasi.

#### ◆ **Indikator Penghambat**

Modal sendiri berasal dari simpanan anggota, yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Selain itu juga modal sendiri berasal dari dana cadangan dan hibah.

Simpanan anggota merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota ke koperasi selama menjadi anggota dan tidak dapat diambil selama menjadi anggota. Dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyesihan hasil usaha. Sedangkan hibah adalah sejumlah uang dan/atau barang modal, yang dinilai dengan uang, yang diterima dari Pemerintah, Lembaga internasional, perseorangan, dan pihak-pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat.

Untuk modal sendiri yang berasal dari simpanan anggota, semakin banyak jumlah anggota maka semakin besar modal dari koperasi. Hal yang menjadi penghambat apabila ada anggota koperasi yang keluar dari keanggotaan dan mengambil seluruh simpanan anggotanya, yang mengakibatkan berkurangnya modal koperasi.

Dana cadangan, semakin besar sisa hasil usaha yang ada maka semakin besar pula yang menjadi modal dari koperasi. Namun tidak bisa dipungkiri, terkadang dalam satu periode, koperasi seringkali nihil atau tidak ada sisa hasil usahanya, yang mengakibatkan dalam satu periode tersebut tidak ada ketambahan jumlah modal yang berasal dari dana cadangan.

Adapun dana hibah, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Pemerintah lebih memfokuskan pemberian hibah kepada pelaku usaha. Sasaran hibah ke kelompok usaha karena dianggap lebih mampu mengelola dananya tersebut.

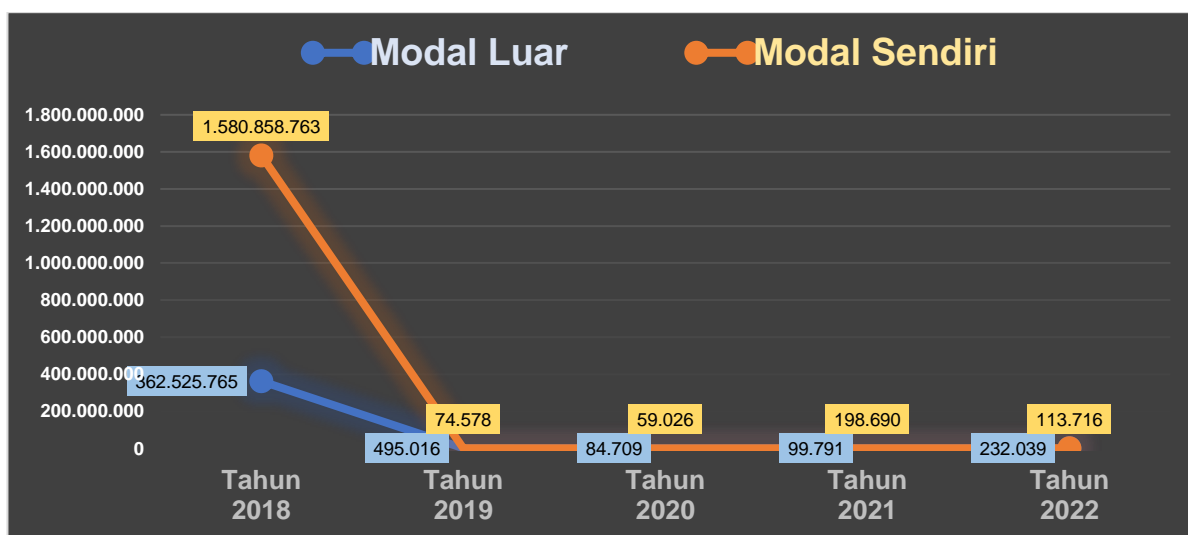
Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa bila dibandingkan dengan jumlah modal di tahun 2021, untuk tahun 2022 modal koperasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 47.274.000.000,- yang disebabkan adanya penumbuhan jumlah koperasi yang baru terbentuk sehingga berdampak pada kenaikan jumlah modal anggota koperasi dan berpengaruh pada jumlah modal sendiri koperasi.

Hal-hal yang bisa dilakukan agar modal koperasi semakin bertambah diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada anggota koperasi tentang manfaat dari berkoperasi dan tetap konsisten/rutin dalam melaksanakan kewajibannya yakni membayar simpanan anggota; Melakukan pendampingan pengembangan dan pemberdayaan usaha koperasi, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh anggota dan masyarakat sekitar koperasi yang membuat anggotanya semakin semangat dalam melaksanakan kewajibannya dan masyarakat sekitarnya yang belum menjadi anggota berminat untuk menjadi anggota; memberikan bantuan/hibah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan sasaran koperasi potensi yang anggotanya adalah



pelaku usaha; melakukan fasilitasi pendampingan kepada koperasi untuk akses pembiayaan dengan sosialisasi badan usaha perbankan dan non perbankan; dan lain-lain fasilitasi pendampingan dalam rangka meningkatkan permodalan koperasi.

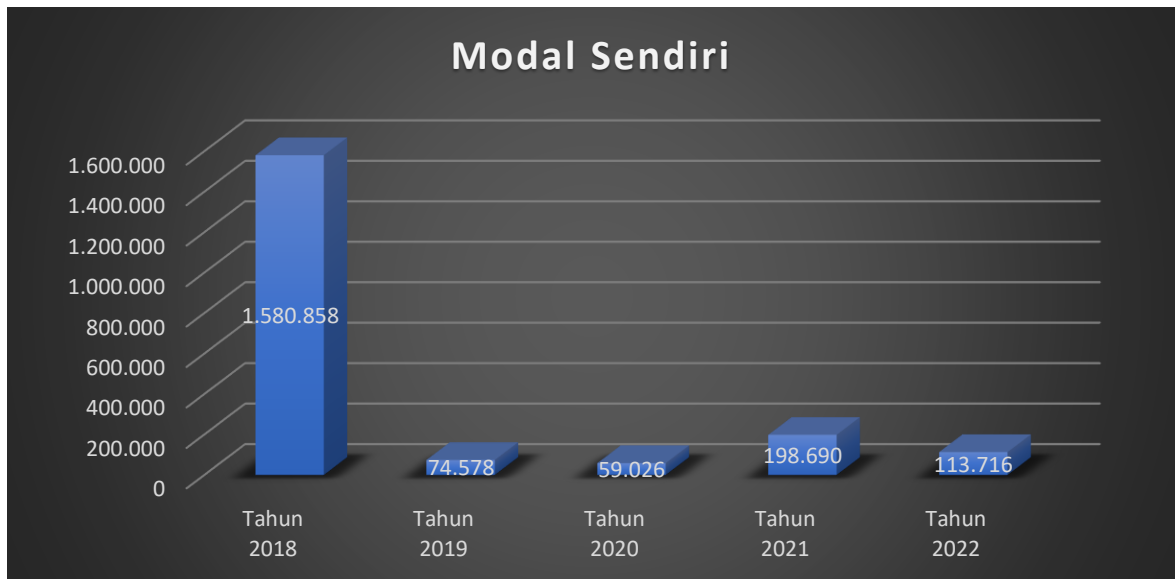
**Gambar 2.4.6**  
**Perkembangan Modal Koperasi Tahun 2018-2022**



**Gambar 2.4.7**  
**Perkembangan Modal Luar Tahun 2018-2022**



**Gambar 2.4.8**  
**Perkembangan Modal Sendiri 2018-2022**



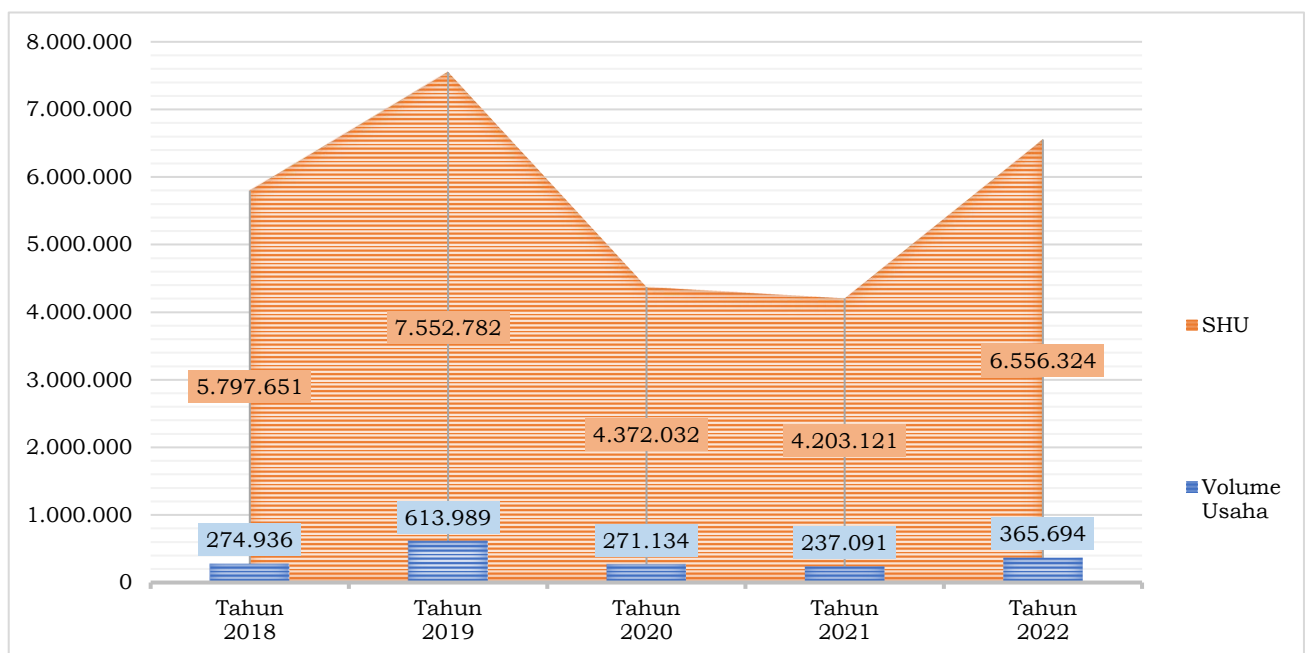
### ◆ Perkembangan Volume Usaha dan SHU Koperasi

**Tabel 2.4.10**  
**Perkembangan Volume Usaha dan SHU Koperasi Tahun 2018 – 2022 (dalam angka)**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Volume Usaha	274.936	613.989	271.134	237.091	365.694
2.	SHU	5.797.651	7.552.782	4.372.032	4.203.121	6.556.324
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.072.587</b>	<b>8.166.771</b>	<b>4.643.166</b>	<b>4.440.212</b>	<b>69.22.018</b>

*Sumber: Data Keragaan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan*

**Gambar 2.4.9**  
**Volume Usaha dan SHU Koperasi Tahun 2018-2022**



**(a) Indikator keberhasilan**

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, volume usaha koperasi yang keanggotaannya lintas daerah Kab.Kota se-Sulteng mengalami fluktuasi yang signifikan. Tahun 2018 volume usaha koperasi mengalami penurunan drastic akibat adanya bencana alam gempa dan likuifaksi di akhir tahun 2018, volume usaha koperasi sebesar Rp. 274.936.000.000,-. Pada tahun 2019 usaha koperasi mulai bangkit kembali, ini terlihat dari jumlah volume usahanya naik sebesar Rp. 613.989.000.000,-. Namun ditahun 2020 ketika pandemic covid-19 melanda dunia dan berpengaruh signifikan terhadap volume usaha koperasi menurun sebesar Rp. 271.134.000.000,-. Dampaknya dari pandemic ini masih ada di tahun 2021 terhadap volume usaha koperasi, sebesar Rp. 237.091.924.869,-, dan di tahun 2022 pelan tapi pasti volume usaha koperasi menaik sebesar Rp. 365.694.000.000,-.

Volume usaha koperasi mencerminkan nilai omzet atas hasil kegiatan usaha koperasi yang diukur menggunakan satuan uang dalam suatu periode. Jika koperasi memiliki usaha waserda, maka yang diukur adalah total nilai barang yang terjual baik oleh anggota maupun non anggota koperasi, jika koperasi simpan pinjam maka yang diukur adalah seberapa besar koperasi bisa memberikan kredit kepada anggotanya. Volume usaha juga mencerminkan seberapa aktif koperasi dalam melakukan kegiatan usaha. Jika volume usaha rendah berarti kegiatan usaha yang berjalan masih belum terlaksana dengan optimal sehingga perlu perbaikan dan strategi tertentu untuk meningkatkan volume usahanya.

Adapun Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan

kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Modal dan volume usaha berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha (SHU). Hal ini menunjukkan apabila ingin meningkatkan SHU, maka anggota koperasi harus konsisten dalam melakukan pembayaran simpanan anggotanya dan melakukan aktivitas usaha koperasi. Selain itu, koperasi juga harus mengurangi biaya atau belanja yang tidak penting sehingga dapat mengurangi pendapatan koperasi.

Dapat dilihat dari Tabel 1.2 bahwa Sisa Hasil Usaha Koperasi berbanding lurus dengan volume usahanya selama kurun 5 (lima) tahun terakhir.

#### **Indikator Penghambat**

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa yang menjadi factor penghambat adalah keadaan alam dimana tahun 2018 terjadi bencana alam, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu dan sekitarnya yang berdampak pada turunnya bahkan terhentinya aktivitas usaha koperasi. Daya beli anggota dan masyarakat sekitar koperasi juga menurun yang diakibatkan aktifitas koperasi yang tidak maksimal.

Terlihat juga di tahun 2020 dan 2021, Ketika pandemic covid-19 melanda, perekonomian dunia terpuruk dan pastinya berpengaruh pada aktifitas usaha koperasi, dimana diberlakukannya pembatasan aktivitas oleh pemerintah yang mengakibatkan usaha-usaha koperasi tidak jalan dan daya beli masyarakat yang menurun.

Sisa Hasil Usaha dipengaruhi oleh jumlah modal dan volume usaha. Sehingga yang menjadi indicator penghambat dari Modal Koperasi dan Volume Usaha

koperasi merupakan indicator penghambat dari Sisa Hasil Usaha.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, bahwa volume usaha koperasi mencerminkan seberapa aktif koperasi dalam melakukan kegiatan usaha, maka hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah dengan memfasilitasi akses pembiayaan ke badan usaha lainnya baik perbankan maupun Lembaga dana bergulir, agar semakin besar modal koperasi dalam melakukan aktifitas usahanya; melakukan sosialisasi bagi anggota koperasi agar memprioritaskan koperasi sebagai pilihan utama untuk melaksanakan kegiatan usahanya, karena jika anggota pasif terhadap koperasi maka akan mengakibatkan kegiatan usaha koperasi kurang optimal dan kelak akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh koperasi; fasilitasi pelatihan e-market bagi koperasi yang mempunyai produk, agar pemasaran produknya semakin lancar dan produktifitas produknya tetap stabil; fasilitasi peningkatan kualitas SDM pengurus agar semakin kreatif dan inovatif dalam menjalankan usaha koperasi; fasilitasi pendampingan dalam rangka standarisasi dan mutu produk usaha koperasi, agar produk-produk koperasi dapat bersaing dengan produk lain dan tetap diminati oleh masyarakat luas sehingga semakin naik penjualan produk koperasi.

Berdasarkan tabel 1.2, terlihat bahwa di Tahun 2020, jumlah sisa Hasil Usaha Koperasi mengalami penurunan dibandingkan di tahun 2021 yakni sebesar Rp. 3.523.605.000,-.

Adanya pandemic covid-19 yang mengakibatkan menurunnya aktivitas usaha koperasi, daya beli masyarakat yang berkurang, serta anggota koperasi yang keluar dari keanggotaan menjadi pemicu menurunnya nilai sisa hasil usaha. Hal-hal yang dilakukan dalam penjelasan Modal dan Volume Usaha

merupakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Sisa Hasil Usaha.

### 3. Indikator Pendukung Usaha Koperasi

**Tabel 2.4.10**  
**Jumlah Capaian Indikator Utama dan Pendukung Usaha Koperasi**  
**Tahun 2021 - 2022 (Dalam Unit/%)**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase Jumlah Pengurus/Anggota Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	0,67%	0,56%
2	Meningkatnya Cakupan Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Kopersi	Persentase Koperasi Modern	2,30%	1,67%
		Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Pelaku usaha lainnya	20%	5%
		Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	10%	22,74%
		Persentase Tenaga Kerja terserap	3,45%	5,08%

Sumber: Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi

#### b.1 Capaian Indikator Utama dan Pendukung Usaha Koperasi

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi memiliki 2 (dua) Sasaran Program, yakni Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan Meningkatnya Cakupan Pengembangan, Penguatan dan Perindungan Koperasi.

1. Untuk Sasaran Program Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi memiliki Indikator Persentase Jumlah pengurus/anggota koperasi yang mengikuti pelatihan. Dari Target 0,67% terealisasi senilai 0,56%.
2. Untuk Sasaran Program Meningkatnya Cakupan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi memiliki 4 (empat) Indikator, yakni sebagai berikut:
  - a. *Persentase Koperasi Modern.*
  - b. *Target capaian 2,30%, yang tercapai sebanyak 1,67%.*
  - c. *Persentase peningkatan Kerjasama dengan pelaku usaha lainnya. Target capaian 20%, capaian hanya sebanyak 5%*
  - d. *Persentase peningkatan volume usaha koperasi, ditargetkan 10%, sementara capaiannya sebanyak 22,74%*

e. *Persentase Tenaga Kerja, Target capaiannya 3,45%, sedangkan realisasi capaiannya sebanyak 5,08%.*

## **b.2 Seksi Peningkatan SDM Koperasi**

Seksi Peningkatan SDM Koperasi

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Capaian Indikator Pendukung Usaha Koperasi**  
**Tahun 2021 - 2022 (Dalam Unit / %)**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan/SubKegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>
<b>1</b>	<b>Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Koperasi</b>	<b>Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>	<b>0,7%</b>	<b>16.19 %</b>
		<b>Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>	<b>20%</b>	<b>14.25 %</b>
		<b>Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>	<b>3%</b>	<b>0.92 %</b>
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengurus/Anggota	Jumlah Pengurus, Pengawas dan anggota koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	480 Orang	315 Org

### **1. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja**

Faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya kinerja 3 (tiga) seksi pada Bidang Pemberdayaan dan pengembangan koperasi adalah tersedianya anggaran/biaya dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan koperasi sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target pada indikator kegiatan dan sub kegiatannya.

### **2. Indikator Penghambat Keberhasilan Kinerja**

Adapun factor yang menjadi penghambat keberhasilan kinerjanya adalah sebagai berikut:

- 1. Kapasitas SDM pengelola koperasi belum maksimal*
- 2. Rendahnya partisipasi anggota koperasi terhadap perkembangan koperasi*



3. *Pengelolaan usaha koperasi belum terlaksana secara professional*
4. *Belum terlaksananya pola kemitraan antar koperasi dalam hal pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan*
5. *Terbatasnya anggaran di tahun anggaran 2022; dan*
6. *Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perkoperasian.*

### **3. Tindak lanjut**

Adapun tindak lanjut yang diperlukan dalam dalam RKPD berikutnya, sebagai berikut:

1. *Melaksanakan kegiatan pelatihan bagi pengelola dan anggota koperasi*
2. *Tersedianya fasilitas guna mendukung program pemberdayaan dan pengembangan koperasi*
3. *Terjalannya koordinasi/sinergitas lintas sector yang terkait dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi.*

**Tabel 1.7**  
**Peningkatan Kerjasama Dengan Pelaku Usaha Lainnya**  
**(By Name By Address) Tahun 2022**

<b>NO.</b>	<b>NAMA KOPERASI</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Koperasi Al Muhajirin	Toili Kabupaten Banggai
2.	Koperasi Karya Perdana	Parigi Moutong
3.	KSP Bina Sejahtera	Parigi Moutong

#### 1.7 Peningkatan Kerjasama dengan pelaku usaha lainnya

Di Tahun 2022 terjalannya Kerjasama dengan badan usaha lainnya dengan realisasi 3 unit, yakni :

##### A. KSP Karya Perdana

Koperasi yang beralamatkan di Jl. Trans Sulawesi, Ds, Suli Indah, Kec. Balinggi, Kab. Parigi Moutong memiliki jumlah anggota 2.657 orang dan telah memiliki 6 kantor cabang. Telah melakukan kemitraan akses pembiayaan dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi UMKM RI.

##### B. KSP Bina Sejahtera Prima

Koperasi ini beralamatkan di Jl. Trans Sulawesi Tolai Barat, Kec. Torue Barat Kab. Parigi Moutong memiliki anggota sebanyak 19.016 orang. Koperasi ini dibentuk sejak tahun 2010 dan telah memiliki 12 kantor cabang. Melakukan kemitraan dalam hal akses pembiayaan dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi, UMKM RI.

C. Koperasi Konsumen Serba Usaha Syariah BMT Al Muhajirin

Koperasi yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani No. 22 Ds. Singkoyo Kab. Banggai ini pada Bulan Juli tahun 2022 melakukan perubahan anggaran dasar beralih ke koperasi propinsi yang awalnya merupakan binaan Kab. Banggai. sejak Melakukan kemitraan dalam hal akses pembiayaan dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi, UMKM RI.

**b.3 Jumlah Capaian Indikator Pendukung Usaha Koperasi Seksi Peningkatan SDM Koperasi**

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pendidikan dan Latihan koperasi

Indikator kegiatan :

1. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, ditargetkan 0,7% terealisasi 16,19%.
2. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, ditargetkan 20%, terealisasi 14,25%.
3. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, ditargetkan 3%, terealisasi 0,92%.

Sub kegiatan : Terlaksananya bimbingan teknis pengurus/anggota koperasi

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah pengurus, pengwas dan anggota koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan perkoperasian dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab./kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, ditargetkan sebanyak 480 orang, yang terealisasi sebanyak 315 orang.

**Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi.**

Seksi Pengembangan, Penguatan & Perlindungan Usaha Koperasi				
<b>Tabel 1.5</b> <b>Jumlah Capaian Indikator Pendukung Usaha Koperasi</b> <b>Tahun 2021 - 2022 (Dalam Unit / %)</b>				
No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Capaian
1	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Dan Akses Pembiayaan Bagi Koperasi	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1,15%	2.75%
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	3,45%	0.13%
	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Muti Produk Koperasi	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Lap	1 Lap
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	3 Lap	1 Lap

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi kemitraan dan akses pembiayaan bagi koperasi

Indikator Kegiatan :

- ◆ Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah

keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, ditargetkan 1,15%, terealisasi 2,75%

- ◆ Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, ditargetkan 3,45%, terealisasi 2,75%.

Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya sosialisasi peningkatan mutu produk koperasi

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, ditargetkan 1 laporan, terealisasi 1 laporan.
- Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, ditargetkan 3 laporan, terealisasi 1 laporan.

### Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Seksi Fasilitas Usaha Koperasi				
<b>Tabel 1.6</b>				
<b>Jumlah Capaian Indikator Pendukung Usaha Koperasi</b>				
<b>Tahun 2022 (Dalam Unit / %)</b>				
No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Capaian
1	<b>Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Dan Pendampingan Kelembagaan Bagi Koperasi</b>	<b>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>	<b>2,3%</b>	<b>1.8%</b>
		<b>Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi</b>	<b>20%</b>	<b>10.09%</b>

	Terlaksananya Program Kerja PPKL Dan Temu Kemitraan Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Lap	1 Lap
		Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi dan usaha	3 Lap	3 Lap

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi pemasaran dan pendampingan kelembagaan bagi koperasi

Indikator Kegiatan : - Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, ditargetkan 2,3% terealisasi 1,8%

-Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasiltasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, ditargetkan 20%, terealisasi 10,09%.

Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya program kerja PPKL dan temu kemitraan pengembangan usaha koperasi

Indikator Sub Kegiatan : - Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, ditargetkan 1 (satu) laporan, terealisasi 1 (satu) laporan

-Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, ditargetkan 3 (tiga) laporan, terealisasi 3 (tiga) laporan.

o **Perkembangan Sektor UKM**

Dalam rentang waktu tahun 2022 jumlah usaha kecil dan menengah terus bertambah. Pada LKj tahun 2022 ini hasil kegiatan yang dicapai pada sektor UKM dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Capaian Indikator Utama Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian
1	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Menjadi wirausaha	5,77%	6,24%
2	Meningkatnya Kualitas Kewirausahaan	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	0,18%	0,12%
		Persentase Produk Usaha Kecil yang meningkat Kualitas	3%	0,35%
		Persentase Usaha Kecil yang mendapat fasilitasi	5%	3,2%
		Persentase Usaha Kecil yang mendapat Pendampingan	2,29%	2,2%
		Persentase Usaha Kecil yang naik kelas	1,57%	0,0046%
3	Meningkatnya Fasilitasi Dan Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1,34%	1,45%

a. Indikator Keberhasilan

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil khususnya bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha kecil dalam rencana kerja tahun anggaran 2022 melaksanakan 2 Program yakni Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dengan target yang ingin di capai sesuai dengan Rencana strategis

(Renstra) yang telah ditetapkan, capaian tersebut dapat diukur berdasarkan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

- a. Presentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha
- b. Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru
- c. Presentase Produk Usaha Kecil yang meningkatkan kualitasnya
- d. Presentase yang mendapat Fasilitas
- e. Presentase usaha kecil yang mendapatkan pendampingan presentase usaha kecil yang naik kelas Jumlah usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitas Pemasaran

Berdasarkan indikator utama tersebut diatas maka capaiannya bisa terlihat dalam tabel 1.1 jumlah capaian indikator kolom (5), secara umum bahwa hasil pencapaian yang telah dilaksanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

Indikator keberhasilan dalam pencapaian target tersebut diatas salah satunya karena didukung oleh kerjasama antara Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten/dalam dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembinaan baik melalui pendampingan dan fasilitas maupun dalam pelaksanaan Bimbingan teknis (bimtek) melalui pengiriman peserta untuk mengikuti kegiatan,

#### b. Indikator Penghambat.

Harus diakui bahwa Dalam Melaksanakan pencapaian indikator utama memang masih terdapat kendala-kendala maupun factor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaiannya, salah satu kendala dalam pencapaian keberhasilan belum akuratnya data pelaku usaha, baik Mikro maupun Kecil yang dimiliki baik oleh Dinas Koperasi yang membidangi UMKM di Kabupaten/Kota maupun Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah Provinsi Sulawesi Tengah, selama ini pelaksanaan pemutahiran data UMKM sebagai basis perencanaan untuk pencapaian indikator belum berjalan secara sustenabel atau



berkelanjutan, ini bisa dibuktikan bahwa Data UMKM yang ada Di Daerah Kabupaten/Kota masih menggunakan data hasil pendataan lama sementara aktivitas UMKM maupun pelaku usaha sangat dinamis artinya up dating data dan perkembangan usaha UMKM belum ditampilkan secara akurat dan valid, kategori Usaha Mikro dan kecil masih sangat sulit dibedakan berdasarkan ukuran asset maupun omset berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, kendala-kendala ini masih hampir dirasakan oleh semua Daerah yang ada di Indonesia, agar arah perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi harus dapat mempebaharui data sesuai dengan perkembangan usaha UMKM, ini memeng menjadi pekerjaan rumah bagi instansi Pembina, keterbatasan alakosai atau pembiayaan menjadi kendala utama dalam peremajaan data Usaha UMKM

Factor penghambat lain yang masih dirasakan dilapangan dalam pencapaian target dan sasaran adalah adanya kewenangan masing-masing instansi yang diatur oleh regulasi, sebut saja dalam mengukur Presentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha atau pertumbuhan Wirausaha baru, dalam pencapaian ukuran perhitungan indikator Pertumbuhan Wirausaha Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus berkolaborasi dengan Instansi lain antara lain Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) karena berdasarkan ketentuan yang ada bahwa pemegang otoritas pemberian izin Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi legalitas UMKM adalah instansi tersebut melalui Sistem terintegrasi secara elektronik atau melalui aplikasi Online Singel Submission (OSS) semua perizinan terkait dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM melalui aplikasi OSS, kendala yang di hadapi oleh Dinas koperasi, UKM dalam memperoleh data jumlah pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agak sulit mendapatkan data UMKM yang telah memiliki Nomor Induk berusaha, sementara salah indikator Wirausaha adalah ketika UMKM tersebut telah memiliki NIB, kedepannya perlu dibangun kolaborasi antar instansi dalam berbagi informasi dalam rangka pencapaian program Pemerintah Daerah maupun instansi.

- c. Penjelasan teknis terkait hal-hal yang dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan

Usaha Kecil sehingga Target indikator Utama dapat tercapai.

Berdasarkan uraian dalam indikator keberhasilan telah tergambar diatas, bahwa salah satu pendukung dari keberhasilan dalam pencapaian target indikator adalah kerjasama antara Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, secara teknis bahwa pencapaian indikator utama tersebut di dapatkan dari:

Presentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha, untuk mencapai Presentasi maupun data Usaha Kecil Menjadi Wirausaha adalah dengan cara melaksanakan koordinasi dan pengambilan data dengan instansi terkait tentang capaian secara umum berapa UMKM yang telah mendapatkan perizinan NIB dari instansi yang berwenang, sampai dengan uraian ini di buat Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dalam menghitung Presentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha adalah berdasarkan data Tahun 2021 yang di berikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). untuk Tahun 2022 Dinas Koperasi UMK belum mendapatkan data terbaru, sumber lain yang dijadikan perhitungan dalam indikator ini adalah menghitung jumlah UMKM yang telah di fasilitasi langsung oleh Dinas dalam hal ini oleh para Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) K-UMKM Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tenaga teknis di lapangan, fasilitasi yang di berikan ini melakukan pembimbingan kepada para pelaku usaha untuk mendapatkan Nomor induk berusaha, karena dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha bisa langsung dilakukan secara digital, ini dilakukan oleh para Konsultan PLUT K-UMKM baik melalui Kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu maupun melalui kegiatan pendampingan langsung dilapangan, kerja pendampingan maupun fasilitasi dimaksudkan untuk mendukung dan membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan perizinan, melaku konsultan tersebut UMKM di daftarkan untuk memperoleh NIB

Presentase Produk Usaha Kecil yang meningkat kualitasnya, secara teknis untuk mencapai indikator ini penilaiannya adalah Usaha Kecil di damping dari sisi produk antara lain memberikan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM evaluasi dan penilaian terhadap produk baik dari sisi produksinya maupun dalam

peningkatan standarisasi, penilaian terhadap produk usaha kecil yang meningkat kualitasnya biasanya dilakukan melalui kurasi produk dalam kurasi produk dimana produk tersebut akan di nilai dari segi produksinya dan desain kemasannya agar dapat menarik konsumen, indikator ini di dapatkan juga dari pengiriman Produk UMKM untuk di uji dilaboratorium di bogor tentang kandungan nutrisi yang terdapat dalam sebuah produk

Presentase Usaha Kecil yang mendapat Fasilitasi, inidikator ini di dapatkan kegiatan Bimbingan teknis (bimtek) seperti penerbitan Pangan Industri Rumah Tangah (PIRT), sertifikasi halal produk, izin edar (BPOM), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), ini dimaksudkan untuk membantu para pelaku usaha mendapatkan yang dibutuhkan oleh usahanya, fasilitasi dilakukan untuk mempermudah UMKM dalam memenuhi syarat dan kriteria usahanya, dalam rangka mendapatkan indikator ini UMKM akan di fasilitasi melalui program kolaborasi antar instansi terkait dengan Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah karena melalui program ini UMKM akan mendapatkan keringanan dalam hal pembiayaan terkait dengan penerbitahan Sertifikasi Halal, HAKI dan lain-lain program yang dibangun antara inistansi sangat membantu pelaku usaha dalam perluasan akses pasar, oleh karena itu program dan kegiatan bidang Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil sangat membantu para pelaku usaha melalui fasilitasi baiak administrasi maupun pembiayaan dalam pengurusan izin maupun standarisasi produk

Presentase Usaha Kecil yang mendapatkan pendampingan

Terkait dengan aktifitas pendampingan terhadap para pelaku usaha ini lebih banyak dilakukan oleh para konsultan pendamping PLUT K-UMKM dengan cara mendandatangani para pelaku usaha di tempat usahanya dalam hal tugas maupun bidang pendampingan yang dimiliki oleh PLUT K-UMKM Provinsi Sulawesi Tengah

Saat ini Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu di mana para pelaku usaha bisa datang langsung kepusat layanan untuk di damping dalam mengakses kebutuhan layanan sesuai dengan bidang tugas para konsultan, tugas dan fungsi konsultan pendamping yang dimiliki oleh PLUT K-UMKM Sulawesi Tengah meliputi beberapa bidang tugas antara lain perizinan, konsultasi, pengembangan kerja sama, pemasaran, dan tugas tugas pendampingan lainnya,

adapun 7 (tujuh) bidang tugas yang dimiliki oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) K-UMKM adalah:

1. Konsultan/Pendamping bidang Sumber Daya Manusia
2. Konsultan/Pendamping Bidang Pemasaran
3. Konsultan/Pendamping bidang Pembiayaan
4. Konsultan/Pendamping bidang kelembagaan
5. Konsultan/pendamping bidang produksi
6. Konsultan/pendamping bidang Kerjasama
7. Konsultan/Pendamping bidang Informasi dan Teknologi

Presentase Usaha Kecil yang Naik kelas

Secara teknis dalam rangka pencapaian Usaha Kecil Naik kelas dilakukan melalui Pembinaan baik pendampingan maupun fasilitasi kepada pelaku Usaha dengan ukuran kategori untuk UMKM naik kelas adalah ketika UMKM tersebut telah memiliki modal diatas Rp. 5 milyar Rupiah dalam setahun, ketika usaha telah memiliki modal sejumlah tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelaku usaha masuk dalam kategori Usaha menengah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, dan Usaha Kecil, dalam mendorong pelaku usaha naik kelas dari Usaha Kecil menjadi usaha menengah tentu bukanlah hal mudah perlu keterlibatan Pemerintah terutama Dinas teknis yakni Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam memberikan kesempatan dalam pendampingan maupun fasilitasi terutama pada factor produksi, Standarisasi Produk, Pembiayaan serta pemasaran hal ini dilakukan agar para pelaku usaha tersebut dapat berkembang lebih baik lagi

Jumlah Usaha Kecil yang di berikan dukungan Pemasaran.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pemasaran produk UMKM maka dinas koperasi bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil melakukan dukungan dalam bentuk Bimbingan Teknis (bimtek) bagaimana cara melakukan Pemasaran baik secara online maupun secara langsung melalui program kemitraan dengan toko retail modern, dan secara online bahwa pemasaran terhadap produk-produk UMKM melalui flatform digital dengan bekerjasama dengan market place yang ada, melalui bimbingan teknis maupun pendampingan yang dilakukan.

Saat ini melalui instruksi Presiden bahwa belanja pengadaan barang dan jasa Pemerintah 40 persen lebih di peruntukan kepada

produk lokal dalam hal ini Koperasi dan UMKM oleh karena itu agar produk UMKM dapat diserap oleh belanja tersebut maka pelaku usaha baik Koperasi maupun UMKM untuk dapat memanfaatkan Market place baik melalui belanja pengadaan, Membiz maupun e katalog lokal, dalam rangka memanfaatkan pemasaran secara online maka para pelaku UMKM di bimbing bagaimana cara memasarkan produk melalui market place yang ada

Selain market place yang di sebutkan di atas dinas juga memfasilita para pelaku UMKM untuk masuk melalui platfor digital lainnya, seperti tokopedia, lazada, blibli dan beberapa market palce lainnya.

Terdapat 210 Usaha Kecil yang telah menjadi Wirausaha pada Tahun 2022 yang menjadi bagian dari fasilitasi yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Fasilitator dan Pendamping bagi Usaha Kecil yang ingin berwirausaha.

#### 1) Indikator Keberhasilan

Salah satu indikator yang menjadi penilaian pada bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha kecil Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil adalah usaha kecil menjadi wirausaha bahwa yang menjadi ukuran usaha kecil menjadi wirausaha adaka ketika manakala usaha kecil tersebut telah memiliki legalitas resmi dalam hal ini Nomor induk Berusaha (NIB) yang dterinterirasi secara elektronik melalalui data Online Singel Summission (OSS) yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang. Capaian keberhasilan dari kegiatan ini adalah usaha kecil dapat mengakses perizinan melalui upaya dan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPT) setiap tahun melalui alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Pelaksanaan pelatihan yang di programkan melalui keberhasilan ini sangat di tentukan oleh jumlah pelatihan terhadap UMKM yang dilaksanakan oleh UPT setiap Tahunnya karena dengan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan para pelaku dan

calon wirausaha akan di fasilitasi untuk mendapatkan legalitas usaha dengan cara di daftarkan untuk memperoleh Nomor induk berusaha (NIB). Kegiatan pelatihan sangat membantu para pelaku usaha untuk dapat beralih dari non formal ke formal.

Indikator keberhasilan dalam pencapaian target tersebut diatas salah satunya karena didukung oleh kerjasama antara Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten/dalam dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah serta para tenaga pendamping pelatihan yang ada di lapangan

2) Indikator Penghambat.

Salah satu yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini adalah kurang koneksitas antara bidang teknis dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pemilihan peserta sesuai dengan sasaran kegiatan berdasarkan pelaksanaan yang di lakukan oleh Unit pelaksana Teknis (UPT). Pencapaian ini sangat juga dipengaruhi oleh kurang sinergi dengan Instansi lainya yang berada dilingkup Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM sekarang di lakukan di berbagai sektor sesuai kewenangan masing-masing, akibat dari kurang sinerginya atau komunikasi dalam pelaksanaan program sehingga capaian indikator dari instansi atau OPD Pembina sulit untuk dijadikan capaian pertumbuhan wirausaha secara umum akhirnya target yang telah di tetapkan belum maksimal untuk mencapai hasil yang di harapkan ini menjadi tugas kedepannya dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM perlu sinergisitan antar sektor

**Tabel 1.3**

**Jumlah Capaian Indikator Pendukung Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Tahun 2022**

**Seksi Fasilitas Usaha Kecil**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Capaian
1	Terlaksananya Fasilitas Kemitraan Dan Perizinan Usaha, Serta Tersedianya Basis Data Usaha Kecil	Persentase usaha kecil yang bermitra	0,22%	0,07%
		Persentase usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas perizinan usaha	1,12%	1,13%
		Persentase usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	1,32%	1,85%

	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembangunan Kemitraan Dan Perizinan	jumlah usaha kecil yang bermitra	50 Lap	50 Lap
		Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi perizinan usaha	50 Lap	70 Lap
		Jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	50 Lap	1000 Lap
<b>2</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Bagi Usaha Kecil</b>	<b>Persentase usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</b>	<b>1,34%</b>	<b>1,45%</b>
	Terlaksananya Keikiutsertaan Usaha Kecil Pada Even Pameran	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	300 Lap	320 Lap

Jumlah capaian indikator pendukung pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil Tahun 2022

#### 1) Indikator Keberhasilan

Jumlah capaian indikator pendukung pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil khususnya bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha kecil dalam rencana kerja tahun anggaran 2022 melaksanakan 2 Program yakni Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dengan target yang ingin di capai sesuai dengan Rencana strategis (Renstra) yang telah di tetapkan, capaian tersebut dapat di ukur berdasarkan indicator kinerja utama adalah sebagai berikut

1. Presentase Usaha Kecil yang bermitra
2. Presentase Usaha Kecil yang di berikan dukungan fasilitasi Perizinan Usaha
3. Presentase Usaha Kecil yang di infut ke dalam Sistem Online Data Sistrem
4. Presentase Usaha Kecil yang di berikan dukungan fasilitasi pemasaran
5. Presentase usaha kecil yang mendapatkan pendampingan presentase usaha kecil yang naik kelas Jumlah usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran

Berdasarkan indikator utama tersebut diatas maka capaiannya bisa terlihat dalam tabel 1.1 jumlah capaian indikator kolom (5), secara umum bahwa hasil pencapaian yang telah dilaksanakan



melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

Indikator keberhasilan dalam pencapaian target tersebut diatas salah satunya karena didukung oleh kerjasama antara Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten/dalam dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembinaan baik melalui pendampingan dan fasilitasi maupun dalam pelaksanaan Bimbingan teknis (bimtek) melalui pengiriman peserta untuk mengikuti kegiatan,

**Tabel 1.4**

**Jumlah Capaian Indikator Pendukung Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Tahun 2022**

**Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan**

No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Capaian
1	<b>Terlaksananya Fasilitasi Pelatihan Bagi Usaha Kecil</b>	<b>Persentase usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</b>	<b>1,57%</b>	<b>1,47%</b>
	* Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha Kecil	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	350 Lap	

**Tabel 1.5**

**Jumlah Capaian Indikator Pendukung Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Tahun 2022**

**Seksi Pengembangan, Penguatan & Perlindungan Usaha Kecil**

No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Capaian
1	<b>Terlaksananya Fasilitasi Pembiayaan, Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha</b>	<b>Persentase Usaha Kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi Pembiayaan</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,49%</b>
		<b>Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha</b>	<b>0,72%</b>	<b>2,2%</b>
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembangunan Pembiayaan Dan	Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi Pembiayaan	150 Lap	160 Lap

	Pendampingan Kelembagaan	Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	160 Lap	160 Lap
<b>2</b>	<b>Terlaksananya Fisilitasi Standarisasi Dan Sertifikasi Produk</b>	<b>Persentase usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk</b>	<b>6,7%</b>	<b>0,35%</b>
	* Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Produk UKM	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk	100 Lap	95 Lap

Jumlah Capaian Indikator Pendukung Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Tahun 2022

#### 1. Indikator Keberhasilan

Berdasarkan hasil kegiatan/maupun sub kegiatan untuk indikator pendukung Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha kecil yang telah tercapai dalam pelaksanaan Tahun 2022 dari indikator Program:

Jumlah Usaha Kecil yang bermitra,

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 bahwa jumlah atau target usaha kecil yang bermitra telah di capai sejumlah 55 unit, jumlah ini di dapatkan dari kegiatan/sub pendampingan yang telah dilakukan oleh bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil melalui kerja oleh konsultan atau pendamping Pusat Layanan Usaha Terpadu K-UMKM, untuk mendapatkan indikator Usaha kecil yang di mitrakan itu terwujud melalui kerjasama yang di bangun antara usaha Menengah dengan Usaha kecil dan kemitraan antara instansi terkait, salah satu kegiatannya adalah membangun program kolaborasi antar instansi dengan para pelaku usaha melalui kerjasama yang di bangun oleh Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam hal kemudahan pagi para pelaku Usaha UMKM untuk mendapatkan layanan legalitas antara lain, pengurusan legalitas izin edara sebuah produk, kerjasama ini merupakan komitmen antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Balai Penelitian Obat dan makanan kota palu, salah satu kemudahan yang di dapatkan dari kerjasama ini adalah para pelaku UMKM akan mendapatkan keringanan pembiayaan berupa pengurangan

sebesar 50 persen dari biaya reguler dalam pengurusan izin edar produk

Indikator keberhasilan dalam pencapaian target tersebut diatas salah satunya karena didukung oleh kerjasama antara Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten/dalam dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembinaan baik melalui pendampingan dan fasilitasi maupun dalam pelaksanaan Bimbingan teknis (bimtek) melalui pengiriman peserta untuk mengikuti kegiatan.

o **Perkembangan  
UPT. Balai  
Pelatihan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diberikan kewenangan melaksanakan tugas kediklatan sesuai tugas pokok dengan memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana lain yang dimiliki. Perkembangan UPT Diklat tahun 2022 :

1. Sarana dan Prasarana

**Tabel 0.3  
Sarana dan Prasarana UPT. Balai Pelatihan Tahun 2022**

No	Jenis Sarana	2021		2022	
		Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor	1	Baik	1	Baik
2.	Asrama	8	Baik	8	Baik
	Bantal			48	Baik
	Guling			48	Baik
	Kasur			48	Baik
	Tempat Tidur			24	Baik
	Seprei Kasur			48	Baik
3.	Kendaraan Dinas (motor)	6	Baik	6	Baik

4.	Laptop	7 Buah	1 Rusak Berat 1 Rusak Ringan 5 Baik	9 Buah	1 Rusak Berat 1 Rusak Ringan 7 Baik
5.	Komputer			5 unit	5 Baik 1 Rusak Berat
6.	Printer			6 unit	Baik
7.	Infokus	2 Buah	2 Baik	2 Buah	2 Baik
8.	Kamera digital	2 Buah	1 Rusak Berat 1 Baik	2 Buah	1 Rusak Berat 1 Baik
9.	Genset	1	Rusak Ringan	1	Rusak Berat
10.	AC	22 Buah	20 Baik, 1 Hilang, 1 Rusak Berat	22 Buah	20 Baik, 1 Hilang, 1 Rusak Berat
11.	UPS			3 Buah	2 Baik 1 Rusak Ringan
12.	Meja Makan			10 Buah	7 Baik 3 Rusak Ringan
13.	Meja Kerja			14 Buah	11 Baik 3 Rusak Ringan
14.	Meja Belajar	48 Buah	Kondisi Baik	48 Buah	Kondisi Baik
15.	Lemari arsip			6 Buah	Baik
16.	Lemari asrama			9 Buah	9 Rusak Ringan
17.	Kursi Belajar	90 Buah	Kondisi Baik	90 Buah	Kondisi Baik
18.	Kursi Makan			47 Buah	40 Baik 7 Rusak Ringan
19.	Meja Dapur			1 Buah	Baik
20.	Layar Infokus			3 Buah	1 Baik 1 Rusak Ringan 1 Rusak Berat
21.	Televisi			3 Buah	Baik
22.	Mobil dinas	1 Buah	Kondisi Baik	1 Buah	Kondisi Baik
23.	Dispencer	5 Buah	4 Rusak, 1 Baik	5 Buah	4 Rusak, 1 Baik
24.	Tandon Air			2 Buah	Baik

Sumber: UPT. Balai Pelatihan

Melihat kondisi sarana dan prasarana diklat pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 melakukan beberapa penambahan sarana

elektronik, akan tetapi masih sangat kurang memadai. banyak sarana yang kondisinya rusak ringan dan rusak berat sehingga memerlukan perbaikan dan bila perlu dilakukan pemeliharaan ataupun penggantian. Hal tersebut akan menjadi prioritas anggaran di tahun mendatang.

## 2. Peserta Diklat

**Tabel 0.4**  
**Peserta dan Angkatan Diklat Periode 2018-2022**

No	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Orang	1.060	1.420	890	925	763
2	Angkatan diklat	27	36	33	32	26

Sumber: UPT. Balai Pelatihan

Kondisi pada table di atas menunjukkan kondisi penurunan jumlah angkatan diklat dari 32 angkatan diklat pada tahun 2021 menjadi 26 angkatan diklat tahun 2022 berbanding terbalik dengan jumlah peserta diklat yang sebelumnya berjumlah 925 orang dan pada tahun 2022 berjumlah 763 orang sehingga terdapat peningkatan pada jumlah pesereta diklat pada tahun 2022 berkurang sebanyak 12 orang.

### Indikator Keberhasilan

Pada tahun anggaran 2022, UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.701.905.250,- terdiri dari APBD sebesar Rp. 285.341.250 dan DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp. 2.416.564.000,- yang diperuntukan bagi kegiatan pelatihan sebesar Rp. 1.757.800.000 dengan target jumlah peserta sebanyak 517 orang, kegiatan sosialisasi bantuan hukum bagi usaha mikro dan kecil sebesar Rp. 394.764.000,- dan anggaran pendampingan sebesar Rp. 264.00.000,- . Untuk itu telah dilaksanakan 26 angkatan pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 763 orang, 6 kali

kegiatan sosialisasi dengan jumlah peserta sebanyak 297 orang, dan kegiatan pendampingan oleh 8 orang tenaga pendamping, dengan realisasi anggaran sebesar *Rp. 2.023.917.924* atau *83,75%*.

#### Indikator Penghambat

Meskipun pelatihan yang targetkan dapat dilaksanakan seluruhnya (26 angkatan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022), dengan jumlah peserta melebihi target yang ditetapkan (target 517 orang, realisasi 763 orang), akan tetapi ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan kegiatan tersebut, antara lain: masih adanya peningkatan kualitas SDM pelaku koperasi dan UMK yang belum tepat sasaran disebabkan karena belum berbasis data yang valid/akurat; 2). masih adanya ego sektoral diantara stakeholder pembina, sehingga calon peserta yang ditugaskan mengikuti pelatihan kadangkala tidak sesuai dengan target kebutuhan dan sasaran peserta; 3). Belum optimalnya kinerja tenaga pendamping peserta pelatihan, pada saat proses identifikasi maupun pendampingan pasca pelatihan.

#### o **Realisasi**

#### **Penerimaan**

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 s.d 2022 Perkembangan Sumber Penerimaan PAD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 0.5**  
**Penerimaan PAD UPT-Diklat Periode 2018-2022**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1.	2018	100.000.000	117.910.000	117,91
2.	2019	160.750.000	265.672.433	165,27
3.	2020	163.000.000	25.177.230,58	15,29
4.	2021	33.000.000	3.310.000	10,03

5.	2022	33.000.000	8.040.000	26,80
----	------	------------	-----------	-------

Sumber: UPT. Balai Pelatihan

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan PAD pada Tahun 2022 realisasi penerimaan PAD atas pemakaian kekayaan daerah sangat berkurang dibandingkan tahun anggaran sebelumnya disebabkan karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat akibat pandemi covid 19. Capaian PAD tahun anggaran 2021 sebesar 8.040.000., atau 26,80% dari angka yang ditargetkan.

## 2.5 PERJANJIAN KINERJA;

### a. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/SKPD yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab / kinerja. Penetapan kinerja 2022 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Penetapan kinerja tahun 2022 adalah penjabaran lebih lanjut dari Revisi rencana strategi 2021 – 2026 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Target Indikator kinerja sebagaimana sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 mengacu pada target pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang telah diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Kepala Daerah serta merujuk pada penyesuaian target sebagaimana RPJMD dan dokumen turunannya RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra) yang disusun dalam rangka menjabarkan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Penetapan kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktifitas operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sepenuhnya dapat dirujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022 ini. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah atau dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu instansi pemerintah yang bersangkutan.

Lebih lanjut penetapan kinerja merupakan sebuah bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang di dalamnya memuat rumusan indikator kinerja **inputs, outputs dan outcomes** beserta targetnya dari seluruh kegiatan dan program.

Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

## **b. Perjanjian Kinerja**

### **1. Kepala Dinas**

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target IKU
----	-----------------	-------------------------	------------

1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	5,77%
2	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	5,77%
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas Kop dan UKM Prov. Sulteng)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60.00 Indeks

## 2. Sekertaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Meningkatnya Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60 index

## 3. Sub Bagian Program Keuangan dan Aset

No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
1	<b>Terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menenga Provinsu Sulawesi Tengah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>73 Nilai</b>
	* Tersediannya Renja Tahun 2023 Dan Perubahan Renja Tahun 2022	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dok
	* Tersediannya RKA Tahun Anggaran 2023 Dan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2022	Jumlah dokumen RKA	2 Dok
	* Tersediannya DPA Tahun Anggaran 2023 Dan DPPA Tahun Anggaran 2022	Jumlah dokumen DPA	2 Dok
	* Tersedianya LKjIP Tahun 2021	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	1 Dok
	* Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1 Dok
2	<b>Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menenga Provinsu Sulawesi Tengah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	<b>96%</b>
	* Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	Jumlah laporan pembayaran gaji	1 Lap

	* Terbayarnya gaji tenaga kontrak (Non PNS)	Jumlah laporan Administrasi	1 Lap
	* Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap
	* Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	1 Dok
	* Tersusunnya Laporan Prognosis Anggaran SKPD	Jumlah laporan prognosis	1 Lap
<b>3</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menenga Provinsu Sulawesi Tengah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>5 Lap</b>
	* Tersusunnya RKBMD SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	1 Lap
	* Terlaksannya Pengamanan BMD SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap
	* Terlaksannya Koordinasi Dan Laporan BMD SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap
	* Tersusunnya Laporan BMD SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	1 Lap
	* Terlaksananya Penatausahaan BMD SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Lap

#### 4. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
<b>1</b>	<b>Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>3 Lap</b>
	* Terlaksananya Koordinasi Dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian SKPD	Jumlah laporan data pegawai	1 Lap
	* Terlaksananya Diklat PNS	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	1 Lap
	* Terlaksananya Bimbingan Teknis PNS	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1 Lap
<b>2</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Barang Dan Jasa Dinas Keperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>5 Lap</b>
	* Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 Lap
	* Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 Lap

	* Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	1 Lap
	* Terfasilitasinya Kunjungan Tamu Kedinasan	Jumlah paket pengadaan	1 Lap
	* Terlaksananya Konsultasi dan Kepegawaian	Jumlah Laporan	1 Lap
<b>3</b>	<b>Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Dinas Keperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Dok</b>
	* Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa	1 Dok
	* Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa	1 Dok
	* Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	1 Dok
<b>4</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Aset Penunjang Dinas Keperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Dok</b>
	* Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Jasa	1 Dok
	* Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Dok

#### 5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Meningkatnya Layanan Perizinan Koperasi Simpan Pinjam	Persentase Penerbitan Izin usaha KSP (Kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas)	13%
2	Meningkatnya Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	5,75%
		Persentase Koperasi Berkualitas	5,77%
3	Meningkatnya Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP	Persentase Koperasi Sehat	13%

#### 6. Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan

No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Program	Target
<b>1</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi</b>	<b>Jumlah izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>	<b>5 Lap</b>
	* Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	5 Lap

2	<b>Terlaksananya Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam Koperasi</b>	<b>Jumlah fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>	5 Lap
	Terlaksananya Pendampingan, * Pembinaan dan Pemberdayaan Legalitas Koperasi	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3 Lap
	* Tersedianya Data OSS	Jumlah Perizinan usaha Koperasi yang Terintegrasi Secara Elektronik	8 Lap

## 7. Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan

No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
1	<b>Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi</b>	<b>Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>	<b>10 Lap</b>
		<b>Peningkatan jumlah anggota koperasi</b>	<b>100 Org</b>
	* Terlaksananya Pendampingan, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang meningkat Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Lap
	* Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan RAT Koperasi Sekunde/Primer Provinsi	Jumlah tindak lanjut Laporan hasil pemeriksaan rekomendasi kepada pengurus koperasi dan penerapan sanksi koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	14 Lap
2	<b>Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam</b>	<b>Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>4 Lap</b>

	<p>Terlaksananya * Penanganan KSP/USP Bermasalah</p>	<p>Jumlah KSP/USP yang meningkat Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>	<p>4 Lap</p>
--	--	--	--------------

### 8. Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan & Penilaian Kesehatan KSP/USP

No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
1	Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	20 Lap
	Terlaksananya Peneilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	20 Lap
	Terlaksananya Pemeringkatan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	20 Lap

### 9. Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase Jumlah Pengurus Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	0,67%
2	Meningkatnya Cakupan Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Kopersi	Persentase Koperasi Modern	2,30%
		Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Pelaku usaha lainnya	20%
		Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	1,15%
		Persentase Tenaga Kerja terserap	3,45%

### 10. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Koperasi	Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,7%
		Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	20%

		<b>Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>	<b>3%</b>
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengurus/Anggota	Jumlah Pengurus, Pengawas dan anggota koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	480 Orang

### 11. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan & Perlindungan Usaha Koperasi

No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Dan Akses Pembiayaan Bagi Koperasi	<b>Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>	<b>1,15%</b>
		<b>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>	<b>3,45%</b>
	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Mutu Produk Koperasi	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Lap
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	3 Lap

### 12. Kepala Seksi Fasilitas Usaha Koperasi

No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Dan Pemdampingan Kelembagaan Bagi Koperasi	<b>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu)daerah provinsi</b>	<b>2,3%</b>
		<b>Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi</b>	<b>20%</b>



	Terlaksananya Program Kerja PPKL Dan Temu Kemitraan Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Lap
		Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi dan usaha	3 Lap

### 13. Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Usaha Kecil

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Meningkatnya Kualitas Kewirausahaan	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	0,18%
		Persentase Produk Usaha Kecil yang meningkat Kualitas	3%
		Persentase Usaha Kecil yang mendapat fasilitasi	5%
		Persentase Usaha Kecil yang mendapat Pendampingan	2,29%
		Persentase Usaha Kecil yang naik kelas	1,57%
2	Meningkatnya Fasilitasi Dan Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	6,70%

### 14. Kepala Seksi Fasilitas Usaha Kecil

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Dan Perizinan Usaha, Serta Tersedianya Basis Data Usaha Kecil	<b>Persentase usaha kecil yang bermitra</b>	<b>0,22%</b>
		<b>Persentase usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi perizinan usaha</b>	<b>1,12%</b>
		<b>Persentase usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)</b>	<b>1,32%</b>
		jumlah usaha kecil yang bermitra	50 Lap

	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembangunan Kemitraan Dan Perizinan	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi perizinan usaha	50 Lap
		Jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	50 Lap
<b>2</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Bagi Usaha Kecil</b>	<b>Persentase usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</b>	<b>1,34%</b>
	Terlaksananya Keikutsertaan Usaha Kecil Pada Even Pameran	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	300 Lap

#### 15. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
<b>1</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi Pelatihan Bagi Usaha Kecil</b>	<b>Persentase usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</b>	<b>1,57%</b>
	* Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha Kecil	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	350 Lap

#### 16. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan & Perlindungan Usaha Kecil

No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
<b>1</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi Pembiayaan, Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha</b>	<b>Persentase Usaha Kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi Pembiayaan</b>	<b>0,67%</b>
		<b>Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha</b>	<b>0,72%</b>
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembangunan Pembiayaan Dan Pendampingan Kelembagaan	Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi Pembiayaan	150 Lap
		Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	160 Lap
<b>2</b>	<b>Terlaksananya Fisilitasi Standarisasi Dan Sertifikasi Produk</b>	<b>Persentase usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk</b>	<b>6,7%</b>

	Terlaksananya Bimbingan * Teknis Peningkatan Mutu Produk UKM	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk	100 Lap

### 17. Kepala UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Meningkatnya Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60 index
2	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase Jumlah Pengurus/Anggota Koperasi yang mengikuti Pelatihan	0,67%
3	Meningkatnya Fasilitasi Dan Pengembangan Usaha Kecil	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	0,18%
		Persentase Produk Usaha Kecil yang meningkat Kualitas	3%
		Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	6,70%
		Persentase Usaha Kecil yang naik kelas	1,57%

### 18. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
1	<b>Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Dinas Keperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>5 Lap</b>
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket pengadaan	1 Dok
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 Dok
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	1 Dok
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	1 Dok
	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	1 Lap
2	<b>Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Dinas Keperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Dok</b>

	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Dok
<b>3</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Aset Penunjang Dinas Keperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Dok</b>
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Jasa	1 Dok
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya dipelihara	1 Dok
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Dok

### 19. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pelatihan

No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Koperasi	Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	<b>0,7%</b>
		Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	<b>20%</b>
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	<b>3%</b>
	Terfasilitasinya Diklat Koperasi	Jumlah Angkatan Diklat	13 Angkatan
2	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan UMKM	Persentase usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	<b>1,57%</b>
	Terfasilitasinya Diklat UMKM	Jumlah Angkatan Diklat	14 Angkatan

## 20. Kepala Sub Bagian Kurikulum dan Silabi

No	Sasaran Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
1	Tersusunnya Modul Pelatihan Koperasi	Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,7%
		Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	20%
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	3%
	Tersedianya Modul Pelatihan Koperasi	Jumlah Modul	13 Kursil
2	Tersusunnya Modul Pelatihan UMKM	Persentase usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1,57%
		Tersedianya Modul Pelatihan UMKM	Jumlah Modul

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 tahun 2010 dimana ditetapkan indikator kinerja yaitu input (masukan) output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak). Namun demikian pada tahun yang bersangkutan belum seluruhnya dapat diukur khususnya indikator benefit dan impact. Pengukuran kedua indikator tersebut tidak dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, tetapi akan sangat erat hubungannya dengan kegiatan lainnya, dan dalam implementasinya masih membutuhkan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh sub sistem-sub sistem.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tahun 2022, sudah sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh stakeholder (Masyarakat). Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan seluruhnya pada tingkat outcome (hasil).

Pada tahun 2022, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah mencoba mengukur capaian kinerja untuk semua kegiatan/program yang sumber dananya dari APBD dan APBN berupa belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal lainnya.

### **3.1 CAPAIAN KINERJA;**

#### **3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja adalah evaluasi dan analisis kinerja yang dicapai dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan berdasarkan dengan Formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dengan realisasi capaian target yang tercantum dalam Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan), di mana dalam hal ini indikator yang digunakan adalah indikator kinerja berdasarkan indikator outcome (hasil) sesuai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2021-2026 untuk mengukur kinerja sasaran dinyatakan dalam bentuk jumlah kuantitatif yang

menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai dari setiap indikator di antaranya jumlah perusahaan, jumlah orang, persentase peningkatan, jumlah kabupaten/kota dan sebagainya.

Kesimpulan dari hasil evaluasi tersebut di atas dapat diperoleh dengan menggunakan skala pengukuran kinerja dalam hal ini skala pengukuran ordinal yaitu :

- a) 85 – 100 = Sangat baik atau Sangat berhasil
- b) 70 – 84 = Baik atau Berhasil
- c) 55 – 69 = Sedang atau Cukup berhasil
- d) < 55 = Kurang Baik atau Tidak berhasil

Secara umum, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Hal ini tercermin dalam Indikator Kinerja Utama, dari 3 sasaran yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam 4 indikator. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran indikator keberhasilannya berdasarkan indikator kinerja yang termaktub dalam RENSTRA tahun 2021-2026. Hal ini terlihat dari capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome.

Hasil analisis capaian berdasarkan sasaran strategik dapat diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1**  
**Meningkatnya Kualitas Koperasi**

Indikator keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi dengan target dan realisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 0.1**  
**Indikator Kinerja Sasaran-1 Meningkatnya Kualitas Koperasi**

No	Indikator Program	2022		
		Target	Capaian	%
1.	Persentase Koperasi Berkualitas	5,77%	7,25%	126
2.	Persentase Penerbitan Izin	13%	15,79%	121



	usaha KSP (Kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas)			
3.	Persentase Koperasi Aktif	5,75%	8,65%	150
4.	Persentase Koperasi Sehat	52,63%	33,33%	63,33
5.	Persentase Jumlah Pengurus/Anggota Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	0,67%	0,56%	83,58
6.	Persentase Koperasi Modern	2,30%	1,67%	72,61
7.	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Pelaku usaha lainnya	20%	5%	25
8.	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	10%	22,74%	224,7
9.	Persentase Tenaga Kerja terserap	3,45%	5,08%	147,25
	<b>Nilai Rata-rata</b>			<b>112,62</b>

Dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran sebesar 112,62%. Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja ordinal menunjukkan capaian sasaran berada pada 85-100% dengan hasil *Sangat baik atau Sangat Berhasil*, maka berdasarkan Prosentase capaian maka Sasaran -1 memperoleh Penilaian hasil **Sangat baik atau Sangat berhasil**.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022 telah berupaya melaksanakan indikator kinerja sasaran-1, di atas melalui 7 (tujuh) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pengawasan dan Pemeriksaan Penilaian Kesehatan Koperasi

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

## **Sasaran 2** **Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha**

Indikator keberhasilan sasaran Meningkatkan Usaha Kecil Menjadi Wirausaha dengan target dan realisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 0.2**  
**Indikator Kinerja Sasaran-2 Meningkatkan Usaha Kecil Menjadi Wirausaha**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1	Persentase Usaha Kecil Menjadi wirausaha	5,77%	6,24%	108,15
2	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	0,18%	0,12%	66,67
	Persentase Produk Usaha Kecil yang meningkat Kualitas	3%	0,35%	11,67

	Persentase Usaha Kecil yang mendapat fasilitasi	5%	3,2%	64
	Persentase Usaha Kecil yang mendapat Pendampingan	2,29%	2,2%	96,07
	Persentase Usaha Kecil yang naik kelas	1,57%	0,0046%	0,29
3	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1,34%	1,45%	108,21
	Nilai Rata-rata			<b>65,01</b>

Dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian Rata-rata sasaran sebesar 65,01%. Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja ordinal menunjukkan capaian sasaran berada pada pada 55-69% dengan hasil ***Sedang atau Cukup Berhasil***,

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022 telah berupaya melaksanakan indikator kinerja sasaran -2 di atas melalui 4 (empat) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- A. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
- B. Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

### **Sasaran 3 Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah)**

Indikator keberhasilan sasaran Meningkatkan Produktifitas Koperasi dengan target dan realisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 0.3  
Indikator Kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas Kop dan UKM Prov. Sulteng)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.		Indeks	62,00	50,61	81,63

2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	73	71,76	98,30
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80	81,86	102,33
<b>Rata-rata</b>					<b>94,09</b>

Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja ordinal menunjukkan capaian sasaran berada pada 85-100% dengan hasil *Sangat baik atau Sangat Berhasil*, maka berdasarkan Prosentase capaian maka Sasaran -3 memperoleh Penilaian hasil **Sangat baik atau Sangat berhasil**. Maka dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran sebesar 94,09%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran -3 dinilai **Sangat baik atau Sangat berhasil**.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022 telah berupaya melaksanakan indikator kinerja sasaran -3 di atas melalui 7 (tujuh) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### **Meningkatnya Pemahaman Dan Kemampuan Teknis Manajemen Bagi Pelaku Usaha**

Indikator keberhasilan sasaran Meningkatkan Pemahaman dan Kemampuan Teknis manajemen bagi

pelaku usaha dengan target dan realisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 0.4**  
**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pelatihan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah diklat yang dilaksanakan	Angkatan	27	26	96,30
	<b>Jumlah</b>				<b>96,30</b>

Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja ordinal untuk capaian sasaran berada di antara 85 – 100 % dengan hasil Sangat baik atau Sangat berhasil. Maka dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran mencapai 96,30%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Penyelenggaraan Pelatihan dinilai **Sangat baik atau Sangat berhasil.**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022 melalui UPT Pelatihan telah berupaya melaksanakan indikator kinerja 2 (dua) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2. Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

### **3.1.2 Analisis Perbandingan Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022**

Berdasarkan penyajian hasil kinerja di atas juga dipandang perlu menyajikan perbandingan kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksana program kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

## 1. Perbandingan Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dikandung maksud untuk memberikan gambaran seberapa besar keberhasilan dan kekurangan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 0.5**  
**Analisis Perbandingan Kinerja Tahun 2021-2022**

No	Jenis Kinerja	Satuan	2021	2022	Perkembangan
1.	Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas Kop dan UKM Prov. Sulteng)	D. Indeks E. % F. Indeks	- - -	G. 50,61 H. 71,76 I.81,86	-
2.	Keuangan	%	87,70	94,96	
3.	Kinerja Kegiatan pada tataran output	%	100	100	100
3.	Kinerja Pencapaian sasaran pada tataran outcome	Sangat baik/Sangat berhasil	4 Sangat Baik 1 Sedang 2 Kurang Baik	2 Sangat Baik, 1 Sedang atau Cukup Baik	-
4.	Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi				
	Sektor Koperasi/UPT Diklat				
	- Jumlah Koperasi	Unit	2.193	2.243	102,28
	- Anggota Koperasi	Orang	276.222	259.964	-
	- Koperasi Aktif	%	15	8,65	57,67
	- Koperasi Tidak Aktif	Unit	977	1.052	107,68
	- Koperasi Berkualitas	%	26,6	7,25	27,26
	- Persentase Penerbitan Usaha KSP (Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas	%	-	15,79	-
	- Koperasi Sehat	Unit	12	33,33%	-
	- Koperasi Tumbuh	%	9,13	-	-
	- Peningkatan Kerjasama Dengan Pelaku Usaha lainnya**	Unit	-	5%	-
	- Jumlah Tenaga Kerja terserap**	%	8	5,08%	63,50
	- Peningkatan Volume Usaha Koperasi terhadap koperasi berkualitas**	%	25	22,74%	90,96
	- Modal Koperasi	Juta	298.481	345.755	115,84
	- Volume Usaha	Juta	237.091	365.694	154,24
	- SHU	Juta	4.203.121	6.556.324	155,99
		%		0,56	

	- Persentase Jumlah Pengurus/ Anggota Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	%		1,67	
	- Persentase Koperasi Modern	Rp. Anggaran	3.310.000 32	- 26	81,25
	- PAD Diklat				
	- Angkatan Diklat				
6.	Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha				
	Jumlah Usaha Kecil yang naik Kelas	Unit/ Usaha	2	-	
	Jumlah Usaha Kecil Yang mendapat Fasilitas	Unit/ Usaha	708	3,2%	
	Jumlah Usaha Kecil Yang Mendapat Pendampingan	Unit/ Usaha	208	2,2%	
	Jumlah Produk Usaha Kecil Yang Meningkatkan Kualitasnya	Unit/ Usaha	97	0,35	
	Persentase Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	%	-	6,24	
	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	-	0,12	
	Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas	%	-	0,0064	
	Persentase Usaha Kecil yang diberikan dukungan Fasilitas Pemasaran	%	-	1,45	

A. Tahun 2022 terdapat 3 indikator sasaran ,berdasar kriteria penilaian, 2 (dua) indikator mendapat Sangat Baik atau Sangat berhasil dan 1(satu) indikator mendapat kriteria sedang atau cukup berhasil, sementara tahun 2021 terdapat 7 indikator sasaran ,berdasar kriteria penilaian, 4 (empat) indikator mendapat Sangat Baik atau Sangat berhasil , 1 (satu) indikator mendapat kriteria sedang atau cukup berhasil dan 2 (dua) indikator mendapat kriteria kurang baik atau kurang berhasil.

Berdasarkan perbandingan kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian indikator tidak dapat dibandingkan dikarenakan adanya perbedaan indikator antara Renstra Priode 2016-2021 dengan Renstra Priode 2021-2026. Sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Realisasi kinerja atas pemanfaatan anggaran mengalami Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran sebesar -3,87% dengan serapan dari tahun 2021 sebesar 87,70% menjadi 94,96% di tahun 2022 anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mencapai indikator keluaran (output) dengan realisasi fisik kinerja output sebesar 100%. Selanjutnya output tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil atau outcome dengan jumlah indikator sasaran dengan kriteria indikator Sangat baik atau Sangat berhasil adalah sebanyak 2 indikator Kinerja dan 1 (satu) indikator sasaran memperoleh kriteria Sedang atau Cukup Berhasil.
2. Secara pencapaian target Sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 dengan Indikator Kinerja Koperasi Berkualitas dengan pencapaian yaitu 7,25% Koperasi berkualitas, dengan target sebesar 5,77%, Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi tidak lepas dari pencapaian sasaran Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Koperasi dengan indikator-indikator pendukungnya yaitu Persentase Penerbitan Izin Usaha KSP (Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor kas sebesar 15,79%, Persentase Koperasi Aktif sebesar 8,65%, Persentase Koperasi Sehat sebesar 33,33%, Persentase Jumlah Pengurus /Anggota Koperasi yang Mengikuti Pelatihan sebesar 0,56%, Persentase Koperasi Modern sebesar 1,67%, Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Pelaku usaha lainnya sebesar 5%, Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi sebesar 22,74% dan Persentase Tenaga Kerja Terserap Sebesar 5,08%.

Pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

- A. Selisih Hasil Usaha (SHU) di tahun 2022 mengalami Kenaikan sebesar 2.353.203 menjadi 6.556.324.000 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 4.203.121.
- B. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas melalui Program Pelayanan Izin Usaha simpan Pinjam, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Program Penilaian Kesehatan Koperasi berdampak pada aktifnya koperasi yang sebelumnya tidak aktif, kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Penilaian Kesehatan Koperasi berdampak pada peningkatan Unit Koperasi dengan setelah dilakukan tahap penilaian dapat dikualifikasikan menjadi koperasi sehat, Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Koperasi melalui kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang berdampak pada kesadaran masyarakat untuk berkoperasi dan berhasil menumbuhkan koperasi baru. Akan tetapi dari dampak pandemi Covid - 19 mengakibatkan pengurangan produksi sehingga menyebabkan turunnya angka produksi.
- C. Komitmen dan kerjasama yang baik oleh Para pejabat maupun para staf OPD untuk memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Penurunan Kinerja dari Tahun sebelumnya dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain:

1. Pemahaman masyarakat tentang berkoperasi belum maksimal.
2. Sebaran koperasi di Sulawesi Tengah yang terlalu luas, sehingga membutuhkan sumber daya yang cukup besar dalam rangka

melakukan pemeringkatan bagi koperasi berkualitas.

3. Belum semuanya output yang telah dicapai pada realisasi kegiatan (100%) dapat menunjang pencapaian hasil pada tataran outcome tersebut.
4. Pelaksanaan program belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya baik dalam hal kompetensi aparat maupun pelaku usaha
5. Dampak dari adanya menurunnya perekonomian akibat situasi pandemic covid 19 dari semenjak pertengahan tahun 2020 sampai dengan sekarang
6. Akibat Pandemi tersebut terjadi kebijakan fokus alokasi anggaran Pemerintah daerah yang menyebabkan sebagian alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya target indikator tersebut dialihkan ke penanganan dampak pandemi covid 19.
7. Pagu indikatif untuk mendukung tercapainya target kinerja sebagaimana yg ditetapkan pada Renstra 2021-2026 tidak sesuai yang direncanakan.
8. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas melalui Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang dilakukan melalui sosialisasi, dan Magang, Pameran dan Promosi Produk yang berdampak pada terjadinya perjanjian kerjasama (MOU) antara Koperasi dengan Pihak lain.
9. Komitmen dan kerjasama yang baik oleh Para pejabat maupun para staf OPD untuk memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan

Khusus Program Pendidikan dan Latihan Koperasi dan melalui upaya Pelatihan, bimtek maupun Sosialisasi yang direncanakan berdampak pada peningkatan kapasitas SDM maupun jumlah pengurus maupun anggota Koperasi dalam wawasan dan keterampilan, penataan sarana usaha koperasi justru mengalami penurunan kinerja akibat banyak diberlakukannya PHK pada para karyawan dampak situasi pandemic covid 19 dari semenjak pertengahan tahun 2020 sampai dengan sekarang. Akan tetapi pada tahun 2022 sudah mengalami perubahan yang signifikan diakibatkan adanya bantuan dan stimulan yang diberikan oleh Pemerintah dari berbagai sektor. Salah satunya adalah Sektor Koperasi dan UMKM melalui Program Kegiatan yang menyentuh langsung terhadap pelaku usaha dan Koperasi yang mengalami dampak Pandemi Covid-19 yaitu kegiatan penyelenggaraan Pelatihan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan di Balai Pelatihan atau dilaksanakan langsung di Kabupaten Kota berdasarkan kebutuhan masing-masing.

Penurunan Kinerja dari Tahun sebelumnya dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain:

1. Belum semuanya output yang telah dicapai pada realisasi kegiatan (100%) dapat menunjang pencapaian hasil pada tataran outcome tersebut.
2. Pelaksanaan program belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya baik dalam hal kompetensi aparat maupun pelaku usaha

3. Akibat Pandemi tersebut terjadi kebijakan fokus alokasi anggaran Pemerintah daerah yang menyebabkan sebagian alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya target indikator tersebut dialihkan ke penanganan dampak pandemi covid 19.
  4. Pagu indikatif untuk mendukung tercapainya target kinerja sebagaimana yg ditetapkan pada Renstra 2021-2022 tidak sesuai yang direncanakan
3. Pada tahun 2022 sasaran Meningkatnya Usaha Kecil untuk menjadi Wirausaha untuk indikator Persentase Usaha Kecil Menjadi Wirausaha melebihi dari target yang telah diberikan yaitu dengan target 5,77% dan pencapaian sebesar 6,24%. Indikator keberhasilan dalam pencapaian target tersebut salah satunya karena didukung oleh kerjasama antara Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembinaan baik melalui pendampingan dan fasilitasi maupun dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) melalui pengiriman peserta untuk mengikuti kegiatan. Adapun pencapaiannya didukung pula dari pencapaian Meningkatnya Kinerja UKM dalam aktifitas Ekonomi dengan indikator kinerja Persentase pertumbuhan wirausaha baru dengan target 0,18% dan capaian sebesar 0,12%, Persentase Produk Usaha Kecil yang Meningkatkan Kualitas Produknya dengan target 3% dan capaian 0,35%, Persentase Usaha Kecil yang Mendapat Fasilitasi dengan target 5% dan capaian sebesar 3,2%, Indikator Persentase Usaha Kecil yang Mendapat Pendampingan dengan target 2,29% dan capaian sebesar 2,2%, Indikator Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas dengan target 1,57% dan capaian sebesar 0,0046% dan Persentase Usaha Kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi Pemasaran. Dengan target 1,34% dan capaian sebesar 1,45%.

Keberhasilan Pencapaian kinerja pada tersebut dipengaruhi beberapa factor antara lain :

1. Upaya Pembinaan melalui Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM lewat pengembangan kewirausahaan, pelatihan manajemen, maupun vokasi, peningkatan kualitas produknya, maupun perluasan pemasarannya dengan tetap mengarahkan Upaya standarisasi/sertifikasi produk, inovasi produk dan juga dalam hal memfasilitasi promosi UKM dengan mitra lain serta melakukan Konsultasi dan Edukasi terhadap Pelaku Usaha Melalui Konsulten PLUT KUMKM yaitu Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Komitmen dan kerjasama yang baik oleh Para pejabat maupun para staf OPD untuk memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan

Khusus indikator kinerja Persentase Usaha Kecil Yang Mendapat Pendampingan yang direncanakan berdampak pada meningkatnya Jumlah Usaha Kecil Yang Mendapat Pendampingan mengalami peningkatan kinerja walaupun terbatasnya ruang gerak pembinaan UKM oleh OPD dikarenakan adanya perubahan Regulasi tentang Izin Usaha Mikro Kecil dari PP Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil menjadi PP NOMOR 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. pada Jumlah Produk Usaha Kecil Yang mendapat pendampingan juga mengalami penurunan kinerja akibat dilaksanakannya kebijakan pembatasan social maupun pembatasan anggaran dampak situasi pandemic covid 19

dari semenjak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang.

Penurunan Kinerja Tahun sebelumnya dipengaruhi juga oleh factor-faktor lain:

2. Belum semuanya output yang telah dicapai pada realisasi kegiatan (100%) dapat menunjang pencapaian hasil pada tataran outcome tersebut.
  3. Pelaksanaan program belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya baik dalam hal kompetensi aparat maupun pelaku usaha.
  4. Akibat Pandemi tersebut terjadi kebijakan focus alokasi anggaran Pemerintah daerah yang menyebabkan sebagian alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya target indikator tersebut dialihkan ke penanganan dampak pandemi covid 19.
  5. Pagu indikatif untuk mendukung tercapainya target kinerja sebagaimana yg ditetapkan pada Renstra 2016-2021 tidak sesuai yang direncanakan.
4. Pada tahun 2022 sasaran Meningkatnya Kontribusi PAD atas Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPT Pelatihan KUMKM untuk indikator Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami penurunan capaian dari tahun sebelumnya yaitu dari target PAD Rp.33.000.000,- hanya dicapai realisasi PAD Rp. 8.040.000. Penurunannya disebabkan pula oleh kebijakan pembatasan social serta pembatasan anggaran yang berdampak pada pembatasan kegiatan diklat/pelatihan maupun jumlah peserta pelatihan maupun diklat didalam gedung sehingga implikasinya terhadap berkurangnya penerimaan PAD melalui



penggunaan sarana prasarana pada UPT Balai Pelatihan KUKM.

Penurunan Kinerja dari Tahun sebelumnya dipengaruhi juga oleh factor-faktor lain:

- a. Akibat Pandemi tersebut terjadi kebijakan focus alokasi anggaran Pemerintah daerah yang menyebabkan sebagian alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya target indikator tersebut dialihkan ke penanganan dampak pandemi covid19.
  - b. Pagu indikatif untuk mendukung tercapainya target kinerja sebagaimana yg ditetapkan pada Renstra 2021-2026 tidak sesuai yang direncanakan.
5. Pada tahun 2022 untuk indikator Jumlah diklat yang dilaksanakan penurunan capaian dari tahun sebelumnya yaitu pencapaian 32 angkatan pada tahun sebelumnya menjadi 26 angkatan tahun 2022. Penurunannya disebabkan pula oleh kebijakan pembatasan social dan pembatasan anggaran yang berdampak pada pembatasan kegiatan diklat/pelatihan maupun dikurangnya jumlah peserta pelatihan maupun diklat yang implikasinya terhadap berkurangnya angkatan diklat yang dilaksanakan melalui pada UPT Balai Pelatihan KUKM.
- Penurunan Kinerja dari Tahun sebelumnya dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain:
1. Akibat Pandemi tersebut terjadi kebijakan fokus alokasi anggaran Pemerintah daerah yang menyebabkan sebagian alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya target indikator tersebut dialihkan ke penanganan dampak pandemi covid 19.
  2. Pagu indikatif untuk mendukung tercapainya target kinerja sebagaimana yg

ditetapkan pada Renstra 2021-2026 tidak sesuai yang direncanakan.

### 3.1.3 Analisis Perbandingan Keuangan, Output dan Outcome

Berdasarkan penyajian hasil kinerja di atas juga dipandang perlu menyajikan analisis perbandingan, baik keuangan, output maupun outcome untuk memberikan gambaran sejauh mana pemanfaatan sumberdaya dalam melaksanakan kegiatan program untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

**Tabel 0.6**  
**Analisis Efisiensi Tahun 2022**

No	Uraian	Target	Realisasi	Sisa
1.	Keuangan (Rp)	20.938.347.067,00	19.882.446.734,00	1.055.900.333,00
2.	Kinerja Kegiatan pada tataran output (%)	100%	100%	-
3.	Kinerja Pencapaian sasaran pada tataran outcome (berhasil)	4 Sangat Berhasil	2 Sangat Berhasil	50%

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa pencapaian realisasi keuangan sebesar 94,96% atau terjadi sisa dana sebesar Rp.1.005.900.333,00,- atau 5,04 % telah dapat dibelanjakan dengan baik dan menghasilkan kinerja kegiatan dengan output 75% selanjutnya output tersebut telah dimanfaatkan dan mendapatkan 2 indikator sasaran sangat baik atau sangat berhasil. Kondisi Realisasi Keuangan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah dapat menghemat beberapa pos anggaran belanja di antaranya: **Efisiensi penggunaan telepon, listrik dan air, sisa kontrak, sisa perjalanan dinas dan lain-lain.**

**3.1.4 Target dan Realisasi Jangka  
Menengah RPJMD-RENSTRA 2016-  
2021**



**Tabel 0.7  
Target Kinerja Jangka Menengah**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub)	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah			
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2																					
		217	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					21.373.415.840,00		15.550.000.004,85			18.846.188.584,24		22.292.824.116,12		27.255.856.681,42		33.362.216.991,67		138.680.502.218,29		
Meningkatkan angka partisipasi kerja				Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap jumlah penduduk yang bekerja	%	n/a	1,24	6.850.127.419,00	1,35	4.542.000.004,61		1,45	4.272.993.174,13	1,54	4.676.930.903,33	1,64	5.731.746.787,97	1,72	6.755.149.418,00	1,72	32.828.947.707,04	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
							Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	<b>Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Koperasi</b>			Persentase Koperasi yang berkualitas	%	n/a	5,77	3.323.298.729,00	5,77	2.276.500.003,13	7,25	3,85	2.073.017.320,05	3,85	2.268.985.315,96	5,77	2.780.722.992,39	5,77	3.277.220.714,47	5,77	15.999.745.075,00	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah
		21702	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	%	n/a	0,00	392.454.422,00	18,42	80.000.000,00	15,79	13,16	244.806.404,76	13,16	267.948.623,62	18,42	328.380.661,28	21,05	387.012.984,87	21,05	1.700.603.096,53	Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan
				Persentase Penerbitan Izin	%	n/a	21,05		13,16		15,79	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Bidang Kelembagaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub)	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				usaha KSP (Kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas																		Dan Pengawasan
		2 17 02 1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Unit Usaha	n/a	5,00	236.453.789,26	3,00	15.000.000,00	6,00	3,00	147.495.858,87	3,00	161.439.045,73	4,00	197.849.348,42	5,00	233.175.323,38	23,00	991.413.365,66	Seksi Kelembagaan Dan Perizinan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub)	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah		
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026			Target	Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 02 1.01 01	fasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	n/a	0,00	236.453.789,26	0,00	15.000.000,00	0,00	3,00	147.495.858,87	3,00	161.439.045,73	4,00	197.849.348,42	5,00	233.175.323,38	15,00	991.413.365,66	Seksi Kelembagaan Dan Perizinan
				Jumlah izin usaha simpan pinjam yang difasiltasi untuk koperasi dengan wilayah		n/a	5,00		3,00		6,00	0,00		0,00		0,00		0,00		8,00		Seksi Kelembagaan Dan Perizinan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																		
		217021.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah	Jumlah fasilitasi penerbitan izin pembukaa n kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggota	Unit Usaha	n/a	3,00	156.000.632,75	2,00	65.000.000,00	12,00	2,00	97.310.545,89	2,00	106.509.577,89	3,00	130.531.312,86	3,00	153.837.661,49	15,00	709.189.730,87	Seksi Kelembagaan Dan Perizinan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026			
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	an lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																	
				Jumlah fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah	Sertifikat NIK	n/a	5,00		3,00		12,00	3,00		3,00		4,00		5,00		23,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 02 1.02 01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<b>Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Unit Usaha	n/a	0,00	122.328.043,34	0,00	50.000.000,00	0,00	2,00	76.306.156,36	2,00	83.519.585,98	3,00	102.356.252,12	3,00	120.631.947,38	10,00	555.141.985,19	Seksi Kelembagaan Dan Perizinan
				<b>Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor</b>		n/a	3,00		2,00		12,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5,00		Seksi Kelembagaan Dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 daerah Provinsi																		Perizinan
		2 17 02 1.02 02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Perizinan usaha Koperasi yang	Unit Usaha	n/a	8,00	33.672.589,41	5,00	15.000.000,00	12,00	5,00	21.004.389,53	5,00	22.989.991,91	7,00	28.175.060,74	8,00	33.205.714,10	38,00	154.047.745,68	Seksi Kelembagaan Dan Perizin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub)	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Secara Elektronik	<b>Terintegrasi Secara Elektronik</b>																		an
		2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	<b>Persentase Koperasi Berkualitas</b>	%	n/a	<b>5,77</b>	294.554.975,00	<b>5,77</b>	208.500,99	<b>7,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>5,77</b>	Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan
				<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	%	n/a	<b>5,75</b>		<b>4,60</b>		<b>8,65</b>	<b>3,45</b>	183.738.392,38	<b>3,45</b>	201.107.685,05	<b>4,60</b>	246.464.690,55	<b>5,75</b>	290.470.928,41	<b>5,75</b>	1.424.836.672,38	Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan
		2 17 03 1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1	<b>Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas</b>	Unit Usaha	n/a	<b>10,00</b>	195.260.492,93	<b>5,00</b>	138.499.975,99	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	121.800.180,31	<b>7,00</b>	133.314.284,42	<b>8,00</b>	163.381.443,37	<b>10,00</b>	192.553.178,44	<b>46,00</b>	944.809.555,45	Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			(satu) Daerah Provinsi	daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																		
				Peningkatan jumlah anggota koperasi	Orgn/a	n/a	100,00		70,00		42,200	60,00		10,000		12,000		150,00		60,000		Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan
		2 17 03 1.01 01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan	Do ku me n	n/a	0,00	125.745.518,83	0,00	88.987.875,99	0,00	6,00	78.437.919,71	7,00	85.852.870,75	8,00	105.215.776,40	10,00	124.002.039,34	31,00	608.242.001,01	Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Anggota dan Masyarakat	Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat																		
				Jumlah Koperasi yang meningkat Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota	Lap	n/a	10,00		5,00		10,00	0,00		0,00		0,00		0,00		15,00		Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				dan Masyarakat yang Wilayah Keanggotaannya Lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																		
		2 17 03 1.01 02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta	<b>Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh,</b>	Unit	n/a	0,00	69.514.974,10	0,00	49.512.100,00	0,00	6,00	43.362.260,60	7,00	47.461.413,67	8,00	58.165.666,97	10,00	68.551.139,10	31,00	336.567.554,45	Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Akuntabel	serta Akuntabel																		
				Jumlah tindak lanjut Laporan hasil pemeriksaan rekomendasi kepada pengurus koperasi dan penerapan sanksi koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	Lap	n/a	10,00		7,00		10,00		0,00		0,00		0,00		17,00		Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 03 1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<b>Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Lap</b>	n/a	<b>4,00</b>	99.294.482,07	<b>2,00</b>	70.000.025,00	<b>7,00</b>	<b>2,00</b>	61.938.212,07	<b>2,00</b>	67.793.400,63	<b>3,00</b>	83.083.247,18	<b>4,00</b>	97.917.749,97	<b>17,00</b>	480.027.16,94	Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 03 1.02 01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	<b>Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat</b>	Unit Usaha	n/a	0,00	99.294.482,07	0,00	70.000.025,00	0,00	2,00	61.938.212,07	2,00	67.793.400,63	3,00	83.083.247,18	4,00	97.917.749,97	11,00	480.027.16,93	Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi
				<b>Jumlah KSP/USP yang meningkat Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan</b>	Lap	n/a	4,00		2,00		4,00	0,00		0,00		0,00		0,00		6,00		Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Keseha

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Kesinambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat yang Wilayah Keanggotaannya Lintas																		tan Koperasi
		2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USK KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	n/a	38,46	371.069.647,00	32,69	240.750.000,71	33,33	25,00	231.466.945,06	26,92	253.348.148,32	32,69	310.487.254,44	36,54	365.924.712,60	36,54	1.773.046.708,13	Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan
		2 17 04 1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Un	Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh	Unit Usaha	n/a	20,00	371.069.647,00	17,00	240.750.000,71	20,00	13,00	231.466.945,06	14,00	253.348.148,32	17,00	310.487.254,44	19,00	365.924.712,60	100,00	1.773.046.708,13	Seksi Pengawasan Pemeriksaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub)	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			t Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<b>koperasi yang dinilai kesehatan nya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>																		Dan Penilaian Kesehatan Koperasi
		2 17 04 1.01 01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan	<b>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi,</b>	<b>Unit Usaha</b>	n/a	<b>0,00</b>	236.297.151,21	<b>0,00</b>	123.967.100,00	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	147.398.150,61	<b>14,00</b>	161.332.100,85	<b>17,00</b>	197.718.283,63	<b>19,00</b>	233.020.856,98	<b>63,00</b>	1.099.733.643,29	Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah			
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp		
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			Kemandirian Koperasi	Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi																				
				Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Lap	n/a	20,00		17,00		20,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		37,00		Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 04 1.01 02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	<b>Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan</b>	Unit Usaha	n/a	<b>0,00</b>	134.772.495,79	<b>0,00</b>	116.782.900,71	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	84.068.794,45	<b>14,00</b>	92.016.047,47	<b>17,00</b>	112.768.970,81	<b>19,00</b>	132.903.855,62	<b>63,00</b>	673.313.064,84	Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi
				<b>Jumlah Koperasi Sehat</b>	Lap	n/a	<b>20,00</b>		<b>17,00</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>37,00</b>		Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi
		2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPER				331.431.117,45		139.999.800,00			206.741.103,67		226.284.905,54		277.320.278,47		326.835.777,47		1.508.612.982,59		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			ASIAN																			
		2 17 05 1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<b>Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota</b>	Unit Usaha	n/a	0,00	331.431.117,45	0,00	139.999.800,00	0,00	1,00	206.741.103,67	1,00	226.284.905,54	1,00	277.320.278,47	2,00	326.835.777,47	5,00	1.508.612.982,59	Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi dan Seksi Peningkatan Sdm Koperasi
				<b>Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan</b>	%	n/a	3,00		1,00		0,56	0,00		0,00		0,00		0,00		4,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				n dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota																		Perlindungan Koperasi dan Seksi Peningkatan Sdm Koperasi
		2 17 05 1.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	<b>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</b>	Orang	n/a	0,00	331.431.117,45	0,00	139.999.800,00	0,00	150,00	206.741.103,67	125,00	226.284.905,54	150,00	277.320.278,47	150,00	326.835.777,47	575,00	1.508.612.982,59	Seksi Peningkatan Sdm Koperasi
				<b>Jumlah Pengurus, Pengawas dan</b>	Org	n/a	480,00		480,00		315,00	0,00		0,00		0,00		0,00		960,00		Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				anggota koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																		an
		2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	n/a	10,00	422.912.195,00	8,58	487.500.000,88	22,74	6,22	263.805.446,25	6,83	288.743.696,45	8,37	353.865.769,86	9,87	417.048.456,21	9,87	2.233.875.564,65	Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Persentase Koperasi Modern	%	n/a	2,30		2,30		1,67	1,15		2,30		2,30		2,30		2,30		
				Persentase Tenaga Kerja terserap	%	n/a	7,00		2,00		5,08	0,00		0,00		0,00		0,00		2,00		
				Persentase Peningkatan Kerjasama dengan pelaku usaha lainnya	%	n/a	5,00		5,00		5,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		
	2.17.06.1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan untuk koperasi dengan wilayah	Unit Usaha	n/a	0,00	422.912.195,00	0,00	487.500.000,88	0,00	1,00	263.805.446,25	1,00	288.743.696,45	1,00	353.865.769,86	2,00	417.048.456,21	5,00	2.233.875.564,65	Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Daerah Provinsi	keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																		
				Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Unit Usaha	n/a	0,00		0,00		0,00	1,00		1,00		1,00		2,00		5,00		Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Unit Usaha	n/a	0,00		0,00		0,00	3,00		3,00		3,00		3,00		12,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi
				Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembaga	Unit Usaha	n/a	0,00		0,00		0,00	11,00		10,00		14,00		17,00		52,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah		
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp	
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				an dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas																		Koperasi	
				Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah	%	n/a	1,15		1,15		2,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,15	Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah	%	n/a	2,30		2,30		1,80	0,00		0,00		0,00		0,00		2,30		Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan	%	n/a	3,45		3,45		0,13	0,00		0,00		0,00		0,00		3,45		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah																		si
				Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas	%	n/a	20,00		17,24		10,09	0,00		0,00		0,00		0,00		17,24		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 06 1.01 01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	<b>Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi usaha</b>	Unit Usaha	n/a	0,00	278.191.641,87	0,00	90.500.000,88	0,00	4,00	130.148.416,91	4,00	142.451.702,64	4,00	174.579.677,56	4,00	205.750.855,87	16,00	1.021.622.295,73	Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi
				<b>Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota</b>	Lap	n/a	1,00		1,00		1,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				dalam 1 (satu) daerah provinsi																		
				Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Lap	n/a	3,00		3,00		1,00	0,00		0,00		0,00		0,00		6,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi
	2.17.06.1.01.02	06	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah,	Jumlah Unit Usaha yang	Unit Usaha	n/a	0,00	144.720.553,13	0,00	397.000.000,00	0,00	4,00	67.705.667,78	4,00	74.106.069,69	4,00	90.819.649,83	4,00	107.035.486,29	16,00	881.387.426,72	Seksi Pengembangan, Penguatan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																		
				Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas	Lap	n/a	23,00		15,00		3,00	0,00		0,00		0,00		0,00		38,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi																		
		2 17 06 1.01 03	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	<b>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</b>	<b>Keluarga</b>	n/a	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	30,00	65.951.361,56	<b>30,00</b>	72.185.924,11	<b>30,00</b>	88.466.442,47	<b>30,00</b>	104.262.114,05	<b>120,00</b>	330.865.842,19	Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah		
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp	
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			UPT BALAI PELATIHAN	Jumlah Kontribusi PAD	Rp		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		180.000.000		Upt Balai Pelatihan KUKM
		2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah pengurus/ anggota koperasi yang meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dan bersertifikat lulus	%	n/a		1.510.876.372,55	0,58	1.119.750.200,55	16,19	0,42	942.459.027,93	0,46	1.031.552.256,98	0,56	1.264.204.337,79	0,66	1.489.927.854,91	0,66	7.358.770.050,72		Upt Balai Pelatihan KUKM
				Persentase Jumlah Pengurus/ Anggota Koperasi yang mengikuti Pelatihan	%	n/a	0,67		0,58		0,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,58	Upt Balai Pelatihan KUKM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2.17.05 .1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provins	<b>Jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>	%	n/a	<b>0,00</b>	1.510.876.372,55	<b>0,00</b>	1.119.750.200,55	<b>0,00</b>	300,00	942.459.027,93	<b>330,00</b>	1.031.552.256,98	<b>400,00</b>	1.264.204.337,79	<b>473,00</b>	1.489.927.854,91	<b>1.503,00</b>	7.358.770.050,72	Seksi Penyele nggaran Pelatihan
				<b>Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah lintas</b>		n/a	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>12,00</b>		<b>14,00</b>		<b>16,00</b>		<b>19,00</b>		<b>61,00</b>		Seksi Penyele nggaran Pelatihan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																		
				Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	n/a	20,00		9,20		14,25	0,00		0,00		0,00		0,00		29,20			Seksi Penyele nggaran Pelatih an
				Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti	n/a	0,67		0,58		16,19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,58			Seksi Penyele nggaran Pelatih an



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah																		
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Diklat yang dilaksanakan	Angkatan	n/a	16,00	1.510.876.372,55	13,00	1.119.750.200,55	13,00	10,00	942.459.027,93	11,00	1.031.552.256,98	13,00	1.264.204.337,79	16,00	1.489.927.854,91	79,00	7.358.770.050,72	Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Jumlah Modul Materi Pelatihan	Modul	n/a	16,00		13,00		10,00		11,00		13,00		16,00		79,00		Seksi Kurikulum Dan Silabi	
	Sasaran 2 :			Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	%	n/a	6,50	3.526.828.690,00	5,70	2.265.500.001,48	6,24	4,06	2.199.975.854,08	4,44	2.407.945.587,37	5,44	2.951.023.795,58	6,41	3.477.928.703,53	6,41	16.829.202.632,04	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah
	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha																					
		2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala kecil	%	n/a	0,11	857.494.492,00	0,09	334.750.000,65	0,12	0,07	534.890.504,33	0,08	585.455.166,35	0,09	717.496.332,23	0,11	845.605.207,35	0,11	3.875.691.702,91	Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub)	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			DAN USAHA MIKRO (UMKM)																			Usaha Kecil
		2 17 07 1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	<b>Jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)</b>	Unit Usaha	n/a	0,00	857.494.492,00	0,00	334.750.000,65	0,00	930,00	534.890.504,33	1.020,00	585.455.166,35	1.250,00	717.496.332,23	1.480,00	845.605.207,35	4.680,00	3.875.691.702,91	Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
				<b>jumlah usaha kecil yang bermitra</b>	Unit Usaha	n/a	0,00		0,00		0,00	30,00		34,00		40,00		47,00		151,00		Seksi Pengembangan, Penguatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						Dan Perlindungan Usaha Kecil
				Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi	Unit Usaha	n/a	0,00		0,00		0,00	156,00		171,00		209,00		246,00		782,00		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
				Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Unit Usaha	n/a	0,00		0,00		0,00	100,00		109,00		134,00		158,00		501,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Kecil
				Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi	Unit Usaha	n/a	0,00		0,00		0,00	100,00		109,00		134,00		158,00		501,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Pembiayaan																		Perlindungan Usaha Kecil
				Persentase Usaha Kecil yang mendapat fasilitasi		n/a	4,50		3,50		3,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
				Persentase tenaga kerja terserap pada usaha kecil		n/a	2,89		2,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
				Persentase Usaha Kecil yang mendapat Pendampingan		n/a	2,24		2,00		2,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Kecil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Persentase usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)		n/a	6,72		5,74		1000	0,00		0,00		0,00		0,00		5,74		Seksi Fasilitas Usaha Kecil
				Persentase usaha kecil yang bermitra		n/a	0,22		0,19		50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,19		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Kecil
				Persentase usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi		n/a	1,12		0,96		95	0,00		0,00		0,00		0,00		0,96		Seksi Fasilitas Usaha Kecil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
							Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha		n/a	0,72		0,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,61		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Kecil	
				Persentase Usaha Kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi Pembiayaan		n/a	0,67		0,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,57		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Kecil	
	2 17 07 1.01 01		Menumbuhkan kembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan	Unit Usaha	n/a	0,00	857.494.492,00	0,00	334.750.000,65	0,00	20,00	320.934.302,60	20,00	351.273.099,81	25,00	430.497.799,34	25,00	507.363.124,41	90,00	2.802.312.818,81	Seksi Fasilitasi Usaha Kecil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	<b>Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</b>																		
			jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online		Lap	n/a	1.500,00		1.280,00		1000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.780,00		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah		
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp	
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				data																			
				jumlah usaha kecil yang bermitra	Lap	n/a	50,00		42,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		92,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Kecil
				Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi	Lap	n/a	250,00		214,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		464,00		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
				Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembaga	Lap	n/a	160,00		137,00		160,00		0,00		0,00		0,00		0,00		297,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				an dan usaha																		Perindungan Usaha Kecil
				Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi Pembiayaan	Lap	n/a	150,00		128,00		160,00	0,00		0,00		0,00		0,00		278,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Kecil
		2 17 07 1.01 02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM dan Kewirausahaan	Orang	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	213.956.201,73	30,00	234.182.066,54	40,00	286.998.532,89	40,00	338.242.082,94	140,00	1.073.378.884,10	Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			aan																			
		2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<b>Persentase Usaha Kecil yang naik kelas</b>	%	n/a	<b>0,013</b>	846.445.874,19	<b>0,009</b>	633.731.500,00	<b>0,0046</b>	<b>0,009</b>	527.998.564,41	<b>0,013</b>	577.911.712,51	<b>0,013</b>	708.251.558,63	<b>0,013</b>	834.709.780,64	<b>0,013</b>	4.129.048.990,36	Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Kecil
		2 17 08 1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	<b>jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</b>	Unit Usaha	n/a	<b>300,00</b>	846.445.874,19	<b>257,00</b>	633.731.500,00	<b>320</b>	<b>187,00</b>	527.998.564,41	<b>205,00</b>	577.911.712,51	<b>251,00</b>	708.251.558,63	<b>296,00</b>	834.709.780,64	<b>1.496,00</b>	4.129.048.990,36	Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
				<b>jumlah usaha kecil yang diberikan</b>	Unit Usaha	n/a	<b>100,00</b>		<b>86,00</b>		<b>95</b>	<b>62,00</b>		<b>68,00</b>		<b>84,00</b>		<b>99,00</b>		<b>499,00</b>		Seksi Fasilitasi Usaha

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk																		Kecil
				Jumlah Usaha Kecil yang memanfaatkan platform digital	Unit Usaha	n/a	0,00		0,00		0,00	50,00		50,00		100,00		100,00		300,00		Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
				Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	n/a	6,50		6,20		6,24	0,00		0,00		0,00		0,00		6,20		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
				Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	%	n/a	0,11		0,09		0,12	0,00		0,00		0,00		0,00		0,09		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
				Persentase Produk Usaha Kecil yang	%	n/a	2,50		2,10		0,35	0,00		0,00		0,00		0,00		2,10		Seksi Peningkatan Kualitas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				meningkat Kualitas																		s Kewirausahaan
				Persentase Usaha Kecil yang naik kelas	%	n/a	0,013		0,013		0,0046	0,00		0,00		0,00		0,00		0,01		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
				Persentase usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi	%	n/a	1,34		1,26		1,45	0,00		0,00		0,00		0,00		1,26		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
				Persentase usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk	%	n/a	0,45		0,36		1,45	0,00		0,00		0,00		0,00		0,36		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 08 1.01 01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	<b>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</b>	Unit Usaha	n/a	0,00	846.445.874,19	0,00	633.731.500,00	0,00	20,00	395.998.923,30	20,00	433.433.784,38	20,00	531.188.668,97	20,00	626.032.335,48	80,00	3.466.831.086,32	Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Kecil
				<b>jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi</b>	Lap	n/a	300,00		280,00		95	0,00		0,00		0,00		0,00		580,00		Seksi Fasilitas Usaha Kecil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah		
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan	Lap	n/a	100,00		80,00		95,00		0,00		0,00		0,00		0,00		180,00		Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
				Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Lap	n/a	350,00		350,00		350,00		0,00		0,00		0,00		0,00		700,00		Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
		2 17 08 1.01 02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	131.999.641,10	25,00	144.477.928,13	30,00	177.062.889,66	30,00	208.677.445,16	110,00	662.217.904,04		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub)	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			UPT BALAI PELATIHAN																			
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				1.822.888.323,81		1.297.018.500,83		-	-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	3.119.906.824,64
		2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	<b>Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</b>	<b>Unit Usaha</b>	n/a	<b>420,00</b>	1.822.888.323,81	<b>350,00</b>	1.297.018.500,83	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>		-	<b>0,00</b>		-	<b>770,00</b>	3.119.906.824,64	Seksi Penyele nggaran Pelatihan
				<b>Persentase usaha kecil yang diberikand ukungan fasilitasi</b>	%	n/a	<b>1,88</b>		<b>1,57</b>		<b>3,20</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1,57</b>		Seksi Penyele nggaran Pelatihan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026			
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	<b>Jumlah Diklat yang dilaksanakan</b>	<b>Angkatan</b>	n/a	<b>14,00</b>	1.822.888.323,81	<b>12,00</b>	1.297.018.500,83	<b>14,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>26,00</b>	3.119.906.824,64	Seksi Penyelenggaraan Pelatihan
				<b>Jumlah Modul Materi Pelatihan</b>	<b>Modul</b>	n/a	<b>14,00</b>		<b>12,00</b>		<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>26,00</b>		Seksi Kurikulum Dan Silabi
		2:17:05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			n/a	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			1.137.086.785,34	<b>0,00</b>	1.244.578.708,51	<b>0,00</b>	1.525.275.904,72	<b>0,00</b>	1.797.613.715,54		5.704.555.114,12	
		2 17 05 1.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas	<b>Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</b>	<b>Unit Usaha</b>	n/a	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	1.137.086.785,34	<b>270,00</b>	1.244.578.708,51	<b>300,00</b>	1.525.275.904,72	<b>420,00</b>	1.797.613.715,54	<b>1.350,00</b>	5.704.555.114,12	Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub)	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																			
		2 17 05 1.02 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	<b>Jumlah Diklat yang dilaksanakan</b>	<b>Angka</b>	n/a	0,00		0,00		14,00	9,00	1.137.086.785,34	10,00	1.244.578.708,51	12,00	1.525.275.904,72	14,00	1.797.613.715,54	45,00	5.704.555.114,12	Seksi Penyelenggaraan Pelatihan
				<b>Jumlah Modul Materi Pelatihan</b>	<b>Modul</b>	n/a	0,00		0,00		14,00	9,00		10,00		12,00		14,00		45,00		Seksi Kurikulum Dan Silabi
Meningkatnya Tata Kelola Perang							14.523.288.421,00		11.008.000.000,24			14.573.195.410,11		17.615.893.212,79		21.524.109.893,45		26.607.067.573,67		105.851.554.511,25		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah		
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp	
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
kat Daerah (Dinas KUKM Prov. Sulteng																							
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas Kop dan UKM Prov. Sulteng)	2 17					60,00	14.523.288.421,00	62,00	11.008.000.000,24	50,61	64,00	14.573.195.410,11	66,00	17.615.893.212,79	68,00	21.524.109.893,45	70,05	26.607.067.573,67	70,05	28.464.034.727,95		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub)	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks</b>	n/a	<b>63,05</b>	13.910.936.121,00	<b>64,50</b>	10.604.516.900,24	<b>50,61</b>	<b>66,50</b>	14.257.504.210,00	<b>68,50</b>	17.242.467.659,52	<b>70,00</b>	21.067.548.925,31	<b>71,00</b>	26.048.219.386,76	<b>71,00</b>	26.177.949.895,60	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah
		2 17 01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	n/a	<b>71,00</b>	1.037.907.875,00	<b>73,00</b>	776.101.318,00	<b>71,76</b>	<b>75,00</b>	1.103.808.685,00	<b>80,00</b>	1.305.675.827,37	<b>83,00</b>	1.596.357.331,75	<b>86,00</b>	1.954.002.778,95	<b>86,00</b>	Subbag . program, Keuangan Dan Asset	
		2 17 01.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah</b>	<b>do k</b>	n/a	<b>1,00</b>	502.483.250,00	<b>1,00</b>	375.000.000,00	<b>1</b>	<b>1,00</b>	451.308.800,00	<b>1,00</b>	533.845.220,51	<b>1,00</b>	652.694.730,12	<b>1,00</b>	798.923.455,98	<b>6,00</b>	3.314.255.456,61	Subbag . program, Keuangan Dan Asset
		2 17 01.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan</b>	<b>do k</b>	n/a	<b>1,00</b>	35.774.750,00	<b>2,00</b>	65.000.000,00	<b>2</b>	<b>1,00</b>	50.000.000,00	<b>1,00</b>	59.144.118,23	<b>1,00</b>	72.311.323,21	<b>1,00</b>	88.511.841,11	<b>7,00</b>	370.742.032,56	Subbag . Program keuangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		an dan asset
		2 17 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	do k	n/a	1,00	35.530.000,00	0,00	0,00	1,00	50.000.000,00	1,00	59.144.118,23	1,00	72.311.323,21	1,00	88.511.841,11	5,00	305.497.282,56	Subbag . Program keuangan dan asset	
		2 17 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	do k	n/a	1,00	38.280.000,00	2,00	61.101.318,00	2,00	1,00	50.000.000,00	1,00	59.144.118,23	1,00	72.311.323,21	1,00	88.511.841,11	7,00	369.348.600,56	Subbag . Program keuangan dan asset

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<b>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen</b>	<b>do k</b>	n/a	<b>1,00</b>	38.280.000,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	50.000.000,00	<b>1,00</b>	59.144.118,23	<b>1,00</b>	72.311.323,21	<b>1,00</b>	88.511.841,11	<b>5,00</b>	308.247.282,56	Subbag . Program keuangan dan asset
		2 17 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan</b>	<b>La p</b>	n/a	<b>1,00</b>	202.690.875,00	<b>1,00</b>	150.000.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	255.000.000,00	<b>1,00</b>	301.635.002,97	<b>1,00</b>	368.787.748,39	<b>1,00</b>	451.410.389,68	<b>6,00</b>	1.729.524.016,05	Subbag . Program keuangan dan asset

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub)	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				<b>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>																		
		2 17 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Lap	n/a	<b>1,00</b>	184.869.000,00	<b>1,00</b>	125.000.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	197.499.885,00	<b>1,00</b>	233.619.130,98	<b>1,00</b>	285.629.560,38	<b>1,00</b>	349.621.568,83	<b>6,00</b>	1.376.239.145,18	Subbag . Program keuangan dan asset
		2 17 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	%	n/a	<b>95,00</b>	9.079.651.672,00	<b>96,00</b>	8.468.423.182,24	<b>94,23</b>	<b>96,00</b>	9.439.006.725,00	<b>97,00</b>	11.165.234.594,29	<b>98,00</b>	13.650.941.322,25	<b>99,00</b>	16.709.277.270,45	<b>99,00</b>		Subbag . Program, Keuangan Dan Asset
		2 17 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Orang / bulan	n/a	<b>67,00</b>	7.490.001.747,00	<b>67,00</b>	7.027.214.382,24	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	7.501.006.725,00	<b>67,00</b>	8.872.808.571,71	<b>67,00</b>	10.848.154.434,47	<b>67,00</b>	13.278.558.308,85	<b>402,00</b>	55.017.744.169,27	Subbag . Program, Keuangan Dan Asset

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
							Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>do k</b>	n/a	<b>1,00</b>	1.442.400.000,00	<b>1,00</b>	1.383.708.800,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	1.843.000.000,00	<b>1,00</b>	2.180.052.197,95	<b>1,00</b>	2.665.395.373,68	<b>1,00</b>	3.262.546.463,48	<b>6,00</b>	12.777.102.835,11	Subbag . Program keuangan dan asset
		2 17 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>do k</b>	n/a	<b>1,00</b>	12.100.000,00	<b>1,00</b>	5.000.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	10.000.000,00	<b>1,00</b>	11.828.823,65	<b>1,00</b>	14.462.264,64	<b>1,00</b>	17.702.368,22	<b>6,00</b>	71.093.456,51	Subbag . Program keuangan dan asset
		2 17 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	<b>do k</b>	n/a	<b>1,00</b>	44.600.050,00	<b>1,00</b>	5.000.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	10.000.000,00	<b>1,00</b>	11.828.823,65	<b>1,00</b>	14.462.264,64	<b>1,00</b>	17.702.368,22	<b>6,00</b>	103.593.506,51	Subbag . Program keuangan dan asset



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>Lap</b>	n/a	<b>1,00</b>	62.750.000,00	<b>1,00</b>	30.000.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	30.000.000,00	<b>1,00</b>	35.486.470,94	<b>1,00</b>	43.386.793,93	<b>1,00</b>	53.107.104,67	<b>6,00</b>	254.730.369,54	Subbag . Program keuangan dan asset
		2 17 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	<b>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</b>	<b>do</b>	n/a	<b>1,00</b>	13.899.875,00	<b>1,00</b>	5.000.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	15.000.000,00	<b>1,00</b>	17.743.235,47	<b>1,00</b>	21.693.396,96	<b>1,00</b>	26.553.552,33	<b>6,00</b>	99.890.059,77	Subbag . Program keuangan dan asset

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<b>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	lap	n/a	<b>1,00</b>	7.700.000,00	<b>1,00</b>	7.500.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	15.000.000,00	<b>1,00</b>	17.743.235,47	<b>1,00</b>	21.693.396,96	<b>1,00</b>	26.553.552,33	<b>6,00</b>	96.190.184,77	Subbag . Program keuangan dan asset
		2 17 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>	dok	n/a	<b>1,00</b>	6.200.000,00	<b>1,00</b>	5.000.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	15.000.000,00	<b>1,00</b>	17.743.235,47	<b>1,00</b>	21.693.396,96	<b>1,00</b>	26.553.552,33	<b>6,00</b>	92.190.184,77	Subbag . Program keuangan dan asset

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	lap	n/a	<b>5,00</b>	120.114.925,00	<b>5,00</b>	50.000.000,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	92.000.000,00	<b>5,00</b>	108.825.177,54	<b>5,00</b>	133.052.834,71	<b>5,00</b>	162.861.787,65	<b>5,00</b>		Subbag . Program, Keuangan Dan Asset
		2 17 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<b>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>	dok	n/a	<b>1,00</b>	7.500.075,00	<b>1,00</b>	5.000.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	10.000.000,00	<b>1,00</b>	11.828.823,65	<b>1,00</b>	14.462.264,64	<b>1,00</b>	17.702.368,22	<b>6,00</b>	66.493.531,51	Subbag . Program, Keuangan Dan Asset
		2 17 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<b>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik</b>	dok	n/a	<b>1,00</b>	17.400.000,00	<b>1,00</b>	10.000.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	12.000.000,00	<b>1,00</b>	14.194.588,38	<b>1,00</b>	17.354.717,57	<b>1,00</b>	21.242.841,87	<b>6,00</b>	92.192.147,81	Subbag . Program keuangan dan asset
		2 17 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	<b>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik</b>	lap	n/a	<b>1,00</b>	38.856.050,00	<b>1,00</b>	15.000.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	25.000.000,00	<b>1,00</b>	29.572.059,11	<b>1,00</b>	36.155.661,61	<b>1,00</b>	44.255.920,56	<b>6,00</b>	188.839.691,28	Subbag . Program keuangan dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
							Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			SKPD	<b>Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</b>																	asset	
		2 17 01 1.03 04	Pembinaan Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	lap	n/a	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	Subbag . Program keuangan dan asset	
		2 17 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	<b>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang</b>	lap	n/a	<b>1,00</b>	19.358.925,00	<b>1,00</b>	10.000.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	20.000.000,00	<b>1,00</b>	23.657.647,29	<b>1,00</b>	28.924.529,29	<b>1,00</b>	35.404.736,45	<b>6,00</b>	137.345.838,02	Subbag . Program keuangan dan asset

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			pada SKPD	<b>Milik Daerah pada SKPD</b>																		
		2 17 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	lap	n/a	<b>1,00</b>	36.999.875,00	<b>1,00</b>	10.000.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	25.000.000,00	<b>1,00</b>	29.572.059,11	<b>1,00</b>	36.155.661,61	<b>1,00</b>	44.255.920,56	<b>6,00</b>	181.983.516,28	Subbagian Program keuangan dan asset
		2 17 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</b>	dok	n/a	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	Subbagian Program keuangan dan asset
		2 17 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	ind	n/a	<b>76,61</b>	237.484.000,00	<b>80,00</b>	60.000.000,00	<b>81,86</b>	<b>85,00</b>	162.500.000,00	<b>88,50</b>	192.218.384,25	<b>90,00</b>	235.011.800,45	<b>92,00</b>	287.663.483,62	<b>92,00</b>	1.174.877.668,32	Subbagian Kepegawaian Dan Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub)	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin pegawai	<b>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum
		2 17 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</b>	pkt	n/a	1,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	42.000.000,00	1,00	49.681.059,31	1,00	60.741.511,50	1,00	74.349.946,54	5,00	268.772.517,35	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum
		2 17 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<b>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi</b>	dok	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum
		2 17 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan</b>	dok	n/a	1,00	88.580.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	1,00	50.000.000,00	1,00	59.144.118,23	1,00	72.311.323,21	1,00	88.511.841,11	6,00	388.547.282,56	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			n	aan Sistem Informasi Kepegawaian																		
		2 17 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	dok	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25.000.00 0,00	1,00	29.572.05 9,11	1,00	36.155.66 1,61	1,00	44.255.92 0,56	4,00	134.983.6 41,28	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum
		2 17 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	n/a	1,00	46.904.000 ,00	1,00	15.000.00 0,00	1,00	1,00	10.500.00 0,00	1,00	12.420.26 4,83	1,00	15.185.37 7,87	1,00	18.587.48 6,63	6,00	118.597.1 29,34	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum
		2 17 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang/lap	n/a	1,00	60.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	25,00	35.000.000,00	25,00	25.400.882,76	25,00	50.617.926,25	25,00	61.958.288,78	100,00	263.977.097,79	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum
		2 17 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	lap	n/a	5,00	492.121.213,00	5,00	305.250.000,00	5,00	5,00	400.000.000,00	5,00	473.152.945,84	5,00	578.490.585,71	5,00	708.094.728,92	5,00	2.957.109.473,47	Sub bagian Kepegawaian Dan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub)	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						Umum
		2 17 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</b>	pkt	n/a	<b>1,00</b>	26.150.713,00	<b>1,00</b>	7.500.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	25.000.000,00	<b>1,00</b>	29.572.059,11	<b>1,00</b>	36.155.661,61	<b>1,00</b>	44.255.920,56	<b>6,00</b>	168.634.354,28	Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum
		2 17 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>	pkt	n/a	<b>1,00</b>	243.636.500,00	<b>1,00</b>	195.000.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	240.000.000,00	<b>1,00</b>	283.891.767,50	<b>1,00</b>	347.094.351,43	<b>1,00</b>	424.856.837,35	<b>6,00</b>	1.734.479.456,28	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<b>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</b>	pkt	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum
		2 17 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</b>	pkt	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum
		2 17 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</b>	pkt	n/a	1,00	58.540.000,00	1,00	45.000.000,00	1,00	1,00	50.000.000,00	1,00	59.144.118,23	1,00	72.311.323,21	1,00	88.511.841,11	6,00	373.507.282,56	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah		
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target		Rp	
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<b>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</b>	do k	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum
		2 17 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	<b>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</b>	pkt	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum
		2 17 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<b>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>	La p	n/a	1,00	7.750.000,00	1,00	7.750.000,00	1,00	1,00	20.000.000,00	1,00	23.657.647,29	1,00	28.924.529,29	1,00	35.404.736,45	6,00	123.486.913,02	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum
		2 17 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat</b>	La p	n/a	1,00	156.044.000,00	1,00	50.000.000,00	1,00	1,00	65.000.000,00	1,00	76.887.353,70	1,00	94.004.720,18	1,00	115.065.393,45	6,00	557.001.467,33	Sub bagian Kepegawaian Dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Konsultasi SKPD	<b>Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>																		Umum
		2 17 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>	do k	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum
		2 17 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<b>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</b>	do k	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 17 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik</b>	lap	n/a	3,00	1.893.735.900,00	3,00	20.000.000,00	0,00	3,00	1.870.000.000,00	4,00	2.589.507.388,17	4,00	3.152.412.510,37	4,00	4.119.403.297,92	4,00	13.645.059.096,47	Sub Bagian Program, Keuangan Dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub)	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Pemerintah Daerah	<b>Daerah Penunjang Urusan</b> Pemerintah Daerah																		Asset
		2 17 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</b>	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset
		2 17 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</b>	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
							Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	pkt	n/a	1,00	39.013.750,00	1,00	5.000.000,00	0,00	1,00	25.000.000,00	1,00	29.572.059,11	1,00	36.155.661,61	1,00	44.255.920,56	6,00	178.997.391,28	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset
		2 17 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit/lap	n/a	1,00	942.822.150,00	1,00	10.000.000,00	0,00	30,00	1.095.000.000,00	32,00	1.295.256.189,23	40,00	1.583.617.978,39	45,00	1.938.409.320,41	148,00	6.865.105.638,03	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset
		2 17 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset
		2 17 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah		
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp	
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		2 17 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang</b>	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset
		2 17 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang</b>	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	377.517.366,38	1,00	447.969.022,16	1,00	809.060.440,24	3,00	1.634.546.828,78		Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset	
		2 17 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau</b>	Unit	n/a	1,00	911.900.000,00	1,00	5.000.000,00	0,00	1,00	750.000.000,00	1,00	887.161.773,45	2,00	1.084.669.848,21	2,00	1.327.677.616,72	8,00	4.966.409.238,38	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub)	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Bangunan Lainnya yang Disediakan																		
		2 17 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	lap	n/a	4,00	627.838.960,00	4,00	604.742.400,00	4,00	4,00	675.188.800,00	4,00	798.668.924,29	4,00	976.475.910,95	4,00	1.195.244.075,76	24,00	4.878.159.071,00	Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum
		2 17 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	n/a	1,00	1.475.000,00	1,00	2.500.000,00	1,00	1,00	1.500.000,00	1,00	1.774.323,55	1,00	2.169.339,70	1,00	2.655.355,23	6,00	12.074.018,48	Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum
		2 17 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lap	n/a	1,00	582.242.400,00	1,00	582.242.400,00	1,00	1,00	630.688.800,00	1,00	746.030.659,07	1,00	912.118.833,29	1,00	1.116.468.537,17	6,00	4.569.791.629,52	Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub)	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Listrik yang Disediakan																		
		2 17 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	n/a	1,00	32.371.560,00	1,00	15.000.000,00	1,00	1,00	22.000.000,00	1,00	26.023.412,02	1,00	31.816.982,21	1,00	38.945.210,09	6,00	166.157.164,33	Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum
		2 17 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	n/a	1,00	11.750.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	1,00	21.000.000,00	1,00	24.840.529,66	1,00	30.370.755,75	1,00	37.174.973,27	6,00	130.136.258,67	Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	lap	n/a	<b>4,00</b>	422.081.576,00	<b>4,00</b>	320.000.000,00	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	515.000.000,00	<b>6,00</b>	609.184.417,77	<b>7,00</b>	744.806.629,11	<b>7,00</b>	911.671.963,48	<b>33,00</b>	3.522.744.586,35	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset
		2 17 01 1.09 01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan yang perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Perizinannya	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	90.000.000,00	6,00	96.000.000,00	6,00	102.000.000,00	6,00	108.000.000,00	<b>24,00</b>	396.000.000,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Operasional dan Perizinannya	Unit/lap		1,00	254.040.000,00	1,00	250.000.000,00	1,00	25,00	62.500.000,00	25,00	65.000.000,00	25,00	67.500.000,00	25,00	70.000.000,00	102,00	769.040.000,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset
		2 17 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit/lap		1,00	12.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	3,00	45.000.000,00	3,00	48.000.000,00	3,00	51.000.000,00	3,00	54.000.000,00	14,00	240.000.000,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset
		2 17 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit/lap		1,00	91.092.776,00	1,00	30.000.000,00	1,00	40,00	80.000.000,00	40,00	84.000.000,00	40,00	88.000.000,00	40,00	92.000.000,00	162,00	465.092.776,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2 17 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset
		2 17 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset
		2 17 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit		1,00	64.948.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150.000.000,00	1,00	161.500.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	5,00	776.448.800,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset
		2 17 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit		0,00	0,00	1,00	10.000.000,00	1,00	1,00	87.500.000,00	2,00	154.684.417,77	2,00	150.000.000,00	2,00	237.671.963,48	7,00	639.856.381,25	Sub Bagian Program, Keuangan Dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub)	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
							Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi																	Asset	
		2 17 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	86.306.629,11	1,00	150.000.000,00	2,00	236.306.629,11	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset	
			UPT BALAI PELATIHAN																			
		2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINT					612.352.300,00		403.483.100,00			315.691.200,11		373.425.553,27		456.560.968,14		558.848.186,91		2.286.084.832,35	UPT Balai Pelatihan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			AHAN DAERAH PROVINSI																			KUKM
		2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	lap	n/a	<b>6,00</b>	407.061.100,00	<b>6,00</b>	220.191.900,00	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	181.000.000,00	<b>6,00</b>	214.101.707,99	<b>6,00</b>	261.766.990,04	<b>6,00</b>	320.412.864,83	<b>36,00</b>	1.604.534.562,86	Sub Bagian Tata usaha
		2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</b>	pkt	n/a	<b>1,00</b>	4.922.200,00	<b>1,00</b>	4.992.200,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	4.000.000,00	<b>1,00</b>	4.731.529,46	<b>1,00</b>	5.784.905,86	<b>1,00</b>	7.080.947,29	<b>6,00</b>	31.511.782,60	Sub Bagian Tata usaha
		2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	pkt	n/a	<b>1,00</b>	44.586.000,00	<b>1,00</b>	44.586.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	35.000.000,00	<b>1,00</b>	41.400.882,76	<b>1,00</b>	50.617.926,25	<b>1,00</b>	61.958.288,78	<b>6,00</b>	278.149.097,79	Sub Bagian Tata usaha

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				yang Disediakan																		
		2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	pkt	n/a	1,00	23.566.000,00	1,00	23.566.000,00	1,00	1,00	20.000.000,00	1,00	23.657.647,29	1,00	28.924.529,29	1,00	35.404.736,45	6,00	155.118.913,02	Sub Bagian Tata usaha
		2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	pkt	n/a	1,00	13.917.900,00	1,00	12.047.700,00	1,00	1,00	15.000.000,00	1,00	17.743.235,47	1,00	21.693.396,96	1,00	26.553.552,33	6,00	106.955.784,77	Sub Bagian Tata usaha
		2.17.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	n/a	1,00	24.025.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.914.411,82	1,00	7.231.132,32	1,00	8.851.184,11	6,00	66.021.728,26	Sub Bagian Tata usaha

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026		Target		Rp
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	Lap	n/a	1,00	296.044.000,00	1,00	120.000.000,00	1,00	1,00	102.000.000,00	1,00	120.654.001,19	1,00	147.515.099,36	1,00	180.564.155,87	6,00	966.777.256,42	Sub Bagian Tata usaha
		2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	lap	n/a	1,00	62.000.000,00	1,00	50.000.000,00	1,00	1,00	20.000.000,00	1,00	23.657.647,29	1,00	28.924.529,29	1,00	35.404.736,45	6,00	219.986.913,02	Sub Bagian Tata usaha
		2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</b>	unit	n/a	1,00	62.000.000,00	1,00	50.000.000,00	1,00	1,00	20.000.000,00	1,00	23.657.647,29	1,00	28.924.529,29	1,00	35.404.736,45	6,00	219.986.913,02	Sub Bagian Tata usaha



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	lap	n/a	1,00	58.691.200,00	1,00	58.691.200,00	1,00	1,00	58.691.200,11	1,00	69.424.785,57	1,00	84.880.766,82	1,00	103.897.323,58	6,00	434.276.476,08	Sub Bagian Tata usaha
		2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	n/a	1,00	58.691.200,00	1,00	58.691.200,00	1,00	1,00	58.691.200,11	1,00	69.424.785,57	1,00	84.880.766,82	1,00	103.897.323,58	6,00	434.276.476,08	Sub Bagian Tata usaha
		2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	lap	n/a	4,00	84.600.000,00	4,00	74.600.000,00	4,00	4,00	56.000.000,00	4,00	66.241.412,42	4,00	80.988.682,00	4,00	99.133.262,05	24,00	461.563.356,47	Sub Bagian Tata usaha

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub)	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			an Daerah	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
		2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</b>	Unit	n/a	<b>1,00</b>	23.000.000,00	<b>1,00</b>	15.000.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	15.000.000,00	<b>1,00</b>	17.743.235,47	<b>1,00</b>	21.693.396,96	<b>1,00</b>	26.553.552,33	<b>6,00</b>	118.990.184,77	Sub Bagian Tata usaha
		2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	<b>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan</b>	Unit	n/a	<b>1,00</b>	14.000.000,00	<b>1,00</b>	15.000.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	14.000.000,00	<b>1,00</b>	16.560.353,10	<b>1,00</b>	20.247.170,50	<b>1,00</b>	24.783.315,51	<b>6,00</b>	104.590.839,12	Sub Bagian Tata usaha

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	
						2020	2021		2022			2023		2024		2025		2026				
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			n Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																		
		2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	n/a	1,00	29.600.000,00	1,00	29.600.000,00	1,00	1,00	15.000.000,00	1,00	17.743.235,47	1,00	21.693.396,96	1,00	26.553.552,33	6,00	140.190.184,77	Sub Bagian Tata usaha
		2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	n/a	1,00	18.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	1,00	12.000.000,00	1,00	14.194.588,38	1,00	17.354.717,57	1,00	21.242.841,87	6,00	97.792.147,81	Sub Bagian Tata usaha

B. Berdasarkan Perubahan RPJMD/RENSTRA 2016-2021

**Tabel 0.8**  
**Evaluasi dan Analisa Akuntabilitas Kinerja 2022**

No	Sasaran Strategik		Indikator Kinerja	Satuan	Akumulasi Target kinerja RPJMD/Renstra Tahun ke-1/2022	Akumulasi Realisasi kinerja RPJMD/Renstra Tahun ke-1/2022	Rencana Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi		Persentase Koperasi Berkualitas	%	5,77	7,25	5,77
			Persentase Penerbitan Izin Usaha KSp (Kantor cabang, cabang pembantu dan Kantor Kas	%	13	15,79	21,05
			Persentase Koperasi Aktif	%	5,75	8,65	5,75
			Persentase Koperasi Sehat	%	52,63	33,33	36,54
			Persentase Jumlah Pengurus/ Anggota Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	%	0,67	0,56	0,66
			Persentase Koperasi Modern	%	2,30	1,67	2,30
			Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Pelaku Usaha Lainnya	%	20	5	20
			Persentase Volume Usaha Koperasi	%	10	22,74	9,87
				%	3,45	5,08	7

		Persentase Tenaga Kerja Terserap				
2.	<i>Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha</i>	Persentase Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	%	5,77	6,24	6,41
		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	0,18	0,12	0,11
		Persentase Produk Usaha Kecil yang mendapat Fasilitas	%	3	0,35	3
		Persentase Usaha Kecil yang Mendapat Fasilitas	%	5	3,2	5
		Persentase Usaha Kecil yang Mendapat Pendampingan	%	2,29	2,2	2
		Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas	%	1,57	0,0046	0,013
		Persentase Usaha Kecil yang diberikan dukungan Fasilitas Pemasaran	%	1,34	1,45	2
3.	<i>Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas KUKM Prov. Sulteng)</i>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	62,00	50,61	71,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	73	71,76	86,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80	81,86	92,00
	<b>JUMLAH</b>					

C. Berdasarkan Perubahan RPJMD/RENSTRA 2021-2026

**6. Pencapaian Indikator kinerja utama terhadap RPJMD maupun RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :**

\*Pencapaian Indikator Persentase Koperasi berkualitas pada tahun 2022 (Tahun ke 2 periode RPJMD/Renstra) adalah 7,25% Koperasi Berkualitas. Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2021-2026 adalah sebesar 6,41%.

\*Pencapaian Indikator Koperasi aktif pada tahun 2022 (Tahun ke 2 periode RPJMD/Renstra) adalah 8,65% Koperasi aktif. Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2021-2026 adalah sebesar 5,75% Koperasi aktif.

\*Pencapaian Indikator Koperasi sehat pada tahun 2022 (Tahun ke 2 periode RPJMD/Renstra) adalah 33,33% Koperasi sehat. Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2021-2026 adalah sebesar 36,54% Koperasi sehat.

\*Pencapaian Indikator Persentase Penerbitan Izin Usaha KSP (Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas pada tahun 2022 (Tahun ke 2 periode RPJMD/Renstra) adalah 15,79%. Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2021-2026 adalah sebesar 21,05%.

\*Pencapaian Indikator Peningkatan kerja sama dengan pelaku usaha lainnya pada tahun 2022 (Tahun ke 2 periode RPJMD/Renstra) adalah 5%. Mengacu pada pencapaian

Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2021-2026 adalah sebesar 20 %.

\*Pencapaian Indikator Jumlah tenaga kerja terserap pada tahun 2022 (Tahun ke 2 periode RPJMD/Renstra) adalah 5,08% tenaga kerja. Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2021-2026 adalah sebesar 7% tenaga kerja.

\*Pencapaian Indikator Peningkatan Volume usaha koperasi terhadap koperasi berkualitas pada tahun 2022 (Tahun ke 2 periode RPJMD/Renstra) adalah 22,74% dan Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2021-2026 adalah sebesar 9,87%.

\*Pencapaian Indikator Persentase Koperasi Modern pada tahun 2022 (Tahun ke 2 periode RPJMD/Renstra) adalah 1,67% dan Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2021-2026 adalah sebesar 2,30%.

\*Pencapaian Indikator Persentase Jumlah Pengurus/Anggota Koperasi yang mengikuti Pelatihan pada tahun 2022 (Tahun ke 2 periode RPJMD/Renstra) adalah 0,56% dan Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2021-2026 adalah sebesar 0,66%.

\*Pencapaian Indikator Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha pada tahun 2022 (Tahun ke 2 periode RPJMD/Renstra) adalah 6,24% dan Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD/Renstra 2021-2026 adalah sebesar 6,41%.

\*Pencapaian Indikator Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru pada tahun 2022 (Tahun ke 2 periode RPJMD/Renstra) adalah 0,12% dan Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2021-2026 adalah sebesar 0,11%.

\*Pencapaian Indikator Persentase Produk Usaha Kecil yang Mendapat Fasilitas pada tahun 2022 (Tahun ke 2 periode RPJMD/Renstra) adalah 0,35% dan Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2021-2026 adalah sebesar 3%.

\*Pencapaian Indikator Persentase Usaha Kecil yang mendapat Fasilitas pada tahun 2022 (Tahun ke 2 periode RPJMD/Renstra) adalah 3,2% dan Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2021-2026 adalah sebesar 5%.

\*Pencapaian Indikator Persentase Usaha Kecil yang mendapat Pendampingan pada tahun 2022 (Tahun ke 2 periode RPJMD/Renstra) adalah 2,2% dan Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2021-2026 adalah sebesar 2%.

\*Pencapaian Indikator Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas pada tahun 2022 (Tahun ke 2 periode RPJMD/Renstra) adalah 0,0046% dan Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2021-2026 adalah sebesar 0,013%.



\*Pencapaian Indikator Persentase Usaha Kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi Pemasaran pada tahun 2022 (Tahun ke 2 periode RPJMD/Renstra) adalah 1,45% dan Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2021-2026 adalah sebesar 2%.

\*Pencapaian Indikator Jumlah Angkatan diklat yang dilaksanakan pada tahun 2022 (Tahun ke 2 periode RPJMD/Renstra) adalah 26 angkatan. Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2016-2021 adalah sebesar 126 angkatan , maka jika di akumulasi dengan pencapaian empat tahun sebelumnya posisi kondisi kinerja sampai dengan tahun ke-5 adalah 45 angkatan.

### **3.2 EESIENSI SUMBER DAYA DAN REALISASI ANGGARAN;**

#### **i. Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran**

Analisis realisasi keuangan tahun 2022 dapat digambarkan berdasarkan Sumber dana dan sasaran pada Satuan Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Sebagai informasi bahwa yang dianalisis untuk mengukur kinerja keuangan hanya belanja langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut:

**Tabel 0.9**  
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana**

<b>No</b>	<b>Sumber Anggaran</b>	<b>Alokasi (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Keu (%)</b>	<b>Fisik Kegiatan (%)</b>
1.	APBD	7.486.874.290,00	7.008.232.339,00	93,61	100
2.	Belanja Pegawai	7.486.874.290,00	7.008.232.339,00	93,61	100

*D. Belanja Tidak Langsung/Gaji Tahun anggaran 2022*

**Tabel 0.10**  
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana**

No	Sumber Anggaran	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)	Fisik Kegiatan (%)
<b>1.</b>	<b>APBD</b>	<b>9.115.839.777,00</b>	<b>8.636.519.890,00</b>	<b>94,74</b>	100
	Belanja Barang dan Jasa	9.115.839.777,00	8.636.519.890,00	94,74	100
<b>2.</b>	<b>APBN</b>	<b>4.335.633.000,00</b>	<b>4.237.694.505,00</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4.335.633.000,00	4.237.694.505,00	98	100
<b>3.</b>	<b>Jumlah (I + 2)</b>	<b>13.451.472.777,00</b>	<b>12.874.214.395,00</b>	<b>95,7</b>	<b>100</b>

E. *Belanja Langsung Tahun anggaran 2021*

**Tabel 0.11**  
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Program**

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)
<b>I.</b>	<b>APBD</b>	<b>16.602.714.067,00</b>	<b>15.644.752.229,00</b>	<b>94,23</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.881.313.217,00	11.335.943.805,00	95,41
2	Program Pelayanan Izin Usaha simpan Pinjam	88.674.200,00	88.027.625,00	99,27
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	138.987.500,00	138.520.110,00	99,66
4	Program Penilaian Kesehatan Koperasi	229.034.475,00	224.015.662,00	97,81
5	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	156.839.800,00	149.960.180,00	95,61
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	490.154.875,00	489.281.065,00	99,82
7	Program Pemberdayaan UMKM	307.485.825,00	304.050.850,00	99,88
8	Program Pengembangan UMKM	806.810.100,00	784.727.295,00	97,26
9	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi (UPT Balai Pelatihan Koperasi)	1.119.545.575,00	973.414.819,00	86,95
10	Program Pengembangan UMKM	1.297.018.525,00	1.050.503.105,00	80,99
<b>II.</b>	<b>APBN</b>	<b>4.335.633.000,00</b>	<b>4.237.694.505,00</b>	<b>98</b>
1	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4.335.633.000,00	4.237.694.505,00	98
<b>III.</b>	<b>JUMLAH ( I + II)</b>	<b>20.938.347.067,00</b>	<b>19.882.446.734,00</b>	<b>94,96</b>

Berdasarkan tabel realisasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari jumlah komulatif anggaran APBN dan APBD (setelah perubahan) teralokasi anggaran sebesar Rp. 20.983.347.067,00,- terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp. 19.882.446.734,00,- (94,96%) sementara fisik kegiatan mencapai 100%. Tidak maksimalnya realisasi serapan keuangan tersebut disebabkan:

1. Sisa dana dari pekerjaan yang telah dilaksanakan 100% seperti selisih kontrak dan SPK, selisih perjalanan dinas dan lain-lain.
2. Efisiensi Penggunaan Listrik, telepon dan air dan kegiatan lainnya yang tidak terealisasi karena adanya penghematan.
3. Terbatasnya pelaksanaan kegiatan oleh adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diakibatkan oleh pandemi Covid -19.

### **3.3 Inovasi**

#### **3.3.1 Masalah dan Hambatan Umum**

Permasalahan dan hambatan secara umum yang mempengaruhi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah Situasi pandemic Global yang berdampak pada semua aspek perekonomian baik pelaku koperasi maupun UKM dan permasalahan lain dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Permasalahan Administratif
  - i. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Koperasi dan UKM tahun 2022 belum memadai sehingga sebagian besar tidak sesuai dengan alokasi tahunan yang tercantum dalam RENSTRA.
  - ii. Masih rendahnya SDM Aparat yang berkompeten di bidangnya berdasarkan tupoksi yang diemban.
  - iii. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
  - iv. Hal-hal lain yang sifatnya baik administratif maupun teknis pelaksanaan.

b) Permasalahan Teknis

i. Sektor Koperasi

- i. Kualitas SDM pengelola koperasi relatif masih rendah.
- ii. Kemampuan untuk mengakses modal utamanya pada perbankan masih lemah.
- iii. Kemampuan mengakses pasar masih lemah.
- iv. Partisipasi anggota pada koperasi masih rendah, utamanya pada kesadaran anggota untuk menabung pada koperasi.

ii. Sektor UKM

- i. Pembinaan UKM belum tepat sasaran
- ii. Database UKM masih belum sepenuhnya Update dan detail.
- iii. Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitasi dan mengembangkan UKM.
- iv. Kurangnya pemahaman UKM terhadap aturan mengakses permodalan dan Lembaga Keuangan.
- v. Kurangnya Jumlah Produk UKM yang terstandarisasi mutu dan sertifikasi produk.
- vi. Kurangnya modal dan terbatasnya akses pembiayaan.

### **3.3.2 Inovasi**

Berkaitan dengan pemecahan masalah akuntabilitas kinerja, maka kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, daerah stake holder maupun instansi terkait, sangat diharapkan terkhusus juga dalam hal Pemulihan Ekonomi para pelaku koperasi maupun UKM, yang mana dapat memicu pencapaian realisasi kinerja yang lebih baik untuk tahun berikutnya

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini akan diuraikan pemecahan masalah :

#### **a. Secara Administratif**

- i. Tahun yang akan datang diharapkan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai dengan RENSTRA.
- ii. Untuk meningkatkan kinerja Aparat maka diperlukan peningkatan kualitas SDM secara bertahap sesuai kondisi keuangan yang dimiliki.
- iii. Mengingat kondisi beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki tidak layak lagi untuk dimanfaatkan, maka sangat diperlukan penambahan dan pembangunan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
- iv. Penentuan target indikator pada semua tataran agar ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan alokasi dana yang telah ditetapkan sehingga pencapaian target indikator dapat lebih maksimal.
- v. Evaluasi penentuan target indikator kinerja agar lebih maksimal, mudah tercapai dan tepat sasaran.
- vi. Untuk program kegiatan yang dibiayai oleh pusat (APBN) agar dilakukan koordinasi baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Pusat agar sinkronisasi program dapat diwujudkan

#### **b. Secara Teknis**

- i. Sektor Koperasi
  1. Peningkatan kualitas SDM perlu terus dilakukan diantaranya melalui kegiatan pelatihan, Bimtek, Sosialisasi, magang dan bantuan tenaga ahli.

2. Peningkatan kemampuan permodalan melalui bantuan sarana usaha, bantuan sertifikasi tanah sebagai agunan tambahan untuk akses modal dengan perbankan dan fasilitasi dengan lembaga keuangan perbankan.
  3. Perlu terus diupayakan bantuan fasilitasi pemasaran dan permodalan, baik melalui promosi, jaringan kemitraan dan temu usaha bisnis.
  4. Melakukan penyuluhan perkoperasian untuk meningkatkan kesadaran anggota tentang pentingnya berkoperasi, melakukan klasifikasi koperasi untuk memberikan penilaian koperasi yang berkualitas.
- ii. Sektor UKM
- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif  
Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
  - b. Bantuan Akses Permodalan  
Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal.
  - c. Perlindungan Usaha  
Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah.
  - d. Pengembangan Kemitraan  
Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Selain itu, juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian,

UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

e. Pelatihan dan Bimbingan Teknis

Meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Selain itu, juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

f. Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.

g. Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya

h. Mengembangkan Promosi

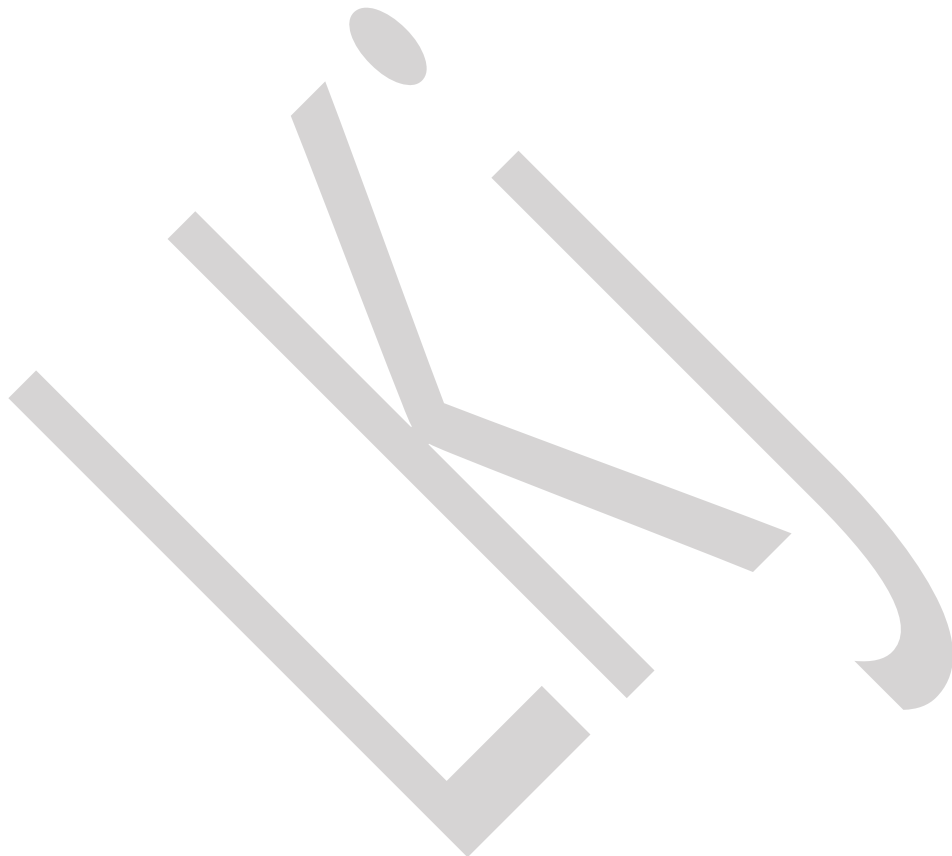
Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu, perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.

i. Membangun Kerjasama Yang Setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

j. Mengembangkan Sarana dan Prasarana

Perlu adanya pengalokasian tempat usaha bagi UKM di tempat-tempat yang strategis sehingga dapat menambah potensi berkembang bagi UKM tersebut.





## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2022 yakni:

- i. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
- iii. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan 2 di atas diperoleh dari laporan kinerja masing-masing unsur terkait yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategik.
- iv. Dalam pencapaian kinerja, dari 8 program APBD dan 1 program APBN yang ditetapkan, umumnya telah mencapai kinerja sasaran yang diharapkan.
- v. Dari capaian tersebut, harus diakui masih terdapat kegiatan yang belum maksimal namun telah diupayakan untuk memenuhi kondisi yang diharapkan masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian program adalah pada tingkat hasil (Outcome). Organisasi telah dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran.
- vi. Pencapaian realisasi target capaian pada pencapaian program adalah pada tingkat hasil (Outcome) tahun 2022 juga sangat dipengaruhi situasi ekonomi global yang berdampak pada ekonomi nasional karena adanya pandemic covid-19 sejak pertengahan tahun 2020

- vii. Regulasi pula ikut berkontribusi pada pencapaian beberapa realisasi kinerja karena penentuan target sebelumnya masih mengacu pada regulasi yang lama.

Palu,      Maret 2023  
Kepala Dinas  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Sulawesi Tengah

**SISLIANDY PONULELE**  
Pembina Utama Madya  
NIP: 19780707 199712 1 001